

PEKERJA INFORMAL DI PERKOTAAN DAN ASPIRASI TERHADAP PEKERJAAN LAYAK

Nawawi
Laila Nagib
Endang Sri Soesilowati
Devi Asiati
Dewi Harfina



Pusat Penelitian Kependudukan
LIPI - Jakarta



elmatara

**Pekerja Informal di Perkotaan dan Aspirasi
Terhadap Pekerjaan Layak**

Editor:

Laila Nagib

Penulis:

Nawawi

Laila Nagib

Endang Sri Soesilowati

Devi Asiati

Dewi Harfina

Desain Cover:

Puji Hartana

Layout:

Tim Elmaterra

ISBN:

978-979-185-418-4



Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Widya Graha LIPI lt X

Jl. Gatot Subroto Kav.10 Jakarta Selatan 12710

Bekerjasama dengan



Penerbit Elmaterra (Anggota Ikapi)

Jl. Solo Km 9 Sambilegi Baru, Maguwoharjo Yogyakarta

Email:elmaterapublishing@yahoo.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2013

KATA PENGANTAR

Pencapaian pekerjaan layak merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping meningkatkan pendapatan, pencapaian pekerjaan layak juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas. Pencapaian pekerjaan layak juga berperan dalam menjaga martabat pribadi, stabilitas ekonomi di tingkat keluarga, dan bentuk demokrasi yang menjadi hak setiap individu dalam masyarakat. Di samping itu, pencapaian pekerjaan yang layak sangat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Upaya pencapaian pekerjaan layak untuk semua orang (*decent work for all*) tidak akan berhasil tanpa menyentuh ekonomi informal. Hal ini karena yang menjadi target dari pencapaian pekerjaan layak adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang sebagian besar adalah para pelaku kegiatan ekonomi informal. Oleh karena itu diperlukan strategi komprehensif dan terpadu yang mencakup berbagai kebijakan dan program dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna mengurangi aspek keterbatasan dan kelemahan ekonomi informal. Upaya yang harus terus dilakukan adalah mempertahankan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan potensi ekonomi informal, peningkatan perlindungan, hingga meningkatkan keterlibatan para pekerja dan unit-unit ekonomi informal dalam setiap pe-

mentuan kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks persaingan global, perlindungan (proteksi) dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi tradisional (informal) sangat diperlukan terutama melalui kebijakan investasi yang seimbang antara pengembangan ekonomi tradisional dan modern. Oleh karena itu, melepas ekonomi tradisional (yang dicirikan dengan berbagai keterbatasan) untuk bersaing secara bebas dalam persaingan global dengan ekonomi modern (yang memiliki berbagai kekuatan), merupakan sebuah kekeliruan besar.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan, mengenai konsep pekerjaan layak dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia. Hal yang mendorong dilakukannya penelitian ini adalah karena masih terbatasnya penelitian yang secara khusus melihat upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia dari perspektif pekerjaan yang layak khususnya di ekonomi informal.

Terlaksananya kegiatan penelitian hingga penerbitan buku ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, perorangan maupun lembaga, yang telah membantu kelancaran proses penelitian hingga penerbitan buku ini.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala masukan, saran dan kritik dari pembaca akan sangat membantu bagi penyempurnaan buku ini dan juga menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, Maret 2013
Plt. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PEKERJAAN LAYAK, EKONOMI INFORMAL, DAN KEMISKINAN	1
<i>Oleh: Nawawi</i>	
BAB II DINAMIKA EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN DAERAH PERKOTAAN: Kasus Kota Surakarta dan Tangerang.....	39
<i>Oleh: Dewi Harfina</i>	
BAB III DINAMIKA PEKERJAAN EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN	71
<i>Oleh: Devi Asiati</i>	
BAB IV PEKERJAAN LAYAK PEKERJA EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN	113
<i>Oleh: Endang Sri Soesilowati</i>	
BAB V PENCAPAIAN PEKERJAAN LAYAK DALAM KONTEKS PENGURANGAN KEMISKINAN	137
<i>Oleh: Laila Nagib dan Nawawi</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komponen Ketenagakerjaan dan Indikator Turunan	11
Tabel 1.2. Komponen Hak di Tempat Kerja dan Indikator Turunannya	15
Tabel 1.3. Komponen Jaminan Sosial dan Indikator Turunannya	17
Tabel 1.4. Komponen Dialog Sosial dan Indikator Turunannya	20
Tabel 2.1. Perkembangan Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Penduduk Usia Kerja di Kota Surakarta, 2005 dan 2009	50
Tabel 2.2. Perkembangan Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang, 2005 - 2010	62
Tabel 3.1 Pendapatan Rata-Rata per Minggu Pekerja Ekonomi Informal	88
Tabel 3.2 Rata-rata Jumlah Jam Kerja Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan	89
Tabel 3.3 Distribusi Pekerja Sektor Informal Menurut Tempat Bekerja Jenis dan Status Pekerjaan	94
Tabel 4.1. Korelasi Pearson antara Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak dengan Anggapan Kelayakan Pekerjaan Utama Responden	127

Tabel 4.2. Hasil Uji Wald Berdasarkan Persamaan .1	129
Tabel 4.3. Model Regresi Logistik	131
Tabel 4.4. Indikator Pekerjaan Layak yang Disesuaikan dengan Karakteristik Ekonomi Informal di Lokasi Kajian	133
Tabel.5.1. Matrik Strategi Pencapaian Pekerjaan Layak Berdasarkan Indikator Elemen Dasar dan Prioritas Kebijakan dan Program	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Per Kapita Kota Surakarta, 2005 - 2010	43
Gambar. 2.2. PDRB Kota Surakarta Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2005, 2009 dan 2010	46
Gambar 2.3. Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2010	47
Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Surakarta Tahun 2005-2011	48
Gambar 2.5. Distribusi Penduduk yang bekerja menurut Lapangan, Jenis Pekerjaan Utama, dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2008, 2009, dan 2010	52
Gambar 2.6. Persentase Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang, 2000 -2011.	55
Gambar 2.7. Perkembangan Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kota Tangerang Tahun 2001, 2004, dan 2010	56
Gambar 2.8. Paramida Penduduk Kota Tangerang, 2010	59
Gambar 2.9. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang, 2003 - 2010	60
Gambar 2.9. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang 2008 - 2010 (Persen)	63

Gambar 2.8. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan dan Jenis Pekerjaan di Kota Tangerang, Tahun 2008, 2009 dan 2010	64
Gambar 3.1a. Pekerja Sektor Informal menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Surakarta	75
Grafik 3.1b. Pekerja Sektor Informal menurut Lapangan Pekerjaan Kota Tangerang	76
Grafik 3.2a. Pekerja Sektor Informal Menurut Jenis Pekerjaan di Kota Surakarta	78
Grafik 3.2b. Pekerja Sektor Informal Menurut Jenis Pekerjaan di Kota Tangerang	81
Grafik 3.3a. Pekerja Sektor Informal Menurut Status Pekerjaan di Kota Surakarta	83
Grafik 3.3b. Pekerja Sektor Informal Menurut Status Pekerjaan di Kota Tangerang	83
Gambar 3.4 Distribusi Responden menurut Jenis Gangguan Keamanan di Tempat Kerja di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011	96
Gambar 3.5 Distribusi Responden yang Mengalami Gangguan Keamanan Tempat Kerja dan Pernah Mengalami Kecelakaan Menurut Lapangan, Jenis, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011	97
Gambar 3.6 Distribusi Responden yang Memperoleh Jaminan Kesehatan Menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011	100
Gambar 3.7 Distribusi Responden yang Mengikuti Pelatihan/ Pembinaan Menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011	102
Gambar 3.8 Distribusi Responden yang Memperoleh Bantuan/ Kredit menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011	106

Gambar 3.9 Distribusi Responden yang menjadi anggota organisasi pekerja menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011	107
Gambar 4.1 Layak atau Tidak Layaknya Pekerjaan Utama Responden Berdasarkan Alasannya	118
Gambar 4.2. Aspirasi Terhadap Kelayakan Suatu Pekerjaan .	121
Gambar 4.3. Nilai rata-rata tingkat kepentingan indikator pekerjaan layak	123
Gambar 4.4. Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden di Dua Daerah Penelitian	124
Gambar 4.5. Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak Berdasarkan Lapangan Usaha Responden di Dua Daerah Penelitian	125
Gambar 4.6. Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak Berdasarkan Status Pekerjaan Responden di Dua Daerah Penelitian	126

BAB I

PEKERJAAN LAYAK, EKONOMI INFORMAL, DAN KEMISKINAN

Oleh: Nawawi

1.1. Pendahuluan

Dalam konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2005, lebih dari 150 kepala negara dan kepala pemerintahan telah berkomitmen untuk melaksanakan salah satu agenda internasional yakni pencapaian pekerjaan layak yang mengharuskan adanya tindakan di tingkat global, regional maupun nasional. Komitmen tersebut kemudian ditegaskan kembali pada Juli 2006 dalam sidang tingkat tinggi Badan Ekonomi dan Sosial PBB yang mengakui bahwa agenda pencapaian pekerjaan layak merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan ketenagakerjaan yang merata dan produktif dan menetapkannya menjadi sasaran utama kebijakan dan strategi pembangunan di setiap negara, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. Pada Februari 2008, Komisi PBB untuk Pembangunan Sosial juga telah menetapkan resolusi tentang meningkatkan kesempatan kerja yang merata dan pencapaian pekerjaan layak bagi semua orang, sekaligus menegaskan kembali adanya kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan kondisi kondusif di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka pencapaian pekerjaan layak.

Indonesia merupakan salah satu dari kelompok negara pertama di dunia yang sejak awal telah menyepakati rencana aksi *decent work* dan turut berkomitmen untuk mempromosikan serta

mengupayakan pencapaian pekerjaan layak. Bahkan pencapaian pekerjaan layak telah menjadi penekanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahap kedua tahun 2010-2014 dan sekaligus menjadi salah satu strategi penting dalam agenda peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dikenal dengan *triple track strategy* yaitu *pro-job*, *pro poor* dan *pro growth* yang berupaya untuk terciptanya kesempatan kerja yang layak, yaitu lapangan kerja produktif, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta memberikan kebebasan berekspresi dan beraspirasi, kebutuhan berorganisasi dan ruang partisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan pekerja.

Pekerjaan layak merupakan konsep yang luas dengan beragam aspek penerapan yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Idenya adalah mengemukakan beragam dimensi luas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang kemudian dirangkum dalam kalimat yang dapat dimengerti oleh semua orang. Namun demikian empat elemen dasar dari pekerjaan layak, yakni kesempatan kerja, hak pekerja, jaminan sosial dan dialog sosial, bersifat universal dan diaplikasikan bukan hanya kepada para pekerja di sektor ekonomi formal, tetapi juga para pekerja tanpa peraturan upah, wirausaha, serta pekerja rumah (Ghai, 2003; Widarti, 2007). Dalam perkembangannya, ke-empat elemen dasar pekerjaan layak tersebut kemudian diturunkan dalam berbagai indikator. Anker (2002) menurunkan empat komponen tersebut dalam 11 variabel/ dimensi dan menjadi 39 indikator turunannya. Sementara Widarti (2007) dalam kajiannya tentang aplikasi indikator pekerjaan layak dan ketersediaan data di Indonesia menurunkan 4 komponen utama pekerjaan layak menjadi 23 indikator (ILO, 2007).

Meskipun bersifat universal dalam arti bahwa indikator tersebut dapat diterapkan pada semua negara dengan tahap-tahap pembangunan yang berbeda, tetapi dalam penerapannya terdapat

beberapa indikator yang cenderung “bias” pada negara maju dan pekerja sektor formal, khususnya untuk komponen perlindungan sosial dan dialog sosial¹. Permasalahan lain, selama ini “belum” (kurang) tersedia data tentang “pekerjaan layak” dilihat dari berbagai komponen. Di samping itu juga terdapat kecenderungan pengukuran yang bersifat kuantitatif dan kurang didukung dengan analisis kualitatif. Padahal terdapat berbagai aspek yang tidak terukur yang dapat memberikan makna berbeda dalam upaya pencapaian pekerjaan layak, khususnya dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan.

Hasil penelitian PPK-LIPI tentang Pemetaan Pekerjaan di Kawasan Miskin Perkotaan di Kota Bandung pada tahun 2009, menunjukkan bahwa tidak semua indikator decent work (ILO) dapat dioperasionalkan di lokasi kajian (hanya 12 dari 23 indikator). Tingginya proporsi pekerjaan di sektor informal dan bervariasinya jenis pekerjaan, menyebabkan banyak indikator ‘pekerjaan layak’ (ILO) sulit diterapkan. Hal ini terutama karena konsep decent work cenderung bias pekerjaan formal (terutama industri), dan tidak adanya standard untuk mengukur ‘kelayakan’ suatu pekerjaan. Sebagian besar indikator ‘kelayakan’ pekerjaan, cenderung menunjukkan pekerjaan ‘tidak layak’, terutama dilihat dari beberapa indikator seperti ‘proporsi pekerja di sektor informal’, ‘pengangguran pemuda’, ‘tingkat pengangguran’, ‘share perempuan di pekerjaan profesional’, ‘penghasilan rata-rata pekerja’, dan ‘kelebihan jam kerja’ pekerja (Nagib.dkk, 2010).

¹ Hasil Kajian Widarti (2007) menyimpulkan bahwa indikator perlindungan sosial dan dialog sosial merupakan aspek penting yang berkaitan dengan tingkat dan kapasitas pembangunan masyarakat. Perlindungan sosial mencakup kebutuhan mendesak seseorang dan untuk memberikan perlindungan atas kejadian yang tidak terduga, di mana jaminan tersebut merupakan aspek penting dari kerja yang layak. Sebagian besar negara industri dan transisi menyediakan perlindungan untuk resiko-resiko yang dihadapi oleh mayoritas pekerja. Namun sebagian besar negara berkembang, cakupannya hanya terbatas kepada pekerja sektor formal dengan tingkat kesertaan yang juga masih belum optimal, termasuk yang ditemukan di Indonesia.

Idealnya pengembangan suatu konsep dan pengukuran indikator harus menyediakan ukuran langsung dari tujuan tertentu, termasuk dalam kaitan ini adalah penentuan indikator yang aplikatif terhadap kondisi di masing-masing negara. Sebagai contoh indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) bukan merupakan satu-satunya indikator yang penting bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena TPT tidak mencerminkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia secara keseluruhan (Handayani, 2008). Terlebih lagi, bila indikator TPT tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan. Sebagian besar penduduk Indonesia tidak akan sanggup untuk menjadi penganggur, sehingga hal ini kurang sensitif untuk menggambarkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya (Lyn, 1992:3). Berbeda dengan negara-negara yang lebih maju di mana tunjangan pengangguran (*unemployment benefit*) disediakan. Di sisi lain, sebagian besar penduduk Indonesia yang berpotensi menganggur sebenarnya tertampung di ekonomi informal yang kondisinya erat dengan kemiskinan (Nagib,dkk.2010).

Selanjutnya, terait dengan pencapaian tujuan pembangunan millenium (*The Millennium Development Goals/MDGs*), yaitu mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan ketenagakejaan produktif dan merata, serta pekerjaan layak untuk semua orang, hal tersebut tidak akan berhasil tanpa meyentuh perekonomian informal. Dalam konteks Indonesia hal tersebut sangat penting mengingat ciri perekonomian Indonesia yang dualistik di mana perekonomian informal (tradisional) memiliki peran dominan dalam pasar kerja dibandingkan perekonomian modern (formal). Artinya untuk kasus Indonesia penerapan indikator perkejaan layak sangat perlu memperhatikan dinamika pekerjaan di sektor ekonomi informal (agar lebih aplikatif), walaupun penerapannya di sektor formalpun masih menghadapi banyak keterbatasan (Widarti, 2007).

Di samping itu, berkaitan dengan konteks pemerintahan yang terdesentralisasi, indikator-indikator pekerjaan layak yang

cenderung bersifat makro perlu juga memperhitungkan keragaman wilayah/ daerah serta tradisi demokratik yang sedang berkembang. Sebagaimana dikemukakan dalam *Discussion Paper for the Tripartite Meeting of Experts on the Measurement of Decent Work* di Geneva, September 2008 bahwa indikator pekerjaan layak, selain mencakup seperangkat indikator-indikator utama, juga harus mencerminkan keadaan khusus yang dapat mengidentifikasi indikator yang paling relevan, sehingga dapat menangkap semua dimensi pekerjaan layak. Artinya, dalam memahami pencapaian pekerjaan layak, dapat ditambahkan indikator-indikator baru yang lebih relevan dan spesifik (ILO, 2007;13).

Sejak penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otodas), yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah tingkat II memiliki hak untuk menjalankan aktivitas pembangunan secara otonom, kecuali dalam beberapa bidang. Salah satu tujuan diberlakukannya Otodas adalah untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah. Kebijakan yang bersifat *topdown* menyebabkan program penanggulangan kemiskinan selama ini kurang sinkron antara pemerintah pusat dengan daerah. Dengan sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi di mana sebagian kewenangan kebijakan dapat ditentukan oleh daerah (*bottom up*), maka dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah dapat memprioritaskan program pembangunan pada pengurangan tingkat kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, kenyataannya selama diberlakukannya Otodas, upaya pengurangan kemiskinan belum menjadi target utama yang harus diselesaikan oleh sebagian besar pemerintahan di daerah.

Hasil kajian P2E LIPI (2004) tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah menyimpulkan bahwa tekanan pembangunan daerah di era Otodas nampaknya lebih mengintensifkan dan mengekstensifkan pemanfaatan sumber-sumber yang ada di daerahnya, dengan target utama peningkatan penda-

patan asli daerah (PAD). Beberapa daerah melakukannya dengan menuntut penerimaan bagi hasil yang lebih adil dari dana perimbangan yang diharapkan daerah (Erfani, dkk. 2004). Selain itu, jika melihat hasil laporan audit BPK pada pertengahan tahun 2011 tentang kinerja penggunaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah, semakin menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum “kreatif” dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Hampir sebagian besar anggaran pemerintahan habis hanya untuk pembiayaan birokrasi dan belanja kepegawaian sehingga sangat tergantung pada dana perimbangan dari pusat (P2P LIPI, 2011). Sementara itu, hasil kajian PPK LIPI tentang Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, menyimpulkan bahwa kekayaan SDA yang dimiliki daerah dan tingginya PAD tidak secara signifikan dapat menjadi pemicu terciptanya kesempatan kerja yang berkelanjutan. Jumlah penduduk miskin tetap relatif tinggi meskipun berbagai proyek “mercusuar” telah dilaksanakan di daerah tersebut (PPK LIPI, 2004).

Terkait dengan permasalahan di atas, pelaksanaan otonomi daerah seharusnya dapat memberikan peluang bagi usaha pengurangan kemiskinan, seperti memberi kemudahan masuknya investasi ke daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi masyarakat. Berkembangnya kegiatan investasi di daerah diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah dengan prinsip *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*. Dalam hal ini, melalui kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan pengaturan keuangan yang dimiliki, pelaksanaan Otoda diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan termasuk pengurangan kemiskinan di daerah. Artinya kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat sejauh mana dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkesinambungan.

1.2. Konsep Pekerjaan Layak

Konsep "*decent work*" diperkenalkan pertama kali pada tahun 1999 dalam laporan Direktorat Jenderal ILO pada pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional Sesi ke-87. Berdasarkan definisi ILO (2005), *decent work* (pekerjaan layak) diartikan sebagai berikut:

"Decent work involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income, security in the workplace and social protection for families, better prospects for personal development and social integration, freedom for people to express their concerns, organize and participate in the decisions that affect their lives and equality of opportunity and treatment for all women and men".

Konsep *decent work* tersebut diturunkan ke dalam empat komponen yang menjadi pilar utama pencapaian pekerjaan layak, yakni 1) Kesempatan Kerja; 2) Hak Dasar di Tempat Kerja; 3) Jaminan Sosial; 4) Dialog Sosial. Keempat komponen ini diaplikasikan pada semua jenis pekerjaan tanpa melihat perbedaan formal dan informal di negara maju maupun negara berkembang. Keempat komponen tersebut juga merupakan pengakuan terhadap hak-hak fundamental setiap pekerja dan merupakan kriteria utama agar sebuah pekerjaan dapat dikatakan "layak". Kriteria tersebut meliputi adanya non-diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif, upah yang adil, keamanan dalam bekerja, kondisi kerja yang nyaman, perlindungan terhadap resiko kehilangan pendapatan, kebebasan berpendapat dan berserikat dan kesetaraan antara pekerja perempuan dan laki-laki.

Konsep *decent work* juga memiliki cara pandang lain dengan mengelompokkan komponen dasar menjadi dua kategori berdasarkan sumber pencapaiannya. Pada kategori pertama, yaitu komponen kesempatan kerja dan jaminan sosial merujuk pada pencapaian yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Sementara kategori kedua, yakni pengakuan hak pekerja dan dialog sosial merujuk pada keberadaan peraturan

terkait ketenagakerjaan yang mengatur berbagai perlindungan terhadap pekerja dan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.

1.3. Keterbatasan Konsep dan Indikator Pekerjaan Layak

Dalam perkembangannya, konsep *decent work* yang diperkenalkan oleh ILO menimbulkan sejumlah pertanyaan (Ghai, 2002:6). Diantara kritik yang sering dilontarkan terkait dengan konsep *decent work* adalah: Apakah konsep tersebut memiliki validitas universal dan dapat diterapkan di semua negara dengan situasi yang saling berbeda? Apakah keempat komponen pekerjaan layak tersebut memiliki posisi yang sama dalam pencapaiannya? Bagaimana menempatkan konsep *decent work* dalam sebuah kerangka prioritas terutama pada beberapa negara dengan tahapan pembangunan yang berbeda? Bagaimana dengan ketersediaan data yang umumnya sangat terbatas di negara-negara berkembang?

Dalam perdebatannya seringkali dinyatakan bahwa konsep dan keempat komponen *decent work* hanya dapat diaplikasikan pada negara industri maju. Hal tersebut karena pada negara industri maju penciptaan pekerjaan layak sudah didukung sejak awal tahun 1950-an melalui penyiapan norma dan standar ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, pemberian tingkat upah yang adil, adanya jaminan sosial bagi seluruh komponen masyarakat, serta kesetaraan peran antara kelompok pekerja dan pengusaha.

Sementara pada kasus negara berkembang konsep tersebut sulit diterapkan karena mayoritas penduduk bekerja di sektor informal. Bahkan pada sektor formal konsep tersebut belum sepenuhnya dapat diaplikasikan. Hal tersebut karena pekerja/buruh di sektor industri di banyak negara berkembang masih terus bergejolak menuntut perbaikan upah yang layak, keamanan dalam bekerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan lainnya. Banyaknya kasus perburuhan seperti mogok kerja, PHK sepihak,

aksi unjuk rasa pekerja/buruh menunjukkan bahwa belum terpenuhinya hak-hak pekerja.

Dalam menyikapi perdebatan tersebut, Ghai (2002) menyatakan bahwa konsep pekerjaan layak harus diletakkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, baik pekerja formal dan informal, paling tidak pada tingkat standar pemenuhan kehidupan minimum. Semua pekerja pasti mengharapkan adanya perbaikan dalam pendapatan (upah), keselamatan dan kesehatan kondisi kerja, pemenuhan kebutuhan yang menjadi haknya dan memiliki kebebasan berorganisasi untuk mempertahankan dan menyuarakan berbagai kepentingan dalam setiap keputusan yang akan berdampak kepada dirinya sebagai pekerja. Di sisi lain, pemenuhan semua hal tersebut juga merupakan kewajiban setiap pemerintah dalam suatu negara. Pencapaian semua hal tersebut juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui berbagai dokumen konvensi internasional seperti dalam Deklarasi HAM Universal dan Konvensi ECOSOC. Selain itu, terdapat banyak konvensi PBB dan ILO lainnya terkait dengan pemenuhan hak dasar pekerja yang juga mengikat seluruh negara untuk mengakui hak fundamental setiap orang, termasuk pekerja dan mempromosikan pencapaiannya. Oleh karena itu, walaupun konsep pekerjaan layak masih menjadi perdebatan dalam validitasnya, tetapi isi dan mekanisme pencapaiannya sangat penting diadopsi oleh semua negara.

Komponen Ketenagakerjaan

Terdapat dua indikator utama yang menjadi aspek penting dalam komponen ketenagakerjaan *decent work*, yaitu kesempatan kerja, pengupahan yang adil dan pekerjaan yang produktif. Beberapa indikator yang termasuk dalam kesempatan kerja adalah pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), rasio angkatan kerja terhadap jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran. Variabel utama penghasilan yang merupakan indikator rujukan kualitas kerja diukur berdasarkan indikator proporsi penda-

patan pekerja kurang dari setengah median tingkat upah nasional dan tingkat kemiskinan absolut. Sementara variabel kondisi kerja terkait erat dengan jam kerja, kerja malam, waktu istirahat, santunan berhenti bekerja, kesehatan dan keamanan kerja.

Pada kenyataannya, berbagai indikator tersebut memiliki berbagai keterbatasan baik dari teknis pengukuran maupun aplikasinya di setiap negara. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan biasanya selalu lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan yang melakukan pekerjaan di rumah, pekerjaan tambahan sambil mengurus anak, membantu usaha suami/keluarga, atau bekerja di sektor informal biasanya tidak masuk dalam kategori bekerja. Begitu pula dengan indikator tingkat pengangguran yang aplikasinya di negara berkembang sering menimbulkan perdebatan. Pada kelompok masyarakat marginal istilah menganggur sulit didefinisikan karena umumnya mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi informal yang tidak memiliki batasan jelas untuk alokasi bekerja. Di banyak negara berkembang, di mana tingkat kesempatan kerja terbatas dan tidak adanya jaminan sosial pengangguran, setiap orang tidak akan sanggup untuk terus menganggur. Mereka biasanya akan terlibat dalam kegiatan atau upaya yang bersifat serabutan (*disguised unemployment*) untuk mempertahankan hidup.

Terkait dengan keterbatasan aplikasi beberapa indikator ketenagakerjaan yang terkait dengan kesempatan kerja tersebut, Ghai (2002) memberikan pengukuran alternatif dengan melihat proporsi pendapatan penduduk yang bekerja terhadap garis kemiskinan. Di banyak negara berkembang dan tingkat pendapatan yang rendah, penciptaan kesempatan kerja harus dilihat sebagai indikator terbatas karena proporsi pencari kerja biasanya sangat besar. Mereka biasanya akan tetap bekerja dengan tingkat penghasilan yang tidak sesuai untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum. Oleh karena itu walaupun tingkat TPAK tinggi dan pengangguran rendah tidak dapat dijadikan sebagai indikator bahwa capaian indikator ketenagakerjaan dinyatakan baik (layak).

Tabel 1.1.
Komponen Ketenagakerjaan dan Indikator Turunan

Komponen Utama	Indikator	Keterangan
Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin	Di banyak negara berkembang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan biasanya selalu lebih rendah dibanding laki-laki karena kesalahan persepsi tentang peran perempuan dalam pasar kerja.
	Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin	Di banyak negara berkembang, banyak tenaga kerja usia lanjut masih terlibat dalam kegiatan ekonomi informal khususnya ekonomi informal. Setiap negara memiliki ketentuan berbeda tentang usia pensiun.
	Tingkat pengangguran menurut jenis kelamin	Tingkat pengangguran menjadi indikator penting terhadap performa pasar kerja di banyak negara industri maju. Di negara berkembang dan pendapatan rendah, seseorang tidak mungkin menganggur terlalu lama karena ketiadaan jaminan pengangguran.
	Tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin	Di banyak negara berkembang pekerjaan yang dilakukan cenderung tidak terkait dengan pendidikan karena keterbatasan kesempatan kerja. Dapat digunakan sebagai indikator kesenjangan gender dari capaian pendidikan.

	Tingkat pengangguran pemuda (15-24 tahun) menurut jenis kelamin	Pengangguran pemuda cenderung naik terutama di kalangan terdidik yang menunggu kesempatan kerja sesuai dengan pendidikan yang dicapai
	Tingkat Pemuda yang berada diluar angkatan kerja (<i>inactive youth</i>)	Perlu dibedakan antara pemuda yang berada diluar angkatan kerja karena keterbatasan fisik (sakit) dan peningkatan akses pendidikan (kuliah).
	Pemuda yang tidak dalam status sekolah dan tidak bekerja	Indikator ini lebih tepat dibanding <i>inactive youth</i>
	Tenaga kerja berdasarkan status	Status pekerja sulit dibandingkan karena menyangkung jenis pekerjaan dan kualitas pekerjaan
	Pekerja keluarga	Kesulitan ketersediaan data
	Pekerja sektor informal	Peran dan kedudukan sektor informal yang masih diperdebatkan, apakah timbul sebagai akibat dari daya serap pasar kerja yang terbatas atau sebagai solusi mengurangi pengangguran
	Pekerja kontrak/ <i>outsourcing</i> *	Menjadi kecenderungan di banyak negara karena tuntutan sistem pasar kerja fleksibel. Merugikan bagi pekerja (<i>job insecurity</i>) tetapi menguntungkan bagi pemberi kerja (<i>company efisiency</i>)
	Jangka waktu lama kontrak *	Banyak kasus terjadi pelanggaran jangka waktu kontrak yang merugikan pekerja

Pendapatan yang adil dan pekerjaan yang produktif	<i>Working poor</i>	Pendekatan kemiskinan absolut. Tidak mencakup pekerja yang rentan dan relative terhadap kemiskinan
	Tingkat upah minimum	Dalam prakteknya penetapan UM tidak berjalan sesuai dengan aturan, sering menjadi konflik kepentingan (politik), perdebatan tentang pengukuran, dsb.
	Rata-rata upah riil	Keterbatasan estimasi pada status pekerja pemilik modal sendiri " <i>own account worker</i> "
	Rata-rata upah pada jenis pekerjaan tertentu	Ketersediaan data sulit. Dapat menggunakan indikator upah sektoral
	Tingkat upah pekerja harian	Ketersediaan data sulit
	Pekerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Ketersediaan data sulit
	Pekerja anak berdasarkan jenis kelamin	Telah diatur dalam konvensi ILO dan PBB Banyak pelanggaran karena alasan budaya, tradisi dan ekonomi
	Pekerja paksa berdasarkan jenis kelamin	Ketersediaan data sulit
	Perdagangan manusia*	Ketersediaan data sulit

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

Komponen Hak Dasar di Tempat Kerja

Komponen hak dasar di tempat kerja meliputi indikator non-diskriminasi di tempat kerja, tidak adanya pekerja paksa dan pekerja anak, dan kebebasan berserikat. Ketiga indikator ini telah

dimuat dalam berbagai konvensi PBB dan pencapaiannya dititikberatkan pada tanggung jawab negara yang memiliki peran melindungi setiap warga negara tanpa adanya perbedaan latar belakang individu maupun kelompok.

Indikator non-diskriminasi mencakup perlakuan, pengakuan dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap orang baik sebagai individu maupun anggota kelompok sosial untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan pengembangan diri. Diskriminasi pekerjaan telah diatur dalam Konvensi ILO No.111 tahun 1958 yang memandang bahwa adanya perlakuan perbedaan, pemilihan yang berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, golongan partai tertentu, etnis maupun negara tertentu yang berdampak pada ketidaksetaraan kesempatan atau perbuatan di dalam pekerjaan. Salah satu indikator paling penting dalam melihat ketiadaan non-diskriminasi pekerjaan adalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kesempatan kerja, pendapatan, tunjangan, pendidikan, pelatihan, pengembangan karir, dan pengangguran.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan pekerja anak adalah partisipasi angkatan kerja anak dalam kegiatan bekerja dan tingkat anak yang tidak terdaftar sekolah. Komitmen untuk menghapus pekerjaan paksa dan pekerja anak telah menjadi isu penting yang menarik perhatian banyak pihak. Namun demikian prakteknya masih terus berlangsung terutama di negara berkembang dan negara berpendapatan rendah. Kenyataannya menjadi ironis karena keberadaan pekerja paksa dan pekerja anak identik dengan keterpaksaan akibat kemiskinan.

Indikator yang digunakan dalam kebebasan berserikat adalah pelaksanaan hak pekerja untuk membentuk, terdaftar dan aktif dalam organisasi kelompok pekerja. Hak untuk bebas berserikat telah diakui dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Indikator yang umum digunakan dalam melihat pencapaian kebebasan berserikat adalah proporsi pekerja yang terlibat dalam kegiatan berserikat. Di negara maju, indikator ini

dapat diukur melalui tingkat densitas anggota serikat pekerja. Sementara di negara berkembang indikator ini cukup sulit diukur mengingat mayoritas pekerja terlibat dalam ekonomi informal yang tidak terorganisir secara baik. Informasi tentang komponen hak di tempat kerja dan indikator turunannya secara jelas dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2.

Komponen Hak di Tempat Kerja dan Indikator Turunannya

Komponen Utama	Indikator	Keterangan
Jam Kerja	Persentase pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu berdasarkan jenis kelamin	Pekerja ekonomi informal cenderung bekerja lebih panjang. Pengurangan jam kerja akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan pekerja sektor informal
	Standar jam kerja	Hanya aplikatif untuk pekerja formal
	Tingkat lama waktu menganggur	Ketersediaan data terbatas Aplikatif untuk negara industri maju Tidak aplikatif untuk negara berkembang dengan kesempatan kerja terbatas
	Jam kerja tahunan per orang	Hanya aplikatif untuk pekerja formal
Kestabilan dan keamanan bekerja	<i>Tenur</i> kerja kurang dari 1 tahun	Dapat menggambarkan <i>job security</i> , tetapi tidak aplikatif untuk pekerja informal dan status tidak tetap (<i>kontrak/outsourcing</i>)
	Pekerja sementara	Ketersediaan data sulit

Kombinasi bekerja dan kehidupan keluarga	Lama ijin melahirkan	Ketersediaan data sulit Aplikatif untuk sektor formal
	Tingkat bekerja perempuan yang memiliki anak usia sekolah	Ketersediaan data sulit Tidak aplikatif untuk negara berkembang Indikator ini digunakan untuk melihat hubungan tidak langsung antara penyediaan kebutuhan keluarga di tempat kerja dengan jaminan keseimbangan hidup perempuan. Semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa institusi tempat bekerja memberikan jaminan hak keseimbangan pekerja terhadap kebutuhan kehidupan pekerja
Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam	Jenis Pekerjaan berdasarkan jenis kelamin	Indikator – indikator ini digunakan untuk melihat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan
	Proporsi perempuan	

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

Komponen Jaminan Sosial

Komponen jaminan sosial sebagai sebuah aspek dalam melihat kerja layak diformulasikan sebagai upaya untuk melihat kemampuan memenuhi kebutuhan mendesak dan memberikan perlindungan atas kejadian yang tidak terduga kepada setiap orang. Beberapa indikator yang termasuk dalam komponen jaminan sosial yang menjadi kriteria utama *decent work* adalah: pengeluaran publik untuk jaminan sosial sebagai proporsi PDB, pengeluaran publik yang mendukung kebutuhan pendapatan terhadap PDB, kelompok miskin yang mendapatkan manfaat bantuan pendapatan langsung, proporsi penduduk di atas 65 tahun yang mendapatkan jaminan pensiun, cakupan jaminan sosial, proporsi pendu-

duk yang secara aktif berkontribusi terhadap dana pensiun, dan pengeluaran pelayanan kesehatan terhadap PDB.

Dalam konstitusi Indonesia hak untuk mendapatkan jaminan sosial telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H(3) di mana “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”. Dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut, DPR RI pada akhir Oktober 2011, telah mengesahkan UU BPJS yang pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan awal tahun 2014 untuk jaminan sosial kesehatan dan awal tahun 2015 untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, aplikasi jaminan sosial sebagai salah satu indikator kriteria *decent work* masih memiliki banyak keterbatasan. Bahkan untuk pekerja di sektor formal pun mekanisme jaminan sosial yang dijalankan masih belum optimal. Aplikasi di negara industri maju, hampir sebagian besar sistem jaminan sosial melibatkan peran pekerja dan swasta (perusahaan), sementara di negara berkembang sangat mengandalkan kemampuan negara (pemerintah) untuk menyediakan jaminan tersebut, terutama jaminan kesehatan dan pendidikan. Informasi tentang komponen perlindungan sosial dan indikator turunannya secara jelas dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut ini:

Tabel 1.3.
Komponen Jaminan Sosial dan Indikator Turunannya

Komponen Utama	Indikator	Keterangan
Jaminan Sosial	Persentase pengeluaran publik untuk jaminan sosial (persenGDP)	Hanya aplikatif untuk negara industri maju yang sudah mapan dalam pemberian skema jaminan sosial bagi pekerja maupun penduduk. Data yang tersedia sangat terbatas.

Proporsi penduduk 65 tahun ke atas yang mendapatkan dana pensiun	Hanya aplikatif untuk negara industri maju yang sudah mapan dalam pemberian skema jaminan sosial bagi pekerja maupun penduduk. Data yang tersedia sangat terbatas- sektor formal
Penerima dana langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Hanya aplikatif untuk negara industri maju yang sudah mapan dalam pemberian skema jaminan sosial bagi pekerja maupun penduduk. Data yang tersedia sangat terbatas.
Pencapaian jaminan sosial dasar	Hanya aplikatif untuk negara industri maju yang sudah mapan dalam pemberian skema jaminan sosial bagi pekerja maupun penduduk. Data yang tersedia sangat terbatas.
Proporsi kontribusi pekerja terhadap dana pensiun	
Rata-rata nilai pensiun bulanan (persentase terhadap median/minimum pendapatan)	Hanya aplikatif untuk negara industri maju yang sudah mapan dalam pemberian skema jaminan sosial bagi pekerja maupun penduduk. Data yang tersedia sangat terbatas.
Fasilitas sarana kesehatan kota dan desa	Hanya mencakup jumlah tetapi tidak melihat kualitas dan jangkauan capaian.

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

Komponen Dialog Sosial

Komponen dialog sosial merupakan salah satu kriteria utama dari *decent work* yang mensyaratkan adanya upaya mengutamakan perundingan bersifat kolektif dan keterlibatan seluruh pihak

dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. Menurut Widarti (2007:12) dialog sosial dapat diterapkan pada salah satu dari tiga tingkat berikut ini, yaitu antara pemberi kerja dengan pekerja terkait kondisi dan peraturan kerja, antara manajemen dengan pekerja mengenai fungsi perusahaan, dan antara mitra sosial dengan wewenang publik mengenai kebijakan sosial dan ekonomi.

Keikutsertaan pekerja dalam perwakilan kelompok organisasi pekerja dan peran yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan indikator utama dalam dialog sosial. Semakin banyak jumlah pekerja yang tergabung dalam kelompok organisasi pekerja menunjukkan kemungkinan semakin kuat kelompok pekerja untuk dapat bernegosiasi dengan pihak pemberi kerja maupun pemerintah. Namun demikian, menurut Ghai (2002:26) besaran jumlah pekerja yang tergabung dalam organisasi perwakilan pekerja hanya mengindikasikan pengakuan keterwakilan pekerja dan tidak secara langsung merefleksikan kekuatan organisasi pekerja dalam mengoptimalkan perannya dalam menyuarakan kepentingan pekerja. Kekuatan keberadaan organisasi pekerja sangat ditentukan oleh tradisi dan sejarah panjang, sistem politik dan pelaksanaan hubungan industrial di setiap negara (Jose, 2002).

Dalam pelaksanaannya, di banyak negara berkembang kriteria dialog sosial yang menitikberatkan pada keikutsertaan (proporsi) pekerja dalam organisasi pekerja memiliki banyak keterbatasan. Umumnya mereka yang terdaftar dalam kelompok organisasi pekerja berasal dari kegiatan ekonomi formal yang jumlahnya relatif sedikit. Bahkan cenderung mengalami penurunan jumlah terutama pada negara-negara yang menganut sistem pasar kerja fleksibel melalui bentuk sistem hubungan kerja kontrak atau pekerja tidak tetap. Sementara mayoritas pekerja yang berada di ekonomi informal belum terorganisasi dengan baik seperti petani, pekerja sendiri, pembantu rumah tangga, dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Tabel 1.4
Komponen Dialog Sosial dan Indikator Turunannya

Komponen Utama	Indikator	Keterangan
Dialog Sosial	Tingkat densitas anggota serikat pekerja menurut jenis kelamin	Aplikatif untuk sektor formal Ketersediaan data terbatas
	Jumlah pengusaha yang menjadi anggota asosiasi	Aplikatif untuk sektor formal Ketersediaan data terbatas
	Kebebasan berserikat	Aplikatif untuk sektor formal Ketersediaan data terbatas
	Kasus yang ditangani dalam pengadilan hubungan industrial	Aplikatif untuk sektor formal Ketersediaan data terbatas
	Kasus pemogokan pekerja	Aplikatif untuk sektor formal Ketersediaan data terbatas
	Jumlah kelembagaan Tripartit dan Bipartit	Aplikatif untuk sektor formal Ketersediaan data terbatas

Sumber: ILO (2008) dan Tim Kajian Pekerjaan Layak, LIPI (2011)

1.4. Ekonomi Informal dan Kemiskinan

Setiap diskusi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang selalu tertuju pada isu sektor/ekonomi informal. Istilah ekonomi informal dicirikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mendominasi Negara berkembang termasuk Indonesia dan dikemukakan pertama kali oleh Keith Hart pada tahun 1973, dengan memfokuskan diantaranya pada regulasi pemerintahan, ukuran usaha, dan penerapan teknologi.

Menurut James Heints dan Panek (2007) menganalisa keterkaitan pekerjaan khususnya pekerjaan informal, sektor informal dengan kemiskinan sulit dilakukan karena ketiganya menggunakan pengukuran yang berbeda dan juga teknik pengumpulan

data survei yang berbeda. Untuk melakukan hal tersebut salah satunya adalah dengan mengukur keterkaitan struktur pekerjaan dengan tingkat kemiskinan melalui pendekatan pada tingkat individu dan rumah tangga. Mereka juga membedakan antara sektor informal dan pekerjaan informal. Hal ini mengacu pada pemahaman tentang perbedaan struktur pekerjaan formal dan informal, yang biasanya mengandung dua arti yaitu berdasarkan besaran usaha dan legalitas usaha (sektor informal), dan dengan menggunakan kriteria ada atau tidak adanya proteksi sosial (pekerjaan informal).

Berdasarkan hasil survei selama lebih dari 20 tahun Charmes (2001) menyatakan bahwa ciri-ciri utama dari sektor informal adalah mudah dimasuki, berskala usaha kecil, bekerja sendiri, dengan proporsi pekerja keluarga dan pekerja magang yang tinggi, memiliki modal dan peralatan yang sedikit, berteknologi padat karya, berkecakupan rendah, tingkat organisasi rendah dengan tidak ada akses terhadap pasar yang terorganisir, kredit formal, pendidikan dan pelatihan atau layanan dan fasilitas, penyediaan barang dan layanan yang murah, atau bahkan tidak tersedianya penyediaan barang dan layanan. Bagi beberapa analis memandang sektor informal memiliki produktivitas dan pendapatan yang rendah, sebaliknya bagi beberapa pengamat lain memandang bahwa pendapatan mereka lebih tinggi dibanding sektor publik, khususnya pada saat diterapkannya kebijakan *structural adjustment* (Charmes, 2001, hal: 3).

Selanjutnya, Charmes menegaskan bahwa walaupun aktivitas di sektor informal merupakan aktivitas legal, namun mereka jarang mematuhi persyaratan administratif resmi. Oleh karena tidak terdaftar, maka mereka tidak membayar pajak. Dia menganggap bahwa aktivitas sektor informal seringkali ditolerir sebagai suatu bentuk pengakuan tidak adanya hukum yang memadai. Sektor informal merupakan cara negara untuk mengatasi pertumbuhan penduduk, migrasi desa-kota, krisis ekonomi, kemiskinan, dan hutang. Terlebih lagi banyak pekerja upahan yang bergerak

di usaha informal sebagai pekerjaan tambahan untuk mengkompensasikan penurunan upah dan daya beli. Intinya, kita tidak dapat memberikan perbedaan yang tegas antara orang yang bekerja di sektor informal dan orang yang bekerja dengan menerima upah dan gaji dari pemerintah, publik, dan sektor swasta modern yang biasanya dikelompokkan dalam sektor yang terlindungi (Charmes, 2001, hal: 4).

Oleh karena itu, walaupun secara umum ekonomi informal dikelompokkan sebagai kelompok pekerja yang perlu dilindungi dan diberdayakan, kita tidak dapat melakukan penggeneralisasian begitu saja. Menurutnya, dengan adanya kompleksitas dan kelonggaran dari konsep informal sektor, maka tidak mudah untuk mencapai kesepakatan secara internasional dalam pendefinisian tersebut, di mana semuanya tergantung pada tujuan analisa yang digunakan oleh pengguna data.

Lebih mudah mengamati sektor informal daripada memberikan definisinya secara tepat. Sektor informal banyak ditemukan di jalanan, di tepi jalan, di gang-gang kota, seperti pedagang kecil/asongan, pedagang kaki lima, kuli, pengrajin skala kecil, tukang cukur, tukang semir sepatu (ESCAP, 2006, hal: 3). Secara umum sektor informal di sini mudah dikenali karena ukuran usahanya kecil, akses terhadap pemerintah untuk legalisasi yang terbatas, dan menggunakan teknologi yang terbatas. *Share* terbesar dari ekonomi informal adalah *self employed*, bagi mereka yang bukan *self employed*, merupakan pekerja yang mempunyai relasi kerja berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau sosial, tidak berdasarkan kontrak kerja. Sektor informal tidak homogen, tetapi terdiri dari berbagai aktivitas. Peran dari sektor informal dalam menyediakan pekerjaan dan kesempatan memperoleh pendapatan sangat penting demi untuk menekan dan tidak meluasnya (*extent* dan *intensity*) kemiskinan. Oleh karenanya, dengan meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan pekerja di sektor informal diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Demikian halnya dengan perbaikan kondisi pekerjaan di sektor informal. Di

sinilah kemudian dapat dikatakan bahwa pekerjaan layak tidak hanya di sektor formal tapi terlebih lagi di sektor informal merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mengurangi atau menekan kemiskinan. Di sinilah perlunya kebijakan untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kerja di sektor/ekonomi informal.

Dalam laporan *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP) Komisi Pengurangan Kemiskinan (2006) tentang peranan sektor informal dalam pengurangan kemiskinan dinyatakan bahwa sektor informal memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi, khususnya dalam masalah menyediakan kesempatan kerja. Mengingat karakteristik dari sektor informal umumnya adalah memiliki produktivitas dan tingkat pendapatan rendah, kondisi kerja yang buruk, dan jam kerja yang panjang, maka ringkasan laporan tersebut menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan agar dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan seperti apa yang dimaksudkan? Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi seluruh dunia. Seperti halnya konsep sektor/ekonomi informal, konsep dan pengukuran kemiskinan selalu menjadi masalah oleh karena kemiskinan bersifat multidimensional dan politis. Sudah banyak definisi tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh banyak ahli, mulai dari perbedaan antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan sosial, kemiskinan dari perspektif demografis, dan lain sebagainya, yang tidak saja mengacu pada keadaan minimnya tingkat pendapatan (daya beli), tetapi juga tingkat keterbatasan akses yang dimilikinya. Namun, pada umumnya kemiskinan digambarkan sebagai suatu keadaan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seseorang atau rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sen (2001) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya kondisi ketidakcukupan pendapatan tetapi juga ketidakberdayaan dalam berbagai aspek kehi-

dupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keterlibatan dalam interaksi sosial, dan sebagainya.

Agus E Nugroho (2011) menyatakan bahwa program-program anti kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari sejak zaman orde baru cenderung menekankan pada pendekatan transfer pendapatan, bukan pendekatan transfer sosial. Dalam studinya tentang kemiskinan transfer sosial tersebut dia mengajukan suatu pendekatan holistik (menyeluruh) dalam memotret fenomena kemiskinan, efektivitas program anti kemiskinan dan dampak dari program anti kemiskinan itu sendiri. Pendekatan holistik yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) dan sosiologis. Pendekatan ini secara spesifik mengaitkan variabel ekonomi dengan variabel-variabel sosial dan budaya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan ekonomi dilakukan untuk mengukur kapasitas riil pemerintah dalam mengoptimalkan program anti kemiskinan. Sedangkan pendekatan ekonomi kelembagaan digunakan untuk menganalisis bagaimana dinamika yang ada di dalam institusi publik berpengaruh terhadap efektivitas program anti kemiskinan. Sementara itu, suatu kombinasi dari pendekatan ekonomi dan sosiologis dilakukan untuk menganalisis keinginan dan kemampuan sosio-ekonomi masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja program anti kemiskinan.

Lebih jauh kemiskinan juga dibedakan antara kemiskinan perkotaan dan kemiskinan pada umumnya. Kemiskinan perkotaanlah yang seringkali dikaitkan dengan kondisi kemiskinan dari individu/rumahtangga di sektor/ekonomi informal. Perbedaan konsep tentang kemiskinan dan cara pengukuran kemiskinan itu sendiri akan menentukan sasaran dan cara penyelesaian atau strategi yang berbeda-beda. Pada bagian tulisan ini disajikan beberapa kutipan yang menunjukkan peran ekonomi informal dalam mengurangi kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jhotam Demba di Zimbabwe (1999) mempromosikan pentingnya dikembangkan sektor informal. Dia mengakui peranan sektor informal dalam mengurangi

kemiskinan di perkotaan karena mampu untuk menciptakan pekerjaan. Necdet Saglam (2007) dalam penelitian yang dilakukan di Turki bahkan sebaliknya menunjukkan bahwa sektor informal atau ekonomi informal memiliki dampak positif maupun negatif. Dengan mengacu pada kondisi sektor/ekonomi informal yang dicirikan oleh penawaran kerja yang memiliki kualitas rendah, tingkat pendapatan rendah, dengan kondisi pekerjaan yang buruk, maka dia menganggap bahwa sektor/ekonomi informal tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan bahkan justru menciptakan kemiskinan. Hal ini berimplikasi terhadap pentingnya penanganan sektor/ekonomi informal bila ingin mengurangi kemiskinan.

Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran ekonomi informal dalam mengurangi kemiskinan? Laporan ESCAP (2006) mengajukan strategi dua cabang, yaitu bantuan terhadap individu dalam kelompok marjinal, dan membantu usaha di sektor informal yang berpotensi untuk tumbuh menjadi sektor formal. Formalisasi dari sektor/ekonomi informal juga diajukan oleh Kapunda dan Mmolawa (2007) di Bostwana yang membuktikan bahwa sektor informal mampu mengurangi kemiskinan khususnya bagi perempuan dan pekerja muda dalam *self employment*. Oleh karena kedua kelompok tersebut umumnya memiliki keterbatasan dalam modal, pendapatan dan keterampilan. Untuk itu disarankan aktivitas pekerjaan dalam ekonomi informal tersebut diupayakan agar menjadi menjadi formal. Dengan cara ini diharapkan akan mampu memberikan *revenue* terhadap pemerintah. Ishegoma dan Kappel (2006) telah menganalisa beberapa kelemahan dari pendekatan formalisasi ekonomi informal.

Selanjutnya, ESCAP mengusulkan beberapa kebijakan, seperti, kebijakan ekonomi makro dengan memperhatikan dampaknya bagi kedua sektor formal maupun informal, bantuan kredit, pendidikan dan pelatihan ketrampilan, perbaikan infrastruktur fisik, memberikan proteksi sosial, perlindungan terhadap *harassment*, penciptaan kelompok atau asosiasi pekerja, menjembatani

hubungan dengan sektor formal, memperhatikan perempuan, kesadaran dan kesesuaian program, serta mempromosikan migrasi dan peningkatan sektor formal.

1.5. Ekonomi Informal dan Pekerjaan Layak

Anna Trebilcock (2005) memaparkan hasil konsensus dari *International Labour Conference* (ILC) di tahun 2002, selain menekankan bahwa keempat komponen *decent work* merupakan tulang punggung dari ekonomi informal, juga menjelaskan adanya penggantian istilah sektor informal menjadi ekonomi informal. Hal ini dilandasi oleh alasan bahwa aktivitas informal sangat beragam dan terjadi di banyak sektor ekonomi. Sedangkan ekonomi informal mengacu pada adanya semua aktivitas ekonomi yang dilakukan pekerja dan unit-unit ekonomi baik secara hukum maupun pelaksanaannya tidak tercakup dalam aturan formal atau tercakup secara kurang memadai. Aktivitas mereka tidak disertakan dalam hukum formal walaupun operasi mereka berada dalam jangkauan hukum formal. ...” *the law is not applied or not enforced; or the law discourages compliance because it is inappropriate, burdensome or imposes excessive costs*” (Trebilcock, 2005 hal: 4). Perubahan terminologi ini juga mempengaruhi perubahan konsep dari usaha dan hubungan kerja itu sendiri. Selanjutnya kesimpulan ILC membedakan aktivitas informal dari aktivitas kriminal dan aktivitas ilegal yang tentu saja tidak sesuai untuk diberikan aturan dan perlindungan di bawah hukum perburuhan atau komersial.

Walaupun yang terpenting dari pencapaian *decent work* adalah memberdayakan dan melindungi pekerja yang berada di ekonomi formal maupun informal, namun catatan yang diberikan dalam mempromosikan *decent work* pada ekonomi informal yaitu harus dilakukan dengan menghilangkan aspek negatif dari informalitas, dan dalam waktu yang bersamaan menjamin adanya kesempatan untuk kehidupan dan tidak merusak usaha, mempromosikan adanya perlindungan dan inkorporasi bagi para pekerja dan unit ekonomi dari ekonomi informal ke dalam *mainstream*

ekonomi. Dengan menyadari bahwa pekerjaan di ekonomi informal umumnya merupakan keadaan dari *decent work* yang defisit. Dari 30 indikator *decent work*, tujuh diantaranya telah dikembangkan dan menjadi ukuran dari keadaan *decent work* yang defisit. Termasuk di dalamnya adalah, upah per jam yang rendah, lamanya jam kerja baik karena alasan ekonomi maupun karena alasan yang sengaja dibuat, adanya pengangguran secara nasional, anak usia sekolah tidak dapat bersekolah, pengangguran pemuda, adanya jurang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam tingkat partisipasi angkatan kerja; tidak adanya pension bagi pekerja dengan usia lanjut.

Disimpulkan bahwa pengurangan defisit *decent work* pada ekonomi informal akan sejalan dengan pengurangan kemiskinan. Tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah menentukan apakah ada tumpang tindih antara *working poor* dan ekonomi informal. Ini mengingat bahwa tidak semua orang yang bekerja di informal ekonomi adalah miskin. Untuk itu, kebijakan yang dibutuhkan adalah menstimulasi *pro-poor promotion* dengan menyediakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Walaupun demikian, oleh karena yang dihadapi oleh informal ekonomi pada umumnya adalah resiko yang dimilikinya, karena rendahnya atau bahkan tidak adanya perlindungan sosial baik dari sang penyedia kerja maupun pemerintah, oleh karena itu yang paling dibutuhkan adalah memperbaiki dan memperluas perlindungan atau proteksi sosial bagi semua pekerja khususnya mereka yang berada di ekonomi informal.

Lim (2003) dikutip dari Trebilock, 2005 hal: 6-7) menyatakan bahwa untuk mengurangi *decent work* yang deficit dalam ekonomi informal, dengan meletakkan aspek gender dan pembangunan sebagai *cross cutting issue* terdapat lima area kebijakan yaitu: 1) Tata kelola, di sini meliputi aturan hukum, memungkinkan kerangka legislatif dan administrasi serta penguatannya, akses terhadap keadilan dan institusi pasar kerja yang efektif, pemerintah pusat dan daerah yang responsif, penghargaan terhadap hak (khusus-

nya hak asasi manusia dan hak milik); 2) Kebijakan makro, yaitu kebijakan ekonomi makro, kebijakan pembangunan dan sosial, koherensi kebijakan yang berkaitan dengan investasi, perdagangan, kesempatan kerja dan isu ketenaga kerjaan pada tingkat internasional, regional, dan nasional, kebijakan untuk keadilan, penciptaan kerja yang berkembang dan perlindungan sosial, kebijakan yang mendorong kewirausahaan, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya; representasi dan suara, yaitu jaminan dan pelaksanaan kebebasan berserikat, penguatan serikat pekerja dan organisasi pengusaha dan basis anggota lainnya, lembaga demokratis seperti koperasi, jalan dan metode perundingan, dialog sosial dan tindakan kolektif, membangun aliansi dan suara; 3) Produktivitas, perluasan pasar dan kesempatan kerja, merupakan kebijakan dan program untuk kerja layak dan produktif, akses terhadap pasar yang lebih baik, kredit, formasi/peningkatan/pengakuan ketrampilan, informasi mengenai tenaga kerja dan produk/melayani pasar, perbaikan kondisi kerja untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan kerja dan pendapatan yang lebih stabil; dan 4) Mengatasi kerentanan, yaitu memperbaiki kondisi kerja untuk melindungi kehidupan, proteksi sosial sebagai langkah-langkah anti kemiskinan, mencegah dan mengatasi HIV/AIDS dalam ekonomi informal, merespon terhadap kebutuhan tertentu dari perempuan, laki-laki dan anak-anak miskin dalam ekonomi informal, orang cacat, migran, anggota dari kelompok etnik dan remaja yang beresiko.

Martha Chen, Joann Vanek and Marilyn Carr (2004, dikutip dari Trebilcock 2005, hal: 7) juga telah menggunakan agenda pekerjaan layak dalam mengembangkan strategi untuk pekerjaan layak bagi pekerja informal berkaitan dengan gender dan penguangan kemiskinan. Mereka menyusun kembali elemen dalam hal: mempromosikan kesempatan kerja (yang berorientasi pertumbuhan, mendukung lingkungan, akses pasar dan daya saing, ketrampilan dan teknologi); mengamankan hak (bagi pekerja informal upahan dan wiraswata); mempromosikan perlindungan/

proteksi (terhadap kontinjensi umum dan perlindungan untuk pekerja migran), mempromosikan suara (mengorganisasikan pekerja informal, mempromosikan perundingan kolektif, membangun aliansi internasional).

Berlandaskan empat tujuan strategis dari *decent work* yaitu kesempatan kerja, hak pekerja, proteksi sosial, dan dialog sosial, maka secara fundamental agenda *decent work* merupakan program terapan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan, dengan memberikan tekanan pada pola dan langkah-langkah pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang mengacu pada penciptaan lapangan/kesempatan kerja, dengan lebih mempertimbangkan pada pemberian hak, proteksi sosial, dan dialog sosial. Dalam hal ini seringkali terjadi *over simplifikasi* dan acapkali menjadi kunci perdebatan dalam konsep *decent work*, yang dicirikan dalam pembedaan antara kuantitas dan kualitas kerja, di mana satu pilar yaitu tentang penciptaan lapangan/kesempatan kerja menggambarkan kuantitas, dan tiga pilar lainnya merepresentasikan kualitas. Padahal seharusnya keempat pilar tersebut saling berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga tidak dapat menafikan salah satunya.

1.6. Kemiskinan dan Pekerjaan Layak

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara sektor/ekonomi informal dengan kemiskinan, dan perlunya kedua keadaan tersebut dipromosikan menjadi pekerjaan layak. Namun demikian, dikatakan bahwa *decent work* bukanlah merupakan satu ukuran yang cocok bagi semua pendekatan, di mana masing-masing elemen memerlukan penekanan berbeda tergantung pada tantangan-tantangan khusus di masing-masing daerah, negara, sektor, dan tempat kerja. Seperti yang disarankan oleh ILO, bahwa yang paling penting dalam menganalisa situasi orang yang berada dalam ekonomi informal adalah memandang keberadaannya dalam kondisi *decent work* yang defisit. Hal ini digambarkan sebagai pekerjaan dengan kondisi buruk yang dicit-

rikan sebagai pekerjaan yang tidak produktif, tidak dibayar dan tidak diakui atau tidak dilindungi secara hukum, hak pekerja yang terbatas, proteksi sosial yang tidak memadai, dan terbatasnya representasi mereka umumnya ditemukan di ekonomi informal, khususnya pada tingkat bawah seperti perempuan dan pekerja muda belia.

Kontribusi utama dari agenda *decent work* terhadap pengurangan kemiskinan adalah pengakuan bahwa pengurangan kemiskinan harus ditujukan pada sifat peluang kesempatan kerja dan juga jumlah dari kesempatan kerja yang tersedia. Agenda *decent work* adalah mendukung pendekatan yang terintegrasi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan keempat pilar, yaitu bagaimana menciptakan kesempatan kerja bagi orang-orang miskin yang diikuti oleh hak mereka, representasi dan proteksi, dalam istilah yang konkrit yaitu mengembangkan strategi pembangunan yang berpijak pada kesempatan kerja, bersama dengan jaring pengaman sosial yang lengkap, transfer sosial dan reformasi institusi, hukum, dan pelaksanaannya (ILO 2007).

Bagi kebanyakan masyarakat miskin, bekerja adalah merupakan jalan utama untuk menghindari kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan dan juga tidak mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat miskin telah memiliki pekerjaan yang mendominasi ekonomi informal, dengan kondisi pekerjaan yang pada umumnya tidak aman, dan dengan tingkat pendapatan yang belum memadai. Maka dari itu, persoalan pengurangan kemiskinan tidak semata meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan, tetapi yang lebih penting adalah upaya perbaikan pekerjaan yang tersedia secara kuantitas dan kualitas dapat mengurangi kemiskinan. Bukti di beberapa Negara menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan GDP tidak menurunkan jumlah kesempatan kerja informal dan juga tidak mampu menyerap ting-

ginya pengangguran (Musiolek, 2002). Pengukuran kualitas pekerjaan sangat penting dalam upaya pengurangan kemiskinan, di mana kualitas pekerjaan umumnya diukur melalui tingkat pendapatan rata-rata. Oleh karena pekerjaan di sektor informal memiliki rata-rata tingkat upah yang rendah, maka sangat riskan untuk jatuh kepada kemiskinan. Fakta bahwa upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan juga di bawah upah hidup layak memberikan tekanan kepada kondisi hidup dan juga *decent work*.

Heinz Dan Vanek (2007) menyatakan bahwa pengukuran terhadap kualitas pekerjaan adalah sangat penting bagi pemahaman tentang penanganan kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa pekerjaan layak yang tentu saja sinonim dengan pekerjaan yang berkualitas merupakan cara yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, penulis tersebut kemudian menyatakan bahwa pendapatan rata-rata seringkali dipakai untuk menyatakan kualitas pekerjaan, yaitu pendapatan rata-rata yang dilaporkan oleh responden. Pendapatan dari sektor formal cenderung lebih tinggi dibanding ekonomi informal. Namun demikian, pendapatan pemberi kerja di ekonomi informal seringkali jauh lebih tinggi daripada *private wage workers* di sektor formal.

Oleh karena itu, ketika mengkaitkan ekonomi informal dengan kemiskinan, tidak bisa menyamaratakan seluruh pekerja informal. Pendekatan yang lebih tepat adalah dengan memusatkan perhatian terhadap pekerja di sektor informal yang termasuk dalam kelompok *working poor*. Seseorang dapat dikelompokkan sebagai *working poor* apabila yang bersangkutan bekerja dan tingkat kehidupan rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ke dua dalam pengukuran kemiskinan adalah mengukur pendapatan rumah tangga yang mungkin diperolehnya dari sumber pendapatan yang berbeda-beda.

Outcome dari pengurangan kemiskinan pada ekonomi informal dapat diperkuat dengan misalnya mempertimbangkan bagaimana menjamin bahwa menciptakan pekerjaan sejalan dengan

memperbaiki akses terhadap proteksi sosial atau mekanisme keterwakilan. Akses terhadap proteksi sosial sangat penting diberikan pada pekerjaan informal yang dicirikan dengan tingginya tingkat ketidakamanan pendapatan. Selama ini program proteksi sosial kebanyakan dipusatkan pada orang atau rumah tangga miskin yang tidak atau tidak dapat bekerja (pemberian *cash transfer*) atau pada pekerja di formal sektor (seperti asuransi sosial). Dengan akses yang lebih baik terhadap mekanisme proteksi sosial akan dapat membantu pekerja di ekonomi informal dari kehilangan mata pencaharian. Cakupan kebijakan proteksi sosial dapat didefinisikan sebagai kebijakan untuk menangani resiko, kemiskinan dan kerentanan.

Pekerjaan layak merupakan konsep yang luas dan mencakup banyak komponen dengan berbagai indikator pengukuran yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan di masa kini. Konsep pekerjaan layak ditetapkan oleh ILO dan disahkan oleh masyarakat dunia sebagai bagian dari pencapaian pekerjaan produktif untuk setiap individu laki-laki maupun perempuan dalam kondisi bebas, adil, aman dan bermartabat. Pekerjaan layak mencakup peluang kerja yang produktif dan menghasilkan upah yang adil, memberi keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk pekerja dan keluarganya, menawarkan prospek pengembangan diri dan mendorong adanya integrasi sosial, memberi kebebasan kepada individu dan masyarakat untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya, serta menjamin adanya kesempatan yang adil bagi semua orang (ILO, 2010: 2).

Konsep pekerjaan layak merupakan upaya untuk melihat berbagai dimensi terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan dalam satu *framework* yang saling terkait. Pemecahan masalah seperti kesempatan kerja, pengupahan, hak pekerja, kondisi kerja, jaminan sosial dan kebebasan berserikat tidak bisa dilakukan melalui intervensi kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi dilihat sebagai satu kerangka kebijakan yang tidak terpisahkan. Hal tersebut

merupakan titik balik perbaikan pada masa sebelumnya, di mana berbagai isu tersebut seringkali dilihat dan mendapat intervensi yang berbeda khususnya oleh pengambil keputusan di setiap negara.

Konsep pekerjaan layak juga terkait erat dengan strategi pengurangan kemiskinan yang kini telah menjadi perhatian global. Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan indikasi semakin banyaknya pekerja yang terlibat pekerjaan yang dikategorikan “tidak layak”. Dalam Konferensi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2004 dinyatakan bahwa solusi terhadap pengurangan kemiskinan tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan, pengobatan dan perumahan, tetapi juga pada penciptaan pekerjaan yang lebih baik (layak dan produktif). Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan perbaikan dalam penciptaan kesempatan kerja ditengarai tidak membawa dampak positif dan berkesinambungan terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam hal ini, setiap kebijakan pembangunan diharapkan mempunyai keseimbangan antara kepentingan pasar dan kebutuhan penduduk yang sedang bekerja, kelompok rentan, anak-anak dan lanjut usia. Oleh karena itu pencapaian pekerjaan layak dalam strategi pembangunan merupakan hal sangat penting, baik dalam konteks sebagai bagian dari alat kebijakan maupun penentu keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Pencapaian pekerjaan layak merupakan esensi dasar sebagai hak setiap manusia dan sekaligus menggambarkan capaian kualitas kehidupan seseorang. Pencapaian pekerjaan yang layak sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan setiap individu atau masyarakat karena dapat mendukung peningkatan kemampuan ekonomi dan sosial yang lebih luas, bebas, adil, aman dan bermartabat. Tidak dapat dipungkiri bahwa melakukan pekerjaan merupakan bagian terpenting bagi setiap individu dalam artian curahan waktu, pikiran, dan aktivitas keseharian dalam siklus hidup seseorang. Bahkan melakukan pekerjaan telah menjadi simbol pen-

capaian martabat pribadi, kenyamanan dalam hidup bermasyarakat dan jaminan stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu pencapaian pekerjaan layak dan produktif menjadi bagian terpenting dalam setiap proses pembangunan di banyak negara, khususnya di negara berkembang di mana ketersediaan pekerjaan yang layak dan produktif masih terbatas.

1.7. Penutup

Decent work merupakan konsep yang bersifat universal namun pengukurannya dapat disesuaikan dengan karakteristik pencapaian pembangunan di masing-masing negara. Konsep *decent work* meletakkan pondasi dasar pengakuan hak setiap individu maupun kelompok sosial yang pemenuhannya dapat mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkesinambungan.

Di antara berbagai permasalahan terkait aplikasi pekerjaan layak adalah ketersediaan data sebagai alat pengukuran, penentuan indikator yang lebih sensitif, dan upaya pencapaian dari berbagai indikator yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian pekerjaan layak juga sangat ditentukan oleh latar belakang sejarah, *political will* penentu kebijakan, dan tingkat kemapanan ekonomi. Semakin baik kondisi ketiga hal tersebut kemungkinan pencapaian pekerjaan layak bukan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu adalah tugas semua pihak untuk mempromosikan pencapaian pekerjaan layak sebagai bagian dari upaya pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok tertentu yang sangat rentan terhadap pengabaian pemenuhan hak pekerjaan layak.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United National Development Goals, 2008. "*Millennium Development Goals*", Dokumen MDGs Bappenas dan UNDP
- Badan Pusat Statistik, 2010. "*Data Strategis BPS*." Jakarta: Katalog BPS

- Basri, Faisal dan Munadar, Haris. 2009. "*Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia.*" Jakarta: Penerbit Kencana.
- Bell, Stuart and Newitt, Kirsten. 2010. "*Decent work and poverty eradication: literature review and two-country study. A study for the Decent work and Labour Standards Forum.*" www.ergononline.net
- Bell, S dan Gibbons, S. (2007). *Background paper for DFID Labour Standards and Poverty Reduction Forum.* www.ergononline.net
- Charmes, J. (2000) "*Informal Sector, Poverty and Gender: A Review of Empirical Evidence. Background paper for the World Development Report 2001.*
- Demba, J. (1999). *Informal Sector Developments: A Strategy for Alleviating Urban Poverty in Zimbabwe.* Journal of Social Development in Africa. 14, 2, 5-9
- ESCAP. (2006). *Poverty and the Informal Sector (Item 4 of the provisional agenda): Role of the Informal Sector in Poverty Reduction.*http://www.unescap.org/pdd/CPR/CPR2006/English/CPR3_1E.pdf
- Erfani, Sairi.dkk, 2004. "*Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi.*" Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Jakarta
- Erfani, Sairi.dkk, 2004. "*Perkembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi.*" Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Jakarta.
- Evers, Hans-Dieter, 1994. "*Produksi, Subsistensi dan Massa Apung Jakarta.*" Dalam Koentjaraningrat (penyunting): *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan.* Jakarta. LP3ES, 1984.
- Ghai, Dharam, 2003. "*Decent work: Concept and Indicators.*" International Labour Review, , Vol. 142 (2003), No. 2. International Labour Organization (ILO), 2003.

- Ghai, Dharam, 2002. *"Decent work: Concepts, Models and Indicators."* Discussion Paper, International Institute for Labour Studies, Geneva, 2002.
- Handayani, Titik. 2008. *"Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia: Sebuah Catatan Kritis"*. Masyarakat Indonesia. Jilid XXXIV, No.2, 2008. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Heintz, J dan Vanek, J. (2007). *Employment, the Informal Sector, and Poverty: Data and Analytical Challenges*.
- International Labour Organization (ILO), 1999. *"Decent work."* Report of the Director-General, ILC, 87th Session, June 1999.
- International Labour Organization (ILO), 2007. *"The Informal Economy: Enabling Transition to Formalization."* Working Paper, ILO: 2008.
- International Labour Organization (ILO), 2008. *"Measurement of Decent work."* Discussion paper for the Tripartite Meeting of Experts on the Measurement of Decent work. ILO Geneva: October 2008
- Ishengoma, E.K dan Kappel, R. (2006). *Economic Growth and Poverty: Does Formalisation of Informal Enterprises Matter?* GIGA Research Program: Transformation in the Process of Globalization.
- Kapunda, SM dan Mmolawa, B.D. (Tanpa Tahun). *The Role of Informal Sector and Self-Employment in Poverty Alleviation in Botswana*. www.bidpa.bw/documents/informalsectorrole.pdf
- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2010. *"Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014"*. Jakarta: 2010
- Musirolek, B. (2002). *Decent work in the Informal Sector*. <http://www.cleanclothes.org/campaigns-list/818-decent-work-in-the-informal-sector>
- Nagib, L. dkk.2010. *"Pemetaan Pekerjaan Pada Penduduk di Kawasan Miskin Perkotaan di Kota Bandung."* Laporan Penelitian, PPK LIPI:2010 (akan terbit).

- Nawawi,dkk. 2004. "*Kutai Kartanegara dalam Era Otonomi Daerah: Kebijakan Ketenagakerjaan.*" Seri Penelitian PPK LIPI No.52/2004.
- Richard Anker et al, 2002. "*Measuring Decent work with Statistical.*" Working Paper No.2 October 2002. Policy Integration Department Statistical Development and Analysis Group, International Labour Office, Geneva: 2002
- Sastry N.S (2006). "*Measuring the Links between poverty and Informal Employment*" Expert Group on Informal Sector Statistics (Delhi Group). 11th & 12th May 2006. New Delhi Indias
- Saglam, N. (Tanpa Tahun). "The Informal Economic Sector and Poverty in the Mediteranian Countries and Turkey". www.um.edu.my/edrc/books/CD_CSP4/pdf/
- Sumodiningrat, 2007. "*Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia.*" Penerbit Kompas-Gramedia. Jakarta
- Squire, Lyn. 1992. "*Employment Policy in Development Countries*". World Bank Publikation Series.
- Trebilcock, A. (2005). *Decent work and the Informal Economy.* Discussion Paper No. 2005/04. Expert Group on Development Issues
- United Nations, 2005. "*World Summit Outcome.*" Resolution adopted at the 60th Session of the General Assembly, New York, 2005 (A/RES/60/1, para. 47).
- United Nations, 2007. "*Report of the Economic and Social Council for the 2007.*" Ministerial Declaration of the High-level Segment, adopted at the 62nd Session of the General Assembly, New York,10 July 2007 (A/62/3).
- Widiarti, Diah, 2007. "*Kajian tentang Indikator Kerja yang Layak di Indonesia.*" Laporan Penelitian, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Desember 2007.

BAB II

DINAMIKA EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN DAERAH PERKOTAAN: Kasus Kota Surakarta dan Tangerang

Oleh: Dewi Harfina

2.1. Pendahuluan

Pembangunan berbasis ketenagakerjaan tidak dapat disederhanakan menjadi sekedar capaian pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari sarana utama pembangunan manusia untuk dapat berlangsung secara berkesinambungan. Keduanya tidak ada hubungan otomatis tetapi melalui berbagai jalur, seperti ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif akan mentransformasikan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia terhadap penciptaan lapangan kerja. Terciptanya lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kualitas sumber daya manusia. Secara singkat, pertumbuhan tidak secara otomatis mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu modal bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan faktor

terpenting karena manusia yang menggerakkan semua sarana produksi. Meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya mengakibatkan bertambahnya kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan, tetapi juga perluasan kesempatan kerja. Penduduk sebagai sumber dari persediaan tenaga kerja akan menimbulkan suatu masalah bila tidak seimbang dengan kemampuan sektor ekonomi, seperti pengangguran maupun setengah pengangguran.

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia dilakukan guna mengurangi jumlah penduduk miskin. Kebijakan tersebut merupakan strategi pemerintah Indonesia agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga bisa dinikmati oleh penduduk miskin (*Pro-Poor, Pro-Job dan Pro-Growth*). Dalam implementasinya, strategi pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak kepada penduduk miskin melalui penyerapan tenaga kerja diiringi program dan kebijakan mengurangi ketidakmerataan serta memfasilitasi pendapatan dan generasi pekerja yang diperuntukkan bagi penduduk miskin. Dalam pandangan *Pro-Poor, Pro-Job dan Pro-Growth*, penduduk miskin seharusnya memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan ikut serta dalam proses ekonomi. Dalam hal ini, Kraay (2006) menemukan bahwa tingginya laju pertumbuhan rata-rata pendapatan dan pola pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan sangat relevan untuk menjelaskan tentang perubahan kemiskinan suatu wilayah.

Berdasarkan berbagai hasil studi empirik, hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja terlihat dari angka elastisitas tenaga kerja. Islam dan Nazara (2000) menemukan bahwa di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja baru yang mencapai 2 juta orang tiap tahunnya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3,47 sampai dengan 4,68 persen. Sektor perdagangan dan jasa merupakan dua sektor dengan angka elastisitas lebih dari satu, selain sektor pertanian. Sedangkan sektor industri memiliki angka elastisitas kurang dari satu. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya relokasi tenaga

kerja antar sektor ekonomi. Di sisi lain, Islam (2004) menyatakan perlunya mengidentifikasi elemen pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak kepada penduduk miskin untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja diiringi dengan peningkatan tingkat produktivitas.

Bagian kedua dari buku ini menguraikan dinamika perekonomian dan ketenagakerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang. Secara rinci, pembahasan pada bagian ini meliputi capaian ekonomi, kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan. Selain itu juga diulas pelaksanaan program dan kebijakan di kedua daerah tersebut terkait pengurangan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Potret kedua wilayah ini diperlukan sebagai gambaran dinamika yang mendukung kajian pekerjaan layak dan pengurangan kemiskinan di ekonomi informal perkotaan.

2.2. Kota Surakarta: Dimensi Ekonomi, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan

Kota Surakarta, atau lebih dikenal dengan Kota Solo, merupakan daerah perkotaan di Indonesia yang terus berkembang dengan berbagai prestasi yang mengesankan. Beragam atribut, seperti kota budaya, pariwisata, jasa, pelajar dan olah raga, melekat pada kota ini yang terus gencar berpromosi dengan berbagai slogan *Solo the Spirit of Java*, *Solo City of Batik*, dan *Solo City of Charm*. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian Selatan, kota Surakarta memiliki potensi ekonomi cukup menjanjikan, terutama di sektor industri, perdagangan, pariwisata dan jasa (Bappeda Kota Surakarta, 2009). Kota Surakarta juga berperan sebagai *hinterland area* beberapa daerah di sekitarnya, yang dikenal dengan istilah Kawasan Solo Raya atau Kawasan Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

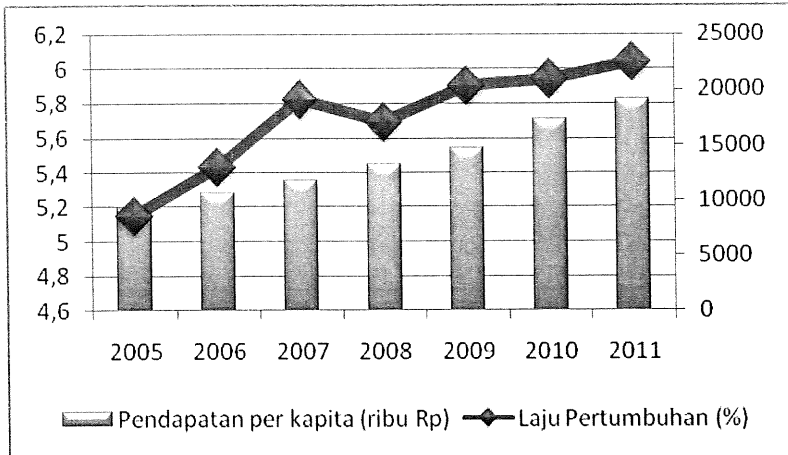
Di balik peran strategis tersebut, dinamika pembangunan di kota Surakarta ternyata tidak terlepas dari berbagai masalah sosial ekonomi, termasuk kemiskinan. Ketidakseimbangan antara

pertumbuhan jumlah penduduk dengan akselerasi daya dukung kota dalam mengantisipasi ketersediaan lapangan kerja, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masyarakat, berdampak terhadap tidak terpenuhinya secara optimal kebutuhan dasar penduduk. Pada akhirnya, sebagian penduduk harus hidup dalam kemiskinan yang memerlukan penanganan secara komprehensif, terutama dari pemerintah daerah setempat.

a. Capaian Ekonomi

Pada bagian sebelumnya telah disinggung bahwa kota Surakarta merupakan satu dari sedikit wilayah perkotaan di Indonesia yang berhasil menata pembangunan ekonominya. Hal tersebut didukung dari capaian laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita kota Surakarta yang menunjukkan tren meningkat. Selama periode 2005-2009, laju pertumbuhan ekonomi kota Surakarta cukup baik, meskipun sempat menurun pada tahun 2008 dibanding tahun 2007 (lihat gambar 2.1). Bahkan, pertumbuhan ekonomi kota Surakarta pada tahun 2009 (5,9 persen) lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah (4,8 persen) dan Indonesia (4,5 persen). Capaian tersebut menunjukkan giatnya aktivitas perekonomian Surakarta, baik di tingkat regional maupun nasional.

Gambar 2.1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Per Kapita Kota Surakarta, 2005 - 2010



Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2009; BPS Kota Surakarta, 2011d.

Pada periode yang sama pendapatan perkapita penduduk kota Surakarta meningkat dari Rp 9.223.741,60 (tahun 2005) menjadi Rp 14.693.189,39 (tahun 2009). Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh kenaikan pendapatan riil penduduk. Kondisi ini berdampak pada semakin membaiknya taraf kehidupan masyarakat kota Surakarta.

Dilihat dari indikator PDRB, struktur perekonomian kota Surakarta didominasi oleh dua sektor unggulan yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Kedua sektor tersebut berkontribusi mencapai 50 persen dari total PDRB kota Surakarta pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan peningkatan yang signifikan, yaitu 23,82 persen pada tahun 2005 menjadi 25,75 persen pada tahun 2009. Maka tidak mengherankan jika ekonomi kerakyatan yang didukung

oleh usaha jasa perdagangan di daerah ini mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal tersebut didukung oleh adanya upaya perbaikan sarana perdagangan, seperti pasar tradisional, pusat grosir, *shopping mall* dan kegiatan ekonomi lainnya yang terkait jasa perdagangan.

Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan di kota Surakarta juga tidak terlepas dari tingginya komitmen pemerintah daerah setempat dalam menata dan merevitalisasi pasar tradisional, selain juga membatasi jumlah dan keberadaan pasar swalayan modern. Tampak bahwa pemerintah daerah setempat begitu paham arti penting pasar tradisional sebagai bagian dari karakteristik ekonomi kerakyatan yang harus dipertahankan di kota Surakarta. Bahkan keberadaan pasar tradisional telah menjadi bagian dari atraksi pariwisata budaya yang cukup berhasil menarik pengunjung dari luar kota Surakarta.

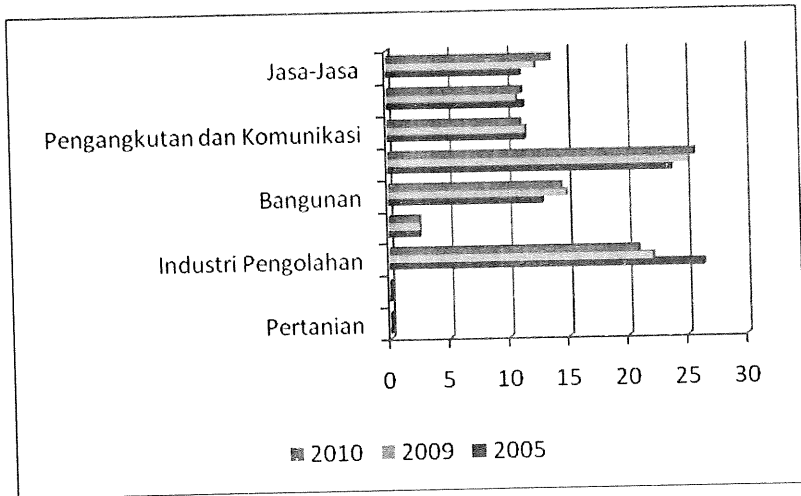
Berdasarkan data Kota Surakarta dalam angka tahun 2010, di kota Surakarta terdapat 37 pasar tradisional dengan tiga di antaranya dibangun pada tahun 2010, yaitu pasar Notoharjo, pasar Panggung Rejo dan pasar Panjang Sawit. Khusus untuk pasar Notoharjo, pembangunan pasar tersebut terkait program penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Tugu Monumen Pahlawan Kota Surakarta. Proses pemindahan PKL sangat fenomenal karena melalui negosiasi damai yang cukup panjang dan dilakukan secara serentak diiringi kirab budaya, serta seiring dengan penutupan tempat lokalisasi "Silir" di sekitar lokasi yang kemudian dijadikan tempat berdirinya Pasar Notoharjo.

Selain sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, sektor pembangunan lainnya yang memiliki peran penting dalam perekonomian kota Surakarta adalah industri pengolahan. Walaupun mengalami penurunan kontribusi dari 26,42 pada tahun 2005 menjadi 20,94 persen pada tahun 2010. Kondisi ini dapat dipahami karena secara nasional kontribusi sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan sebagai dampak lesunya perekonomian regional.

Berdasarkan data tahun 2010, jumlah industri kecil di kota Surakarta mencapai 6.189 unit dengan 75 persen di antaranya adalah industri kecil non formal (BPS Kota Surakarta, 2012a). Dari jumlah tersebut, industri kecil merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai lebih dari 40 ribu tenaga kerja. Sedangkan industri besar walaupun jumlahnya relatif sedikit yaitu 59 unit, tetapi mampu menyerap 9 ribu tenaga kerja. Hal ini dapat dipahami karena mayoritas industri skala besar di kota Surakarta bersifat padat karya. Dilihat dari jenis outputnya, industri batik, tekstil, pakaian jadi, serta industri makanan merupakan tiga jenis industri yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di kota Surakarta salah satunya tidak terlepas dari implementasi kebijakan Kota Surakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta 2010 - 2012. Tiga arah dan kebijakan pembangunan Kota Surakarta adalah: (1) Pengembangan sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk industri, UMKM dan Koperasi, (2) Revitalisasi pasar tradisional, serta (3) Penempatan PKL sebagai aset kota, sehingga PKL memiliki tempat usaha yang tertib, bersih dan berstatus hukum (legal).

Gambar. 2.2.
PDRB Kota Surakarta Menurut Sektor Ekonomi,
Tahun 2005, 2009 dan 2010



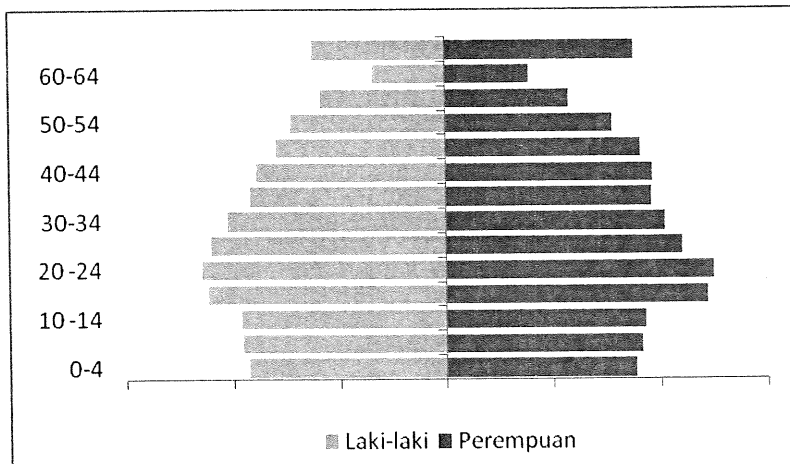
Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2009; BPS Kota Surakarta, 2011d.

b. Aspek Kependudukan

Sebagai sebuah wilayah perkotaan yang terus berkembang, kota Surakarta juga telah menjadi bagian dari tujuan pencari kerja, khususnya angkatan kerja yang berasal dari provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk di kota Surakarta dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 500.642 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki (243.363 jiwa) lebih sedikit dari pada perempuan (257.279 jiwa) dengan *sex ratio* penduduk sebesar 94,28. Artinya pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Sementara laju pertumbuhan penduduk kota Surakarta selama tahun 2000-2010 relatif kecil yaitu mencapai 0,25 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46 persen pada periode yang sama.

Laju pertumbuhan penduduk pada dua kecamatan bahkan minus, yaitu kecamatan Lawean (-0, 21 persen) dan Serengan (-0,57 persen). Rendahnya pertumbuhan penduduk tersebut diduga akibat relatif rendahnya tingkat kelahiran penduduk. Angka kelahiran kasar di kota Surakarta mengalami penurunan dari 12,52 per seribu kelahiran pada tahun 2000 menjadi 12,36 per seribu kelahiran pada tahun 2005. Sementara angka kematian kasar mengalami peningkatan dari 6,84 per seribu penduduk menjadi 7,43 per seribu penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh antara lain karena ketersediaan dan akses fasilitas kesehatan yang semakin baik dan terjangkau oleh masyarakat (Arivani, 2008).

Gambar 2.3.
Piramida Penduduk Kota Surakarta Tahun 2010

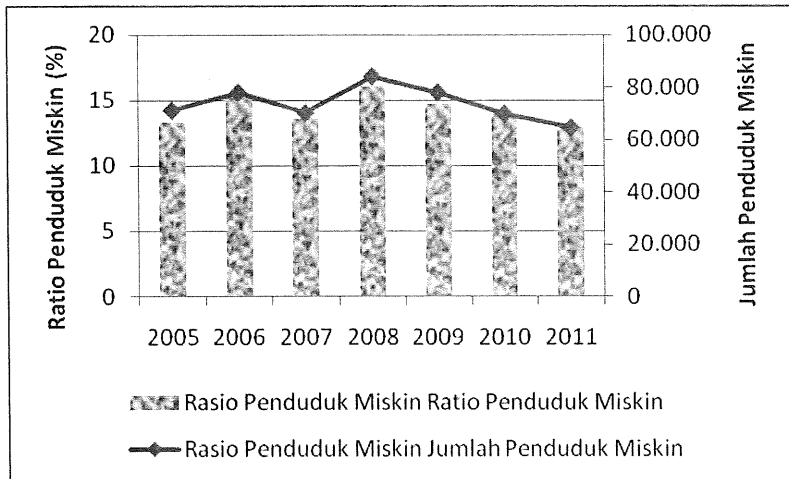


Sumber: BPS Kota Surakarta, 2011.

Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin, penduduk kota Surakarta dapat digolongkan sebagai penduduk usia muda dan produktif. Berdasarkan data tahun 2009, lebih dari dua per tiga (70 persen) penduduk Surakarta adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Proporsi penduduk terbesar adalah penduduk berusia 20-24 tahun yang mencapai 11 persen (Lihat Gambar 2.3).

Sebagai wilayah perkotaan yang padat penduduk, kota Surakarta juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial. Misalnya masalah kriminalitas yang menjadi ciri khas kawasan pemukiman padat. Salah satunya di kelurahan Semanggi, kecamatan Pasar Kliwon yang merupakan kawasan pemukiman terpadat di kota Surakarta. Maka tidak mengherankan jika kelurahan Semanggi dikenal sebagai “kampung ruwet”. Keberadaan kompleks lokalisasi ‘Silir’ yang dulu pernah ada di wilayah ini dapat diduga berdampak terhadap semakin lengkap berbagai permasalahan sosial di daerah ini. Namun demikian permasalahan tersebut diperkirakan akan semakin berkurang sebagai dampak dari kebijakan pemerintah kota Surakarta yang menutup kompleks lokalisasi ‘silir’ dan menggantinya dengan Pasar Tradisional Notoharjo.

Gambar 2.4.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Surakarta
Tahun 2005-2011



Sumber : BPS Kota Surakarta, 2010; BPS Kota Surakarta, 2012c.

Selama tahun 2005 – 2011 jumlah penduduk kota Surakarta yang masuk kategori miskin cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan penduduk kota Surakarta sebesar 13,3

persen, mengalami sedikit penurunan 12,9 persen (tahun 2011). Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 16,1 persen yang mengalami peningkatan sebanyak 2 digit dari tahun 2007. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak pada akhir 2007 berimplikasi terhadap semakin meningkatnya tingkat kemiskinan di kota Surakarta. (Bappeda Kota Surakarta, 2009). Namun demikian, jika dibanding wilayah kawasan Subosukawnomosraten, tingkat kemiskinan di Kota Surakarta relatif paling rendah (tahun 2011).

Salah satu daerah kantong kemiskinan di Kota Surakarta terletak di Kelurahan Semanggi. Daerah ini dikenal sebagai “kawasan merah” akibat sejarahnya yang melekat dengan berbagai permasalahan sosial cukup menonjol di Kota Surakarta. Kondisi tersebut menjadikan wilayah kelurahan Semanggi termasuk dalam prioritas program pemerintah kota Surakarta dalam pengentasan kemiskinan. Secara kasat mata, kondisi kemiskinan di wilayah tersebut dapat dilihat dari padatnya pemukiman dan lingkungan yang relatif “ruwet”, yaitu kondisi perumahan yang kumuh, rapat, dan sempit dengan sanitasi yang sangat terbatas.² Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan semanggi sebagai kantong kemiskinan demografis, lingkungan sosial dan ekonomi. Selain Kelurahan Semanggi, beberapa kelurahan di kota Surakarta dengan jumlah penduduk miskin lainnya yang relatif besar adalah Gandekan, Sangkrah (Kecamatan Pasar Kliwon), Pajang (Kecamatan Lawean), Danukusuman dan Joyotakan di kecamatan Serengan.

c. Dinamika Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di kota Surakarta dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun

² <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/07/29/92284/Enam-Kelurahan-Masuk-Kategori-Merah>

ke atas) di kota Surakarta mengalami peningkatan. Selama kurun waktu lima tahun, penduduk usia kerja meningkat dari sebanyak 412.056 jiwa pada tahun 2005 menjadi 409.623 jiwa pada tahun 2010. Peningkatan penduduk usia kerja, diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 241.192 jiwa pada tahun 2005 menjadi 281.146 jiwa pada tahun 2010. Sementara itu jumlah bukan angkatan kerja menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebanyak 170.864 jiwa (tahun 2005) menjadi 128.477 jiwa (tahun 2010).

Tabel 2.1.
Perkembangan Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Penduduk Usia Kerja di Kota Surakarta, 2005 dan 2009

Keterangan	2005	2009	2010
Angkatan Kerja	241.192	279.159	281.146
Bekerja	214.996	254.238	258.573
Mencari Kerja	26.196	24.921	22.573
Bukan Angkatan Kerja	170.864	141.664	128.477
Penduduk Usia Kerja	412.056	420.823	409.623
TPAK	58,53	66,34	68,63
Tingkat Pengangguran	10,86	8,9	8,0
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	89,14	91,07	91,97

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2009 dan 2010

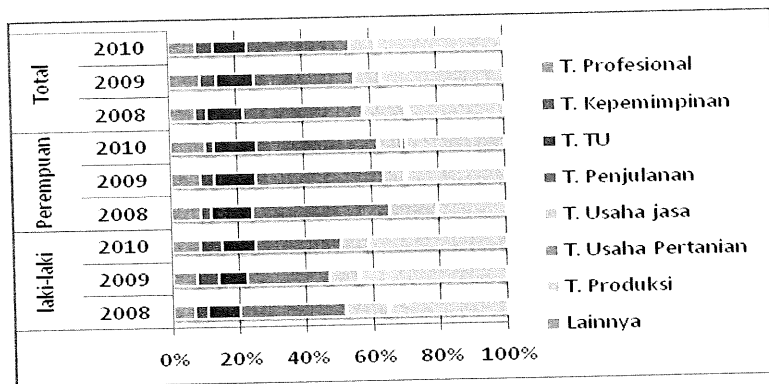
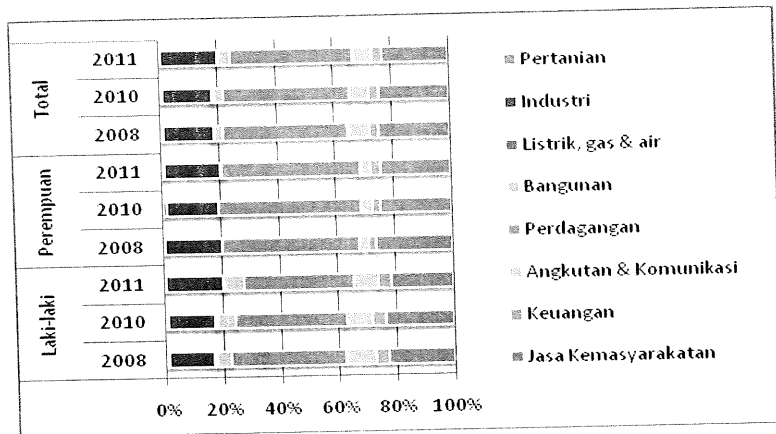
Besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk pasar kerja dapat diketahui dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja (penduduk bekerja dan mencari kerja) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah. TPAK- kota Surakarta dalam kurun waktu lima tahun juga menunjukkan kecenderungan meningkat,

yaitu dari sebanyak 58,53persen (tahun 2005) menjadi 68,63persen (tahun 2010). Selama kurun waktu tahun 2005-2010 terjadi peningkatan angkatan kerja sebanyak hampir 39 ribu orang, yang menunjukkan semakin banyak penduduk kota Surakarta masuk pasar kerja maupun mencari kerja.

Kesempatan kerja yang tersedia di pasar kerja jumlahnya terbatas sehingga tidak semua angkatan kerja dapat terserap di pasar kerja. Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2010 tahun penduduk kota Surakarta yang bekerja mengalami penurunan dengan laju rata-rata per tahun mencapai 5,46 persen. Akan tetapi, kondisi sebaliknya terjadi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang cenderung mengalami peningkatan dari 89,14 (2005) menjadi 91,97 (2010). Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan kesempatan kerja dalam menyerap tenaga kerja di kota Surakarta. Hal ini seiring dengan penurunan jumlah pencari kerja atau angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja. Keadaan tersebut juga tercermin dari penurunan tingkat pengangguran sebesar 2 persen selama kurun waktu lima tahun (tahun 2005 - tahun 2010).

Daya serap pasar kerja di kota Surakarta mengalami peningkatan seiring dengan upaya penciptaan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Pembangunan perekonomian di berbagai sektor ekonomi mampu menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk kota Surakarta, di sektor formal maupun informal. Penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri pengolahan. Pada sektor dominan ini, tenaga kerja umumnya bekerja sebagai tenaga produksi/operator dan tenaga penjualan. Mayoritas tenaga kerja perempuan bekerja sebagai tenaga penjualan, sedangkan laki-laki sebagai tenaga produksi atau operator.

Gambar 2.5
Distribusi Penduduk yang bekerja menurut Lapangan, Jenis Pekerjaan Utama, dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta, 2008, 2009, dan 2010



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008, 2009 dan 2010 diolah Pusdatinaker

Berkembangnya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan terkait pula dengan revitalisasi dan penataan pasar tradisional di Kota Surakarta. Kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Surakarta tidak hanya terjadi di pasar-pasar permanen (modern), namun pemerintah Kota Surakarta juga memfasilitasi ber-

bagai kegiatan pedagang informal di lokasi dan waktu tertentu. Misalnya pasar Minggu pagi di sekitar stadion Manahan Solo dan pasar Sabtu malam di alun-alun kota Surakarta. Penataan kegiatan ekonomi informal dalam perekonomian kota Surakarta berimplikasi terhadap munculnya berbagai aktivitas perdagangan sektor informal yang semakin tertib dan tertata.

Salah satu hal menarik yang menjadi karakteristik ekonomi informal di kota Surakarta adalah dominasi kaum perempuan, baik sebagai pedagang di pasar tradisional maupun pedagang kaki lima. Besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan tidak terlepas dari budaya penduduk lansia (lanjut usia) yang tetap bekerja. Banyak dari para pekerja kaum perempuan tersebut berusia lanjut yang bekerja di sektor ekonomi informal seperti pedagang, pekerja maklon ikat kain, dan membuat kok badminton. Maka tidak mengherankan jika banyak orang yang menyebutkan kota Solo sebagai kota yang tidak pernah tidur akibat beragamnya aktivitas ekonomi yang terus berganti siang dan malam. Sementara itu, kebijakan pemerintah kota Surakarta mengembangkan *Solo Techno Park* dinilai banyak pihak sangat tepat karena dapat memfasilitasi dan menghasilkan wirausahawan baru yang kreatif dan inovatif yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di kota Surakarta.

2.3. Kota Tangerang: Dimensi Ekonomi, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan

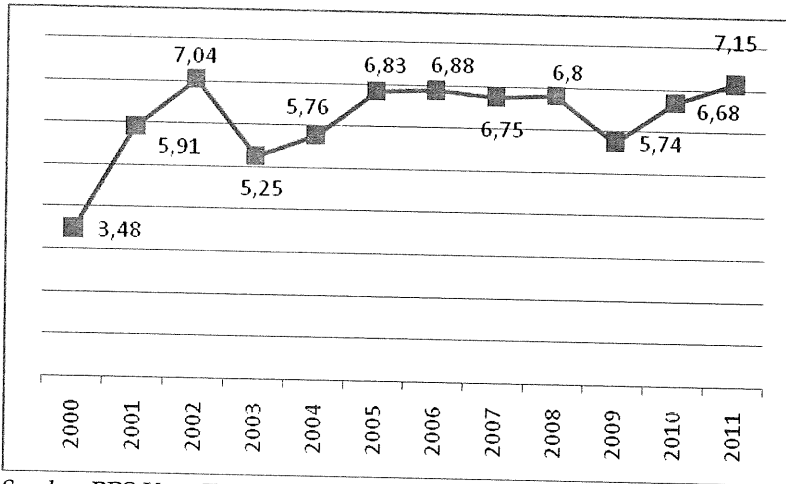
Kota Tangerang merupakan wilayah perkotaan di provinsi Banten yang memiliki fungsi sebagai *hinterland area*, khususnya bagi DKI Jakarta. Peran strategis tersebut diperkuat dengan Instruksi Presiden RI No.13/1976 tentang penetapan wilayah kota Tangerang sebagai daerah penyangga ibukota negara. Maka tidak mengherankan apabila dengan kemajuan di berbagai sektor pembangunan, terutama di bidang jasa dan industri pengolahan, kota Tangerang telah lama menjadi tujuan migrasi pencari kerja, baik dari Provinsi Banten, maupun dari berbagai daerah di Indonesia.

Kota Tangerang merupakan salah satu kota satelit metropolitan Jakarta, sehingga menjadikan kota Tangerang memiliki jaringan transportasi terpadu yang menghubungkan wilayah-wilayah Jabodetabek. Keberadaan Bandara Soekarno Hatta di kota Tangerang memudahkan aksesibilitas dan konentivitas dengan pihak luar baik secara nasional dan internasional. Berkembangan kota Tangerang seiring dengan pembangunan Kota Metropolitan yang berimbas dengan berdirinya berbagai pusat perbelanjaan dan pemukiman baru di wilayah kota Tangerang. Pembangunan tersebut menyebabkan kota Tangerang semakin padat dalam pemanfaatan lahan. Kedudukan geostrategi kota Tangerang tersebut telah mendorong tumbuhkembangnya berbagai aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian kota Tangerang saat ini.

a. Capaian Ekonomi

Selama periode 2000-2011 laju pertumbuhan ekonomi kota Tangerang memperlihatkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi tahun 2002 yaitu 7,04 persen. Diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi di kota Tangerang dari tahun 2009 sampai dengan 2013 akan mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun mencapai 6 persen (Bappeda Kota Tangerang, 2009). Perubahan kondisi perekonomian kota Tangerang tidak terlepas dari faktor kestabilan ekonomi makro nasional dan provinsi, serta faktor internal yakni adanya peningkatan aktivitas perekonomian sektoral. Selain itu, adanya pemekaran kota Tangerang menjadi dua wilayah, yaitu kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, juga memiliki pengaruh kuat terhadap capaian pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Gambar 2.6.
Persentase Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota
Tangerang, 2000 -2011.

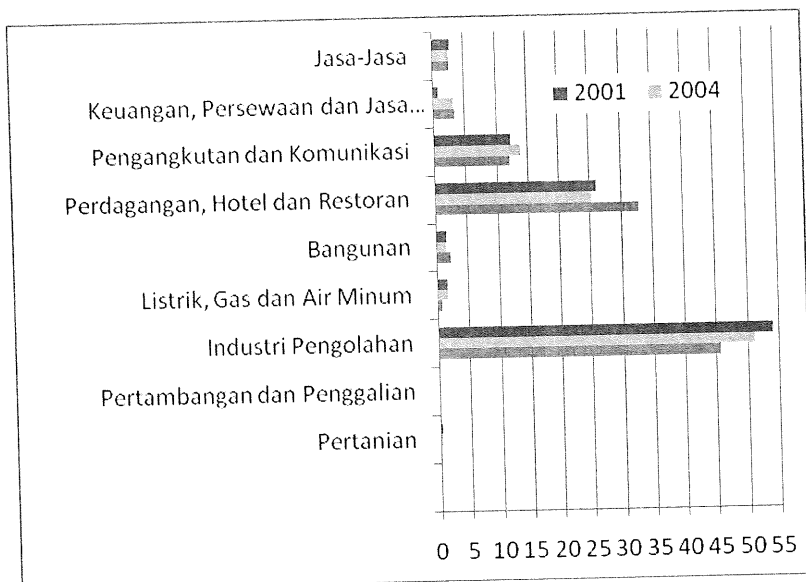


Sumber: BPS Kota Tangerang, 2011.

Perekonomian kota Tangerang didominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60 persen dari total PDRB kota Tangerang. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan perekonomian kota Tangerang yang mencapai 4,9 persen. Sektor kedua yang cukup besar memberikan sumbangan perekonomian kota Tangerang adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Dalam perkembangannya, kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Sektor pengangkutan dan komunikasi juga memiliki kecenderungan yang sama, yaitu terjadi peningkatan kontribusi terhadap PDB. Peningkatan tersebut diduga sebagai implikasi strategis geografis kota Tangerang sebagai pintu masuk wisman internasional melalui bandara udara inter-

nasional Soekarno Hatta, dan sebagai kota penyangga Metropolitan Jakarta. Selain itu, pergeseran kontribusi tersebut juga tidak terlepas dari peningkatan dan keberagaman aktivitas penduduk dan pemekaran wilayah Kota Tangerang.

Gambar 2.7.
Perkembangan Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kota Tangerang Tahun 2001, 2004, dan 2010



Sumber : Bappeda Kota Tangerang, 2009 dan BPS Kota Tangerang, 2010b

Pendapatan per kapita kota Tangerang juga memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pendapatan per kapita masyarakat di kota Tangerang mencapai Rp.26.240.397 dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun mencapai 11 persen. Peningkatan pendapatan per kapita dapat menggambarkan besarnya aktivitas ekonomi melalui produk/ouput yang dihasilkan dan melebihi kecepatan pertumbuhan penduduknya. Namun demikian, peningkatan pendapatan per kapita tersebut secara langsung dapat memberi acuan bagi kemakmuran pen-

duduk kota Tangerang. Hal tersebut karena mayoritas peningkatan PDRB kota Tangerang diperoleh dari sektor industri pengolahan padat modal dan daya serap tenaga kerja yang terbatas.

Salah satu indikator ekonomi untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi dan kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan penduduk adalah melalui capaian indeks koefisien gini. Semakin tinggi (mendekati 1) capaian indeks koefisien gini suatu daerah, menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok penduduk. Berdasarkan data Bappeda kota Tangerang (2009) dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi penduduk di kota Tangerang relatif lebih baik (0,24), dibanding capaian tingkat nasional yang relatif lebih tinggi, walaupun tidak menutup adanya ketimpangan ekonomi.

b. Aspek Kependudukan

Berdasar hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk kota Tangerang mencapai 1.797.715 jiwa dengan rasio jenis kelamin adalah 105. Nilai 105 artinya setiap 105 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk kota Tangerang memperlihatkan peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,2 persen per tahun. Capaian rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan provinsi Banten pada tahun yang sama yaitu 2,80 persen dan provinsi DKI Jakarta yaitu 1,40 persen) (BPS Provinsi Banten, 2011; BPS DKI Jakarta, 2011).

Besarnya laju pertumbuhan penduduk kota Tangerang tentunya tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat kelahiran, kematian dan arus migrasi (perpindahan) yang terus meningkat. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, rata-rata jumlah kelahiran bayi hidup di kota Tangerang oleh seorang wanita subur berusia 25 - 45 tahun mencapai dua orang. Sedangkan angka migrasi risen kota Tangerang mencapai 10,88 persen. Artinya dari 10 orang penduduk kota Tangerang terdapat satu

orang penduduk yang baru menetap di kota Tangerang untuk jangka waktu kurang dari enam bulan. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa arus migrasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk kota Tangerang.

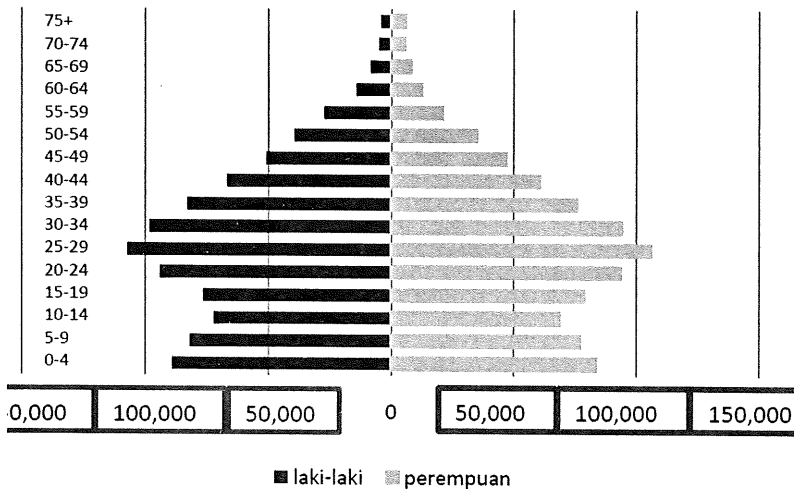
Pada tahun 2010 tingkat kepadatan penduduk di kota Tangerang mencapai 10.925 jiwa per km². Meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2005 yang mencapai 9.047 jiwa per km². Jumlah tersebut menempatkan kota Tangerang berada pada peringkat keenam dalam urutan jumlah penduduk menurut kota di Indonesia. Kelima kota dengan urutan terbesar adalah Kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk kota Tangerang tidak terlepas dari status kota Tangerang sebagai kota penyangga perekonomian DKI Jakarta dan pusat perindustrian yang memiliki aksesibilitas, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.

Kota Tangerang memiliki tingkat disparitas penduduk yang tidak merata akibat terjadi pemusatan penduduk pada wilayah-wilayah tertentu. Pemusatan penduduk, umumnya terjadi di wilayah perindustrian yang menjadi pusat nadi perekonomian di kota Tangerang. Berdasarkan disparitas sebaran penduduk menurut wilayah administrasi, terdapat tiga kecamatan yang memiliki jumlah populasi terbesar, yaitu kecamatan Cipondoh, Larangan dan Pinang. Sedangkan kecamatan dengan populasi terkecil adalah kecamatan Benda, Neglasari dan Batuaceper. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Larangan yang mencapai 16.000 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Neglasari yang mencapai 5.000 per km².

Berdasarkan komposisi penduduk, kota Tangerang didominasi oleh penduduk usia muda dengan tingkat kelahiran tinggi dan kecilnya proporsi penduduk usia tua atau rendahnya tingkat kematian. (Lihat Gambar 2.8). Piramida penduduk merefleksikan struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin (Harto dan Adioetomo, 2010). Keadaan tersebut terlihat dari penurunan proporsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) menjadi 26 persen, se-

dangkan penduduk usia produktif meningkat sebesar 70 persen (BPS Kota Tangerang, 2011a). Rasio ketergantungan yang mencerminkan beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk non produktif mencapai 42 persen. Angka tersebut berarti dari 100 orang penduduk usia produktif di kota Tangerang harus menanggung 42 orang penduduk yang tidak produktif. Kondisi tersebut menggambarkan adanya penggelumbungan penduduk usia kerja yang juga diikuti dengan peningkatan penduduk usia balita (0 – 4 tahun). Penggelembungan kelompok usia kerja memperkuat fakta bahwa kota Tangerang merupakan salah satu kota tujuan penduduk usia kerja dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperoleh kesempatan kerja.

Gambar 2.8.
Paramida Penduduk Kota Tangerang, 2010

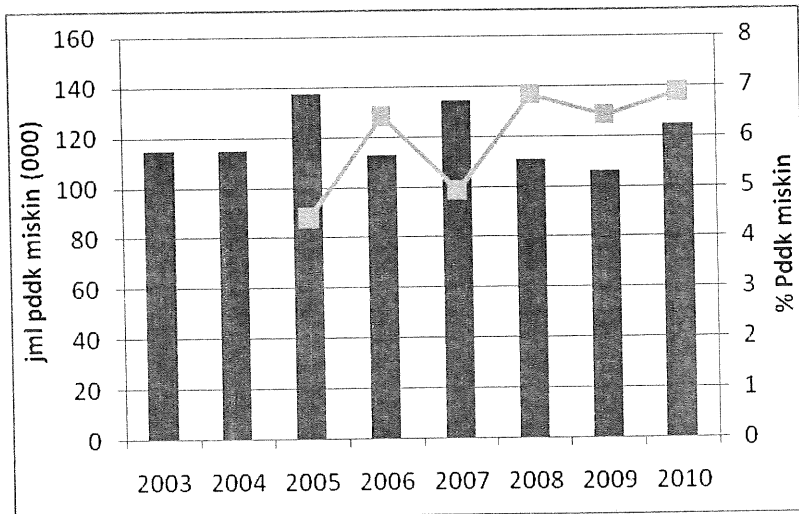


Sumber : BPS Kota Tangerang, 2011b

Sebagai tempat tujuan migrasi, kota Tangerang tidak terlepas dari berbagai permasalahan kemiskinan. Pada kurun waktu tahun 2003-2010, tingkat kemiskinan di kota Tangerang cenderung fluktuatif. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005 dan 2007

(Lihat Gambar 2.9). Fluktuasi tersebut merefleksikan tingkat kerentanan penduduk kota Tangerang khususnya yang berada di atas garis kemiskinan dan mudah menjadi miskin kembali jika terjadi ketidakstabilan ekonomi.

Gambar 2.9.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang, 2003 - 2010



Sumber : BPS, 2005; BPS 2006; Bappeda Kota Tangerang, 2009; BPS Kota Tangerang, 2010;

Dilihat dari sebaran penduduk miskin, konsentrasi keluarga miskin terbesar terdapat di kecamatan Neglasari yang mencapai 4.968 KK dan diikuti kecamatan Karawaci dan Ciobodas (Bappeda Kota Tangerang, 2009a). Jumlah keluarga miskin di kecamatan Neglasari berbanding terbalik dengan tingkat kepadatannya. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan di kecamatan Neglasari tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia, di mana sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah (BPS Kota Tangerang, 2010). Kelurahan Mekarsari merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Neglasari dengan tingkat kemiskinan tertinggi di

antara kelurahan lainnya. Mayoritas penduduk kelurahan Mekar-sari dengan tingkat kehidupan yang kurang menguntungkan yang mengandalkan sektor informal sebagai sumber matapenca-harian warga. Keterbatasan tersebut menempatkan kecamatan Neglasari dalam berbagai permasalahan kemiskinan.

c. **Dinamika Ketenagakerjaan**

Bagi pemerintah daerah kota Tangerang, penanganan masa-lah ketenagakerjaan menjadi sangat penting mengingat kota ini merupakan kota industri, perdagangan dan jasa serta tujuan mi-grasi banyak tenaga kerja dari luar kota Tangerang. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2010, jumlah pendu-duk kota Tangerang usia kerja adalah 1.429.299 jiwa, terdiri dari 51,11 persen laki-laki dan 48,89 persen perempuan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk usia kerja di kota Tangerang cenderung memperlihatkan peningkatan secara signi-fikan dengan rata-rata laju perubahan mencapai 10,25 persen per tahun (Lihat Tabel 2.2). Peningkatan terbesar terjadi pada jumlah angkatan kerja antara tahun 2007 dan 2010 yang mencapai lebih dari 18 persen per tahun. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dari 55,90 persen (2005) menjadi 69,16 persen (2010). Peningkatan kesempatan kerja di kota Tange-rang tidak terlepas dari pembangunan ekonomi wilayah Tange-rang sebagai kota perdagangan dan perindustrian.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Tangerang menu-rut jenis kelamin cenderung memperlihatkan keadaan yang sedi-kit berbeda. Perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan ker-ja lebih rendah dibanding laki-laki. Namun demikian, dalam ku-run waktu tiga tahun terakhir (2008 - 2010), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan memperlihatkan kecenderungan peningkatan sebesar 3,2 persen. Sedangkan laki-laki di kota Ta-ngerang memperlihatkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang fluktuatif, yaitu meningkat dari tahun 2008 - 2009 dan menurun sebesar 1,6 persen di tahun 2010. Dengan kata lain, dapat diasum-

sikan bahwa penurunan partisipasi angkatan kerja laki-laki mengindikasikan penyempitan kesempatan kerja laki-laki dan terbukanya peluang perempuan untuk memasuki pasar kerja.

Tabel 2.2.
Perkembangan Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang, 2005 - 2010

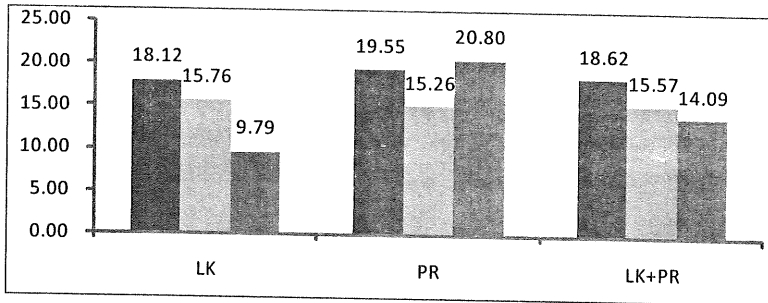
Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)			TPAK (persen)	TPT (persen)	Perubahan (persen)
	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah			
2005	490.285	122.571	612.856	55,90	20,00	
2006	543.793	119.069	662.862	59,70	17,96	8.16
2007	543.704	139.587	683.291	58,24	20,43	3.08
2008	620.578	84.443	705.021	65,79	18.62	3.18
2009	705,412	130,122	835,534	68.51	15.57	18.51
2010	849,324	139,306	988,630	69.16	14.09	18.32
	Rata-rata perubahan/tahun					10.25

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 dan 2010 diolah Pusdatinaker

Di sisi lain, peningkatan partisipasi angkatan kerja di kota Tangerang, tidak secara langsung menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan 2007. Tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2007 hingga 2010. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka di kota Tangerang memperlihatkan kecenderungan penurunan, tetapi nilai tersebut masih lebih tinggi daripada tingkat pengangguran terbuka Indonesia (7,14 persen) dan provinsi Banten (13,68 persen). Tingginya tingkat pengangguran terbuka tidak terlepas dari fleksibilitas pasar kerja di kota Tangerang. Sebagai kota penyangga metropolitan dan kota industri, kota Tange-

rang memiliki peluang kesempatan kerja yang cukup besar sehingga memudahkan seseorang pencari kerja untuk menunggu memperoleh kesempatan pekerjaan. Di sisi lain, animo masyarakat lokal untuk mencari pekerjaan di luar kota Tangerang termasuk rendah karena relatif mudahnya memperoleh kesempatan kerja di daerah ini.

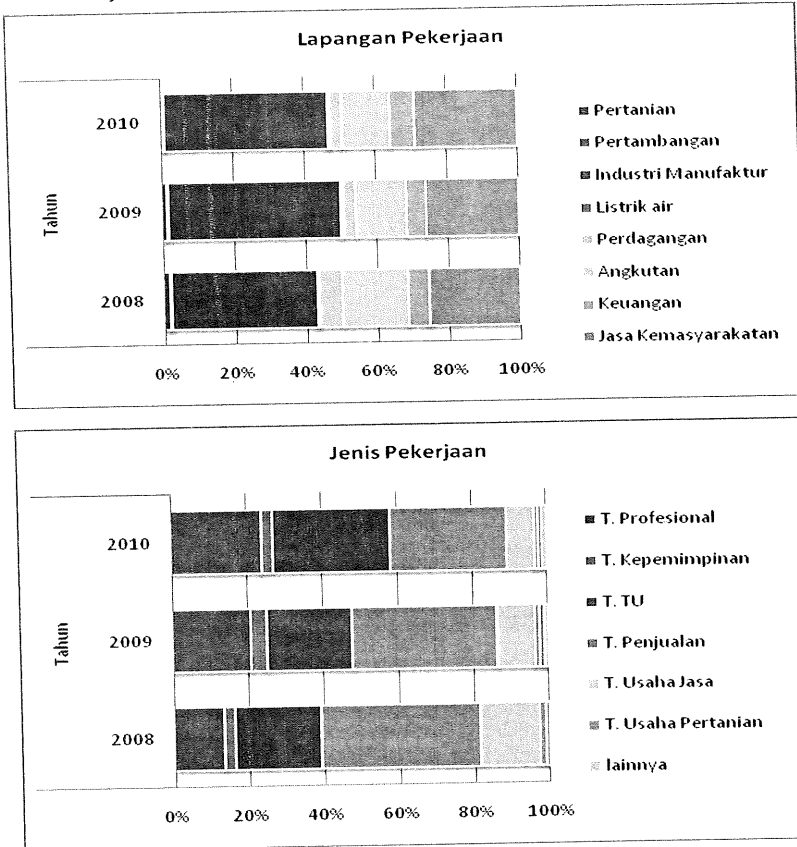
Gambar 2.9.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang 2008 - 2010 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008, 2009, 2010 diolah Pusdatinaker

Dilihat dari jenis kelamin, di kota Tangerang tingkat pengangguran perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Sebelum tahun 2010, tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan cenderung tinggi yaitu lebih dari 10 persen. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran perempuan sangat tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Keadaan sebaliknya terjadi pada laki-laki, yaitu tingkat pengangguran laki-laki (2010) jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua hal tersebut menunjukkan fakta adanya perbedaan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 2.8.
Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan dan Jenis Pekerjaan di Kota Tangerang, Tahun 2008, 2009 dan 2010



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008, 2009, dan 2010 diolah Pusdatinaker

Sebelum tahun 2010, laki-laki dan perempuan mengalami pemasalahan dalam memperoleh ketersediaan pekerjaan. Krisis global yang terjadi di awal tahun 2008 juga mempengaruhi kesempatan kerja di Indonesia, khususnya kota Tangerang. Dominasi kesempatan kerja kota Tangerang berada pada sektor industri

pengolahan tentunya sangat mempengaruhi peluang kesempatan kerja. Pemulihan perekonomian global yang semakin membaik di awal tahun 2010 kembali meningkatkan peluang kesempatan kerja di kota Tangerang.

Sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa kemasyarakatan merupakan tiga sektor utama yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kota Tangerang. Tenaga kerja laki-laki bekerja di ketiga prioritas pembangunan ekonomi tersebut, sedangkan tenaga kerja perempuan umumnya terserap hanya di sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan, khususnya di sektor ekonomi perdagangan dan jasa informal. Padahal, kesempatan kerja di ekonomi informal sangat dekat dengan kemiskinan dilihat dari tidak adanya jaminan dan kepastian kerja, rendahnya pendapatan, minimnya keselamatan dan keamanan bekerja. Maka tidak mengherankan jika kaum perempuan di ekonomi informal cenderung menjadi pekerja miskin (*working poor*).

Dilihat dari perkembangan jenis pekerjaan, antara tahun 2008–2010 tidak terlihat perbedaan yang mencolok. Tenaga produksi, operator dan pekerja kasar merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di kota Tangerang. Selain itu, jenis pekerjaan lainnya yang cukup banyak di kota Tangerang adalah tenaga penjualan. Berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan tidak memperlihatkan pola kecenderungan yang berbeda, yaitu tenaga produksi, operator dan pekerja kasar masing-masing mencapai 49,85 persen untuk laki-laki dan 42,72 persen untuk perempuan. Penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang masih didominasi tenaga kerja dengan tingkat keahlian rendah (*unskill*) laki-laki maupun perempuan. Jenis pekerjaan tersebut relatif membutuhkan ketekunan dibandingkan dengan ketetampilan dalam bekerja. Dominannya pekerja yang terlibat pada jenis pekerjaan tersebut menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) di kota Tangerang cenderung rendah di mana kualitas SDM tenaga kerja laki-laki lebih rendah dibanding perempuan.

2.4. Penutup

Struktur perekonomian dan ketenagakerjaan merupakan dasar penentuan arah pembangunan suatu wilayah. Struktur perekonomian sangat dipengaruhi oleh ciri dan perkembangan suatu wilayah. Pada umumnya, perekonomian perkotaan didominasi oleh sektor tersier, namun tidak terlepas pengaruh perkembangan sektor sekunder, seperti industri pengolahan. Kota Surakarta dan kota Tangerang merupakan pusat pengembangan jasa perdagangan dan industri pengolahan. Kota surakarta dikenal dengan pusat kerajinan batik, sedangkan kota Tangerang sebagai pusat berbagai macam industri besar maupun kecil. Keberadaan keberagaman industri tersebut membuka kesempatan kerja di berbagai sektor lainnya, seperti perdagangan, perhotelan dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta jasa kemasyarakatan.

Besarnya kontribusi pembangunan ekonomi pada sektor-sektor tersebut menyebabkan gejolak perekonomian global yang terjadi sekitar tahun 2007 mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian kedua wilayah. Letak geografis perkotaan juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kota Tangerang sebagai kota penyangga metropolitan Jakarta sudah sepantasnya memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat kedekatan lokasinya dengan aktivitas ekonomi metropolitan.

Kondisi demografi menjadi faktor penting sebagai dasar perencanaan pembangunan suatu wilayah. Penduduk adalah komponen penting dan menentukan jalannya proses pembangunan. Penduduk perkotaan tidak terlepas dari permasalahan jumlah, distribusi dan komposisi. Secara umum, kedua lokasi penelitian merupakan kota dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Bahkan kepadatan kota Tangerang menduduki peringkat keenam dari kota-kota besar di Indonesia. Mayoritas penduduk perkotaan berusia produktif yaitu berumur lebih dari 15 tahun. Besarnya proporsi penduduk berusia 15 - 30 tahun sangat dipengaruhi faktor perpindahan penduduk (migrasi).

Kota Tangerang merupakan tujuan migrasi dari berbagai wilayah Indonesia, sedangkan Surakarta sebagai kota transit berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan dan pariwisata. Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan di perkotaan memperlihatkan persentase yang cukup besar bahkan cenderung terjadi peningkatan antara tahun 2006 dan 2010. Kedua hal tersebut menjadikan problematika perkotaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Struktur ketenagakerjaan sejatinya menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan program dan arah pembangunan ekonomi khususnya upaya pengurangan kemiskinan. Hal tersebut karena tenaga kerja merupakan salah satu modal utama penggerak roda perekonomian. Pada kasus perkotaan, tampak bahwa sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri pengolahan merupakan sektor pembangunan yang mendominasi dan berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini baik di kota Surakarta maupun di kota Tangerang.

Namun perlu menjadi catatan penting bahwa kemajuan di sektor tersebut perlu didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi yang kondusif (termasuk kebijakan ekonomi). Kondisi ini diakui masih menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia (termasuk kota Surakarta dan Tangerang). Maka untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki daerah, perlu kiranya dalam menentukan arah dan kebijakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, terutama memajukan kegiatan ekonomi informal.

Daftar Pustaka

- Avirani, Novi I. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Rendahnya Penduduk Kota Surakarta 2000 dan 2005*. Skripsi. Program Studi Geografi. Fakultas Geografi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- BPS. 2006. *Profil Kemiskinan menurut Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Jakarta.
- BPS. 2007. *Profil Kemiskinan menurut Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Jakarta.
2008. *Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008*, diolah Pusat data Informasi Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.
- BPS, 2009. *Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009*, diolah Pusat Data Informasi Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.
- BPS, 2010. *Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010*, diolah Pusat Data Informasi Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.
- BPS Kota Surakarta, 2010. *Kota Surakarta Dalam Angka 2010*. Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. 2011a. *Surakarta Dalam Angka Tahun 2010*. Surakarta.
- _____. 2011b. *Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta Tahun 2010*. Surakarta.
- _____. 2011c. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Tahun 2010*. Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. 2012. *Profil Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2011*. Surakarta
- Bappeda Kota Surakarta. 2009. *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta 2009 – 2013*. Surakarta.
- BPS Kota Tangerang, 2010a. *Kota Tangerang dalam Angka 2010*. Tangerang.
- _____. 2010b. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang 2010*. Tangerang

- _____, 2010c. *Kecamatan Neglasari dalam Angka 2010*.
Tangerang.
- BPS Kota Tangerang. 2011. *Proyeksi Penduduk Kota Tangerang Tahun 2010 – 2025*. Tangerang
- Bappeda Kota Tangerang, 2009a. *Laporan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang*. Tangerang
- _____, 2009b. *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang 2009 – 2013*. Tangerang.
- Harto, N. dan Adioetomo, S. M. 2010. *Komposisi dan Distribusi Penduduk dalam Dasar-dasar Demografi*. Jakarta. Lembaga Demografi FE-UI.
- Islam, I. dan Nazara, S. 2000. *Minimum wage and The Welfare on Indonesia workers*. Occasional Discussion Paper Series. No. 3. ILO. Jakarta.
- Islam. R. 2004. *The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction : An empirical Analysis*. Issues in Employment and Poverty Discussion Paper Series. No. 4. Recovery and Reconstruction Department. ILO. Geneva.
- Kaaya. A. 2006. *When is Growth pro-poor ? Evidence from panel of countries*. Journal of Development Economics. Vol. 80. p.198 – 227. Elsevier Published.
- Kelurahan Pasar Kliwon. 2009. *Kelurahan Pasar Kliwon dalam Angka 2009*. Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Semanggi. Surakarta.

BAB III

DINAMIKA PEKERJAAN EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN

Oleh: Devi Asiati

3.1. Pendahuluan

Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi aspek yang cukup serius bagi Indonesia. Sampai saat ini, tingginya tingkat pengangguran sebagai akibat keterbatasan kesempatan kerja, masih menjadi permasalahan klasik ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi ini diiringi oleh kualitas tenaga kerja yang relatif masih rendah sehingga tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya mampu mengisi lapangan pekerjaan yang memerlukan kualifikasi tertentu. Selanjutnya, permasalahan ketenagakerjaan Indonesia tidak berhenti pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran kesempatan kerja, tetapi tenaga kerja yang sudah terserap di pasar kerjapun masih menghadapi beberapa masalah, seperti tingkat kesejahteraan, keamanan pekerjaan yang masih rendah, dan jam kerja yang melebihi standar kelayakan.

Kondisi ketenagakerjaan tersebut dialami oleh kebanyakan tenaga kerja yang bekerja di ekonomi informal yang cenderung dekat dengan kondisi kemiskinan dan jauh dari kondisi pekerjaan layak. Ironisnya, ekonomi informal berperan penting dalam menyediakan kesempatan kerja bagi mayoritas tenaga kerja Indonesia. Hingga saat ini, ekonomi informal di Indonesia mampu menyediakan kesempatan kerja bagi sekitar 70 persen tenaga kerja. Sifat pekerjaan yang mudah dimasuki atau '*easy to entry*'

dan umumnya dengan kualifikasi tenaga kerja yang relatif rendah menjadikan ekonomi informal sebagai andalan bagi tenaga kerja untuk bekerja, terutama di daerah perkotaan.

Pada realitasnya, ekonomi informal terus bertahan hidup karena beberapa alasan, yaitu: (1) ekonomi informal menyediakan mekanisme bertahan hidup (*survival*) pada saat krisis; (2) Ekonomi informal merupakan batu loncatan untuk masuk ke sektor formal; (3) Ekonomi informal memberikan jalan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Misalnya pada beberapa kasus permintaan tenaga kerja cukup tinggi untuk jenis keahlian yang hanya dimiliki oleh pekerja rumahan dari pada mereka yang bekerja di sektor formal; (4) Ekonomi informal memberi kesempatan wirausaha dan pendirian usaha baru tanpa terkekang oleh regulasi Negara (ILO, 2010). Artinya, sebagai sektor ekonomi yang sangat potensial dalam menyediakan kesempatan kerja maka sepatasannya perhatian terhadap upaya memperbaiki kondisi pekerjaan ekonomi informal perlu menjadi prioritas pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

Bagian ketiga dalam buku ini menguraikan dinamika pekerjaan di ekonomi informal daerah perkotaan dengan kasus di kota Surakarta dan Tangerang. Pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada empat hal, yaitu struktur pekerjaan ekonomi informal, pendapatan dan jam kerja, perlindungan kerja dan pemberdayaan pekerja. Pembahasan kajian dilakukan dengan memperhatikan kelayakan suatu pekerjaan berdasarkan indikator-indikator pekerjaan layak yang telah dikembangkan. Data yang digunakan gabungan data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif berasal dari hasil survei terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dan angkatan kerja yang bekerja pada ekonomi informal. Survei telah dilakukan terhadap 305 rumah tangga pekerja ekonomi informal di kota Surakarta dan Tangerang. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan pekerja ekonomi informal dan narasumber terkait di kota Surakarta dan Tangerang.

3.2. Struktur Pekerjaan Ekonomi Informal

Ekonomi informal merupakan kegiatan yang berperan penting dalam menyediakan kesempatan kerja di Indonesia. Sekitar duapertiga tenaga kerja bekerja di ekonomi informal dan kontribusinya cukup besar terhadap total pekerjaan dan berperan mengurangi tingkat pengangguran. Ekonomi informal diidentifikasi sebagai pekerjaan yang mudah dimasuki kapan saja, menggunakan sumberdaya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sekolah formal dan tidak diatur dalam pasar kompetitif (ILO, 2010). Konsep ekonomi informal di negara berkembang meliputi kegiatan ekonomi yang dibayar atau tidak dibayar, kegiatan yang berkaitan pekerjaan rumah tangga dan kegiatan illegal, sebagian besar disebabkan olah tidak terorganisir dan tidak ada aturan hukum (Evan Melvins, 2006).

Lapangan Pekerjaan

Pembahasan mengenai lapangan pekerjaan dapat menggambarkan kondisi kesempatan kerja sektoral yang dikelompokkan pada tujuh sektor, yaitu pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan dan restoran, angkutan, pergudangan dan komunikasi dan jasa kemasyarakatan. Pada hampir semua sektor ekonomi terdapat pekerja informal, seperti perdagangan, jasa, industri dan bangunan. Pada sektor perdagangan, pekerja informal mencakup pedagang pasar, pedagang warung sampai pedagang asongan. Pada sektor jasa, pekerja informal mencakup pekerja bengkel, tukang servis dan sebagainya. Di sektor industri, pekerja informal mulai dari industri kecil dan rumah tangga hingga unit usaha paling kecil atau *self employment*. Di sektor bangunan, seperti tukang bangunan yang bekerja sendiri sedangkan di sektor angkutan, kegiatan ekonomi informal mencakup sopir taksi, ojek dan sebagainya. Pekerjaan di sektor perdagangan dan restoran merupakan pekerjaan yang banyak dilaku-

kan oleh pekerja ekonomi informal, baik di Kota Surakarta maupun Tangerang.

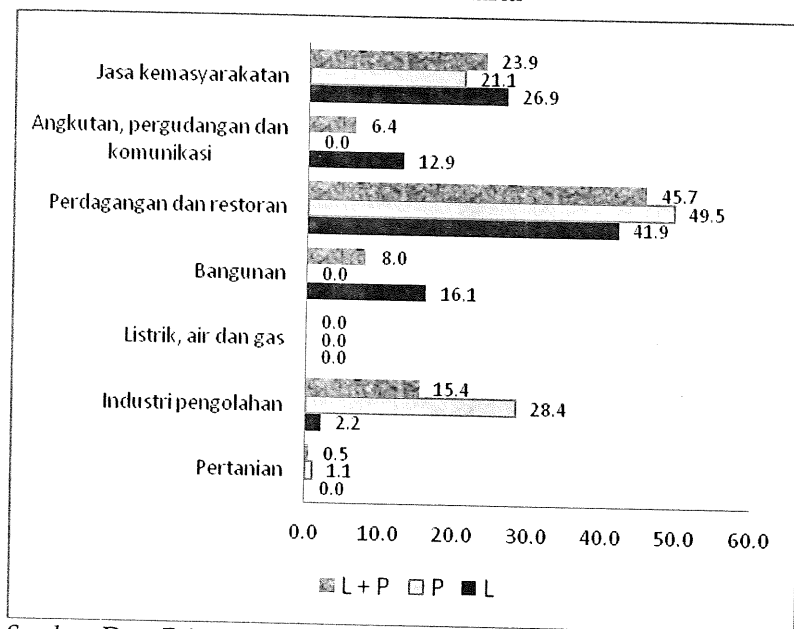
Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap pekerja ekonomi informal. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 45,7 persen responden pekerja ekonomi informal bekerja di sektor perdagangan, diikuti sektor jasa kemasyarakatan sebesar 23,9 persen dan industri pengolahan sebanyak 15,4 persen (Grafik 3.1a). Pada umumnya pekerjaan informal di sektor perdagangan yang banyak dilakukan adalah usaha perdagangan skala kecil, seperti kegiatan berjualan di warung, berdagang keliling atau berdagang di pasar setempat. Di kota Surakarta Pemda menyediakan lokasi tertentu bagi pedagang untuk berusaha. Sektor perdagangan memberi peluang untuk berkembangnya usaha di sektor industri makanan, seperti yang terjadi di kelurahan Sudiroprajan. Usaha rumah tangga membuat makanan atau jajanan banyak dilakukan oleh masyarakat Sudiroprajan. Biasanya mereka menjual makanan tersebut pada pedagang lain yang mangkal di lokasi-lokasi tertentu di kota Surakarta.

Ekonomi informal merupakan sumber penyedia utama pekerjaan bagi hampir sebagian besar kaum perempuan di lokasi penelitian. Hasil survei dalam kajian ini menemukan bahwa kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan perempuan adalah berdagang (49,5 persen). Kegiatan ekonomi informal di sektor perdagangan identik dengan pelaku ibu rumah tangga karena kegiatan tersebut umumnya dilakukan di sekitar tempat tinggal, sambil melakukan berbagai tugas pekerjaan rumah tangga.

Perempuan juga banyak terlibat pekerjaan di sektor industri pengolahan (28,4 persen). Namun demikian jenis kegiatan pekerjaan yang dilakukan juga tidak jauh dari status mereka sebagai pekerja informal. Di salah satu lokasi penelitian (Kelurahan Semanggi) terdapat berbagai jenis industri kecil/rumah tangga, seperti industri konveksi, industri pembuat kue, industri pembuat 'kok' bulu tangkis, industri kain pantai atau 'nyeliwir'. Hal ini

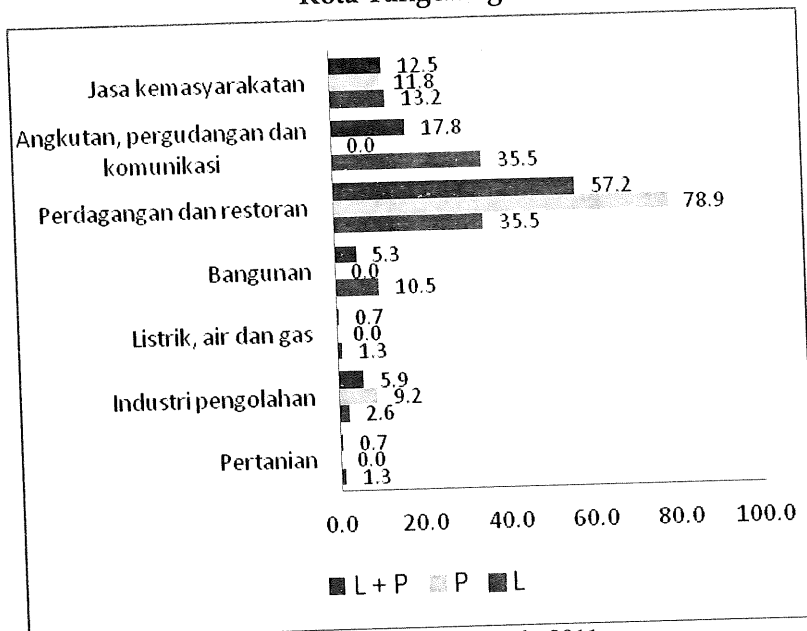
berarti tersedia berbagai kesempatan kerja untuk masyarakat di sekitarnya, terutama perempuan. Hampir sebagian besar ibu rumah tangga melakukan pekerjaan 'nyeliwir' di rumah, yaitu membuat rumbai pada pinggiran kain pantai. Menurut mereka, kegiatan tersebut merupakan pekerjaan sambilan sebagai pengisi waktu santai di rumah setelah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga. Sesuai definisi, kegiatan tersebut termasuk pekerjaan karena mendapat imbalan upah dari pekerjaan tersebut.

Gambar 3.1a
Pekerja Sektor Informal menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Surakarta



Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011

Grafik 3.1b:
Pekerja Sektor Informal menurut Lapangan Pekerjaan
Kota Tangerang



Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011

Seperti halnya kota Surakarta, mayoritas responden pekerja ekonomi informal di kota Tangerang juga bekerja di sektor perdagangan, yaitu sebesar 57,2 persen, diikuti sektor angkutan sebesar 17,8 persen dan jasa kemasyarakatan sebesar 12,5 persen (Grafik 3.1b). Perdagangan skala kecil seperti berjualan di warung atau pasar adalah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian di kota Tangerang. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak terlibat pekerjaan di sektor perdagangan (78,5 persen). Dibanding laki-laki, selain berjualan di rumah, perempuan juga banyak berdagang di pasar atau di tempat yang menetap maupun berpindah. Responden di kota Ta-

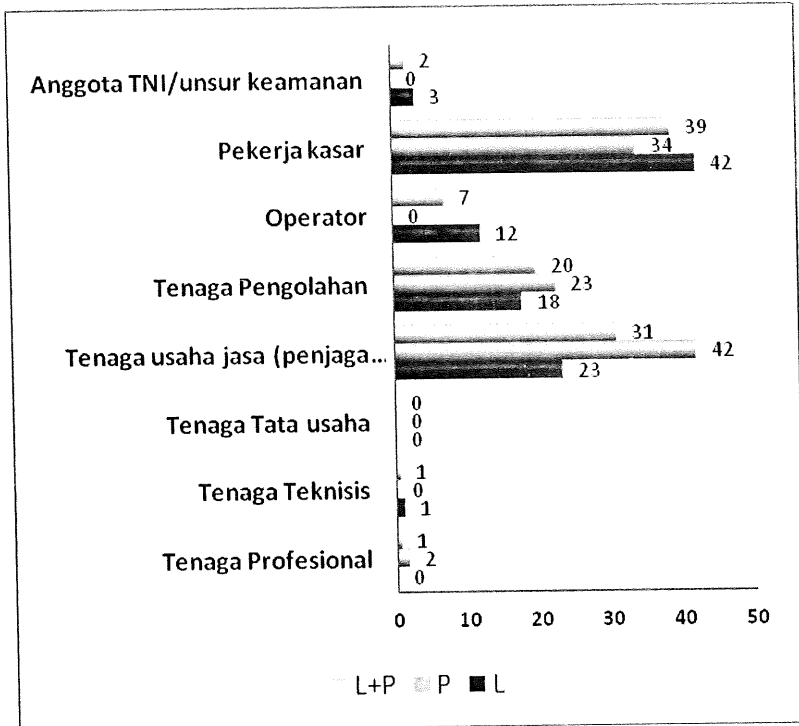
ngerang juga banyak melakukan pekerjaan di sektor angkutan, terutama oleh laki-laki (35.5 persen). Baiknya aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi yang tersedia dari dan ke lokasi penelitian, menyebabkan mobilitas penduduk cukup tinggi dan hal ini memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk bekerja di sektor transportasi. Pekerjaan sebagai sopir angkutan maupun tukang becak dan ojek banyak dilakukan oleh responden di Tangerang.

Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan dikelompokkan atas pejabat, tenaga profesional, teknisi, tenaga tata usaha, tenaga jasa dan tenaga penjualan, tenaga usaha pertanian, operator, pekerja kasar dan unsur ketahanan. Berdasarkan jenis pekerjaan, pekerjaan kasar lebih banyak dilakukan oleh responden di Surakarta (39 persen), diikuti dengan tenaga penjualan (31 persen) dan tenaga pengolahan (20 persen). Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan sebagai tenaga usaha penjualan (42 persen) dan tenaga pengolahan (23 persen). Sementara sebagai pekerja kasar banyak dilakukan oleh laki-laki (42 persen) (Grafik 3.2a).

Di Surakarta, penduduk yang tinggal di lokasi penelitian terlibat beberapa jenis pekerjaan seperti pedagang (asongan, barang rongsokan, warung), buruh lepas, jumptuan (makloon), tukang jahit, tukang pijit dan lain sebagainya. Pekerjaan sebagai pedagang makanan/minuman atau warung yang menjual kebutuhan sehari-hari di sekitar tempat tinggal atau di depan rumah lebih banyak dilakukan oleh penduduk di Kelurahan Sudiroprajan dan Kelurahan Semanggi. Sebagai contoh, di Kelurahan Semanggi ada 19 warung pada satu wilayah Rukun Tetangga (RT).

Grafik 3.2a:
Pekerja Sektor Informal Menurut Jenis Pekerjaan
di Kota Surakarta



Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Kaum perempuan umumnya melakukan kegiatan perdagangan di sekitar tempat tinggal (warung rumahan). Sementara, kaum laki-laki biasanya berjualan di luar tempat tinggal, seperti pedagang keliling atau pedagang kaki lima yang mangkal di tempat tertentu yang telah diatur oleh pemerintah setempat.³ Di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemda Surakarta sebagai ruang ekonomi bagi pedagang kaki lima (PKL) disediakan fasilitas

³ Lihat Surat Keputusan (SK) Walikota Surakarta yang merupakan petunjuk pelaksanaan Perda No 3/2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Surakarta.

antara lain, 1) *Shelter* atau bangunan terbuka bagi pedagang untuk berjualan, seperti di dekat Stadion Manahan dan di Pedaringan; 2) Gerobagnisasi, yaitu menyediakan tempat berjualan (gerobak) bagi pedagang khususnya pedagang makanan, seperti di Galabo. Pada siang hari lokasi Galabo diperuntukkan bagi PKL sedang pada malam hari ditempati oleh pedagang makanan/kuliner dengan menutup jalan agar pembeli dapat menikmati makanan sambil lesehan tanpa terganggu oleh kendaraan yang lewat. 3) Tenda, yaitu menyediakan tenda bagi pedagang untuk berjualan pada lokasi tertentu ; 4) Relokasi, yaitu memindahkan pedagang ke tempat yang telah disediakan untuk PKL, seperti relokasi PKL dari Tugu Pahlawan ke pasar Notoharjo.

Pengaturan tempat berdagang dan penyediaan sarana dan prasarana berdagang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berjualan dengan rasa aman tanpa ada kekhawatiran untuk digusur. Di samping itu, adanya pengaturan waktu berjualan memberi keleluasaan bagi pedagang untuk mempersiapkan dagangan dan istirahat bersama keluarga. Beberapa pedagang yang tinggal di kelurahan Sudiroprajan dan Semanggi memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah. Mereka memiliki akses untuk menjangkau lokasi yang telah ditentukan untuk PKL tersebut karena tempat tinggal mereka berada di pusat kota.

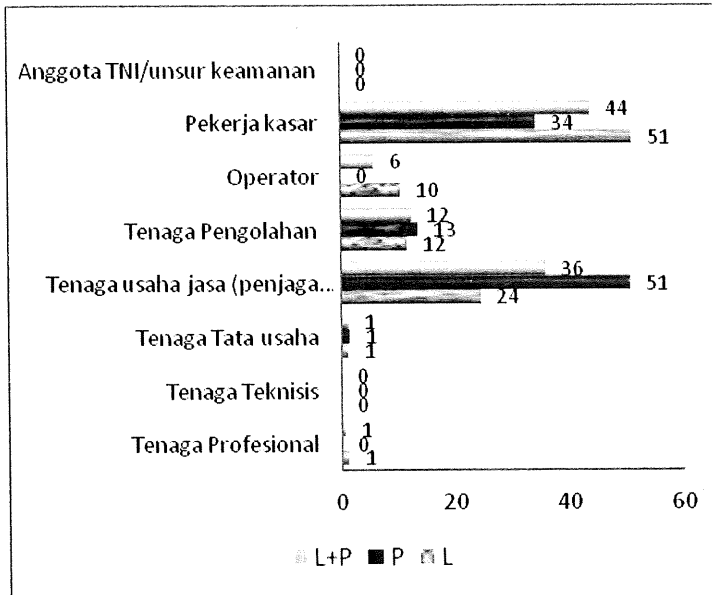
Di antara banyak pekerjaan ekonomi informal, bekerja sebagai pangumpul barang rongsokan banyak dilakukan oleh penduduk di kelurahan Semanggi. Masyarakat menjual barang rongsokan pada pengumpul yang ada di Semanggi, seperti kulkas, AC, radio, televisi, ban bekas, besi bekas, dan barang lainnya. Barang rongsokan juga diperoleh dengan membeli dari perkantoran dengan cara memborong barang peralatan kantor yang tidak dipakai, atau dari bengkel. Barang rongsokan tersebut selanjutnya di jual ke Pasar Notoharjo yang lokasinya berada di wilayah Kelurahan Semanggi. Hal ini merupakan salah satu faktor banyaknya masyarakat yang melakukan pengumpulan barang rongsokan. Barang rongsokan dijual di Pasar Notoharjo pada waktu pagi

hari dengan menggelar 'lapak' sebelum kios-kios dibuka pukul 9 pagi. Salah seorang informan di Semanggi mengungkapkan bahwa pendapatan dari penjualan barang rongsokan cukup besar sehingga pekerjaan tersebut dianggap layak.

Pekerjaan sebagai tenaga usaha jasa banyak dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Semanggi kota Surakarta yaitu sebagai tukang jahit yang bekerja menerima jahitan atau menerima pekerjaan 'nyeliwir' kain pantai yang dikerjakan di rumah (sistem makloon). Pekerjaan tersebut lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 42 persen tenaga usaha jasa dan penjualan dilakukan oleh perempuan, dan laki-laki hanya 23 persen. Pekerjaan jasa lainnya yang dilakukan adalah sebagai tukang pijat. Pekerjaan pijatan ini semakin berkembang setelah adanya pelatihan yang dilakukan oleh salah seorang tukang pijat (Bp. S) terhadap masyarakat sekitar yang berminat. Pelatihan dilakukan sambil mempekerjakan mereka sebagai tukang pijat pada panti pijat yang dimilikinya. Selain tukang pijat, kegiatan sebagai tukang salon juga menjadi pekerjaan sebagian masyarakat di kelurahan Semanggi. Berkembangnya salon kecantikan di kelurahan ini tidak terlepas dari adanya penutupan lokalisasi 'Silir' yang berlokasi di wilayah Semanggi.

Di Kota Tangerang, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh responden pekerja ekonomi informal adalah sebagai pekerja kasar (44 persen), tenaga usaha jasa dan penjualan (36 persen) dan tenaga pengolahan (12 persen) (Grafik 3.2b). Seperti halnya di kota Surakarta, pekerjaan yang sifatnya kasar didominasi oleh laki-laki karena lebih mengandalkan tenaga yang kuat. Sementara perempuan mendominasi pekerjaan sebagai tenaga penjualan di sektor perdagangan.

Grafik 3.2b
Pekerja Sektor Informal Menurut Jenis Pekerjaan
di Kota Tangerang



Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011

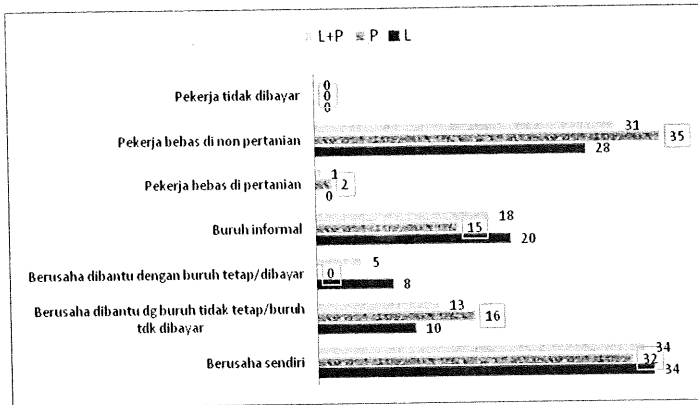
Status Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dalam kajian ini mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang membagi status pekerjaan menjadi 7 kelompok, yaitu: 1) berusaha sendiri, 2) berusaha dibantu buruh tidak dibayar, 3) berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, 4) buruh/karyawan/pegawai, 5) pekerja bebas pertanian, 6) pekerja bebas non pertanian dan 7) pekerja tidak dibayar. Analisis mengenai status pekerjaan responden dapat digunakan untuk melihat sifat pekerjaan pada sektor-sektor tertentu. Di sektor tradisional atau ekonomi informal, status pekerja meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/dibantu anggota rumah tangga, pekerja tidak dibayar/pe-

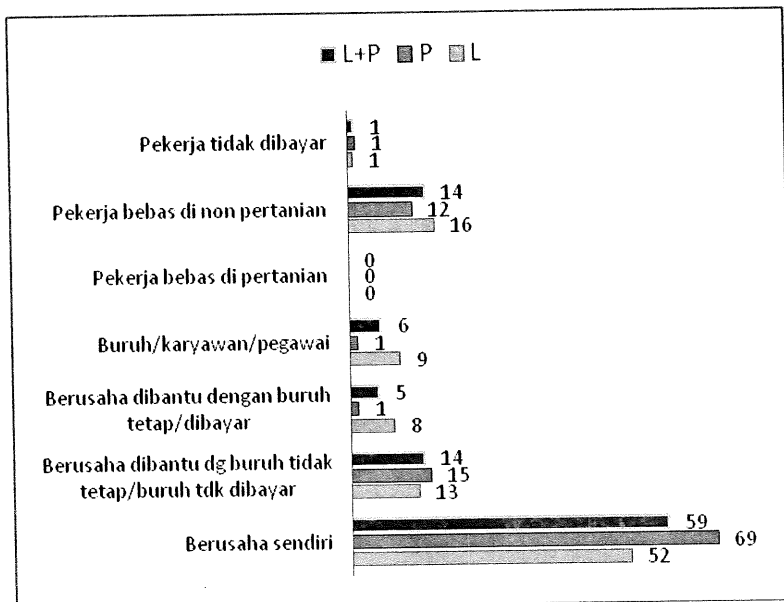
kerja keluarga tanpa upah, pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian. Sementara pada sektor modern atau sektor formal status pekerja meliputi berusaha dibantu buruh tetap dan status buruh (termasuk didalamnya pegawai/karyawan, baik negeri maupun swasta) (Manning, 1982:23, dikutip oleh Daliyo, 2009). Dalam studi ini, mereka yang berstatus sebagai buruh pada ekonomi informal dikategorikan sebagai pekerja informal, seperti buruh usaha perkayuan pada sektor industri yang hanya melakukan aktifitas apabila tersedia bahan baku kayu.

Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar pekerja ekonomi informal di kota Surakarta berstatus berusaha sendiri (34 persen), dan sebagai pekerja bebas non pertanian (31 persen). Kondisi ini memperkuat fakta bahwa pekerja ekonomi informal merupakan pekerja mandiri. Berusaha sendiri umumnya dilakukan pada usaha perdagangan dan jasa. Pekerja bebas non pertanian adalah pekerjaan yang dilakukan jika ada pesanan atau disebut juga dengan pekerjaan serabutan, seperti tukang bangunan, tukang servis dan sebagainya. Pekerja bebas non pertanian cukup menonjol dilakukan oleh perempuan, terutama mereka yang menerima pesanan konveksi untuk dikerjakan di rumah. Hal yang cukup menarik adalah pekerja sektor informal yang bekerja sebagai buruh cukup besar, yaitu sebesar 18 persen. Meskipun status sebagai buruh digolongkan sebagai pekerja formal, tetapi dalam hal ini mereka termasuk sebagai pekerja informal. Hal ini disebabkan mereka adalah buruh pada pekerjaan informal yang tidak ada kepastian keberlanjutan usaha, seperti buruh industri roti skala rumah tangga, yang banyak dilakukan oleh responden di daerah penelitian di kota Surakarta.

Grafik 3.3a
Pekerja Sektor Informal Menurut Status Pekerjaan
di Kota Surakarta



Grafik 3.3b
Pekerja Sektor Informal Menurut
Status Pekerjaan di Kota Tangerang



Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Pada kasus di kota Tangerang, pekerja informal yang berstatus berusaha sendiri proporsinya relatif besar, yaitu hampir 60 persen. Berusaha sendiri lebih menonjol dilakukan oleh perempuan (69 persen) dibandingkan laki-laki (52 persen). Berusaha sendiri banyak dilakukan pada pekerjaan sektor perdagangan, seperti berjualan di sekitar tempat tinggal atau pasar, pekerjaan di sektor angkutan sebagai sopir, tukang becak, ojek dan pekerjaan sektor jasa yang menawarkan jasa, seperti tukang servis. Selain status bekerja sendiri, pekerja bebas non pertanian juga cukup banyak dilakukan oleh pekerja informal di Tangerang, seperti buruh serabutan di sektor bangunan dan jasa.

Pekerjaan yang dilakukan sendiri sangat menonjol pada pekerjaan ekonomi informal. Hal ini terkait dengan kondisi paska krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Data empiris menunjukkan bahwa pekerjaan sektor informal meningkat setelah krisis ekonomi, terutama antara 1998-2003 sebagai dampak penurunan produksi di sektor perbankan perkotaan, manufaktur dan konstruksi (Nazara, dalam ILO. 2010). Selama krisis, terjadi perpindahan pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal, bahkan sektor ekonomi informal tidak hanya mampu bertahan malah berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari faktor permintaan dan penawaran. Selama krisis, pendapatan riil turun sehingga terjadi pergeseran permintaan masyarakat dari barang sektor formal ke sektor informal. Sebagai contoh sebelum krisis pegawai kantoran kelas menengah ke atas makan siang di restoran mahal, setelah krisis mereka mengubah kebiasaan makan ke tempat makan sederhana susah sektor informal yang umumnya merupakan usaha perorangan (Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, tanpa tahun). Elastisitas pekerjaan terjadi pada masa krisis sebagai akibat biaya sosial (*social cost*) dari krisis dan peningkatan jumlah masyarakat miskin secara tajam (Nazara, dalam ILO. 2010).

3.3. Pendapatan dan Jam Kerja Ekonomi Informal

Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan pekerja. Kecukupan pendapatan merupakan hal yang penting untuk mencapai kesejahteraan dan pencapaian pekerjaan layak. Pendapatan yang diterima pekerja adalah upah atau penghasilan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan. Semakin besar pendapatan atau upah yang diterima pekerja mencerminkan bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahterannya. Pendapatan dapat dilihat berdasarkan jenis, lapangan dan status pekerja serta perbandingan dengan tingkat upah minimum regional (UMR) yang berlaku.

Berdasarkan hasil survei, pada Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan pekerja ekonomi informal di Tangerang (Rp. 1.117.098) lebih besar dibanding pekerja informal di Surakarta (Rp. 791.565,79). Pendapatan pekerja informal di kedua lokasi tersebut lebih rendah dibanding besarnya UMR tahun 2011, baik untuk kota Tangerang (UMR = Rp. 1.250.000) maupun Kota Surakarta (UMR = Rp. 826.525). Artinya meskipun ekonomi informal mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, namun tidak demikian dengan sumbangannya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat bukti bahwa tingkat pendapatan yang cenderung rendah merupakan salah satu ciri pekerjaan ekonomi informal sehingga cenderung lebih dekat dengan kemiskinan.

Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata pendapatan responden laki-laki di Surakarta lebih besar dibandingkan perempuan, sebaliknya di Tangerang rata-rata pendapatan responden perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki (Tabel 3.1). Di Kota Solo alternatif pekerjaan untuk laki-laki lebih banyak sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama, seperti berdagang sambil menjadi tukang ojek atau mengumpulkan barang rongsokan. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengaturan

pedagang kaki lima pada lokasi dan waktu tertentu, seperti di Galabo. Sementara perempuan kebanyakan bekerja di rumah, seperti menerima pesanan atau makloon kain pantai di rumah. Pendapatan yang diperoleh ibu-ibu dari pekerjaan makloon tergantung banyaknya jumlah kain yang dibawa dan dikerjakan di rumah. Bagi mereka pekerjaan makloon kain pantai dianggap sebagai sampingan sambil mengisi waktu luang di rumah sehingga mereka melakukannya tanpa mengejar target banyak agar mendapat pendapatan yang lebih besar. Berbeda dengan Surakarta, di Tangerang kesempatan kerja laki-laki relatif sedikit dan persaingan kesempatan kerja yang ada cukup ketat. Sebagai kota satelit DKI Jakarta, kesempatan kerja yang ada di Tangerang juga menjadi incaran bagi pencari kerja dari daerah Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, kesempatan kerja di pabrik banyak dimasuki oleh perempuan. Pendapatan perempuan yang bekerja sebagai buruh cukup besar, yaitu rata-rata Rp. 1.000.000,-, dua kali lebih besar dibandingkan pendapatan sebagai buruh di Kota Surakarta (Tabel 3.1)

Pendapatan responden yang paling besar diperoleh oleh pemilik usaha informal, terutama yang berusaha dibantu tenaga kerja atau buruh tetap. Kondisi ini terjadi baik di kota Surakarta (Rp. 1.564.286,) maupun Tangerang (Rp. 1.565.000,-). Di kota Surakarta, pendapatan responden terbesar kedua dimiliki oleh mereka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap (Rp. 1.165.263,-), diikuti pendapatan mereka yang bekerja sendiri (Rp. 898.235,-). Sementara di Kota Tangerang, pendapatan responden yang berusaha sendiri (Rp. 1.072.593,-) sedikit lebih besar dibandingkan pendapatan responden yang berusaha dengan buruh tidak tetap (Rp. 1.046.667) (Tabel 5.1). Tingginya pendapatan yang diperoleh pekerja dengan status berusaha dibantu buruh baik tetap maupun tidak tetap dapat dipahami mengingat mereka adalah pengusaha dan pemilik modal meskipun pada pekerjaan ekonomi informal. Selanjutnya pendapatan responden yang berusaha sendiri di kota

Tangerang cukup besar (Rp 1.072.593,-). Kemungkinan mereka adalah pedagang yang berjualan di pasar baik menetap maupun berpindah dari pasar ke pasar lainya sesuai hari pasarnya.

Selanjutnya berdasarkan jenis pekerjaan, pendapatan terbesar yang diperoleh pekerja di Surakarta adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga teknisi (Rp. 3.000.000), diikuti oleh mereka yang bekerja sebagai tenaga penjualan dan jasa (Rp. 932.979). Sementara di Tangerang pendapatan terbesar diperoleh mereka yang bekerja sebagai tenaga penjualan (Rp. 1.755.272). Pendapatan sebagai tenaga penjualan di sektor perdagangan kelihatannya cukup memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai contoh kasus di kelurahan Semanggi Surakarta, seorang bapak A berdagang makanan gorengan dan minuman di depan rumah mulai jam 7 sampai jam 11 malam. Selama 4 jam, Bapak A memperoleh pendapatan yang cukup besar, yaitu Rp. 100.000 per hari.

Besarnya pendapatan di sektor perdagangan tidak terlepas dari tingginya aktifitas ekonomi di sektor perdagangan dan daya beli masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat di kota Tangerang di mana posisinya yang berada dekat dengan kota Jakarta berpengaruh pada tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan besarnya permintaan terhadap barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang juga cukup besar.

Tabel 3.1
Pendapatan Rata-Rata per Minggu Pekerja Ekonomi Informal

	Surakarta			Tangerang		
	L	P	L+P	L	P	L+P
<u>Status Pekerjaan utama</u>						
Berusaha sendiri	1.085.666,7	630.476,1	898.235,2	1.032.222,2	111.2087	1.072.593,4
Berusaha dibantu dg buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	1.303.636,4	975.000	1165263,2	1305454,5	762000	1.046.666,7
Berusaha dibantu dengan buruh tetap/dibayar	1.564.285,7	.	1564285,7	1628571,4	1120000	1.565.000
Buruh/karyawan/pegawai	627.578,9	489.000	586518,5	887500	1000000	900.000
Pekerja bebas di pertanian	.	160.000	160000	.	.	.
Pekerja bebas di non pertanian	784.440	264.136,3	540893,6	967142,8	646250	850.454,5
Pekerja tidak dibayar	.	.	.	-	-	-
Total	971.684,7	515.383,3	791565,7	1079651,2	1165164,2	1.117.098
<u>Jenis Pekerjaan</u>						
Tenaga profesional	.	25.000	25000	800000	.	800.000
Tenaga teknisi	3.000.000	.	3000000	.	.	.
Tenaga tata usaha	150.000	150.000
Tenaga usaha jasa (penjaga toko dan pedagang pasar)	1.219.583,3	633.913	932.978,7	2.002.857,1	1.602.352,9	1.755.272,7
Tenaga pengolahan	923.600	342.933,3	633.266,6	896.000	744.444,4	824.210,5
Operator	702.727,2	.	702.727,2	828.888,8	.	828.888,8
Pekerja kasar	908.684,2	532.095,2	774.644,07	762.954,5	727.652,17	750.835,8
Anggota TNI/Polri	337.000	.	337.000	.	.	.
Total	971.684,7	515.383,3	791.565,7	1.079.651,2	1.165.164,2	1.117.098

Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Jam Kerja

Jam kerja adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan merupakan salah satu indikator pekerjaan layak. Jam kerja layak terkait dengan adanya keseimbangan antara waktu untuk bekerja dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Berdasarkan Pasal 77 ayat 1, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja normal adalah bekerja selama 6 hari dalam seminggu, dengan lama kerja 7 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam

1 minggu. Sedangkan untuk tenaga kerja yang bekerja 5 hari dalam 1 minggu, lama kerja 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu. Semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja akan mengurangi waktu untuk keluarga (*leisure time*). Keputusan untuk bekerja ditentukan oleh *opportunity cost* antara tingkat upah dan *leisure time*. Seseorang akan menyediakan waktu untuk bekerja sesuai dengan tingkat upah tertentu (Ehrenberg, 1977). Dalam kaitannya dengan kesejahteraan pekerja, jumlah jam kerja merupakan salah satu faktor dalam menentukan tingkat pendapatan dan produktifitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan hasil yang dicapai tenaga kerja per satuan waktu.

Tabel 3.2
Rata-rata Jumlah Jam Kerja Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan

	Surakarta			Tangerang		
	L	P	L+P	L	P	L+P
<u>Jenis Pekerjaan</u>						
Tenaga professional		24	24	35	.	35
Tenaga teknisi	42	.	42	.	.	.
Tenaga tata usaha			.	84	14	49
Tenaga usaha jasa dan penjualan (penjaga toko dan pedagang pasar)	53,0	67,1	59,9	67,8	65,6	66,4
Tenaga pengolahan	42,1	43,2	42,7	43,7	29,1	36,8
Operator	50	.	50	46,1	.	46,1
Pekerja kasar	54	47,9	51,8	49,2	43,6	47,3
Anggota TNI/Polri	50	.	50	.	.	.
Total	51,1	53,7	52,1	53	52,4	52,7

Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Pekerja ekonomi informal rata-rata bekerja dengan jam kerja panjang, yaitu 52 jam per minggu di Surakarta dan 52,7 jam per minggu di Tangerang (Tabel 3.2). Jam kerja panjang merupakan

salah satu ciri ekonomi informal yang mengindikasikan upah per jam yang tidak memadai (ILO, 2011). Mengacu pada definisi jam kerja normal menurut UU No 13 Tahun 2003, hampir semua jenis pekerjaan yang dilakukan responden pekerja informal memiliki jam kerja di atas jam kerja normal, kecuali pekerja profesional. Jam kerja paling panjang dilakukan oleh tenaga usaha jasa dan penjualan, yaitu 59,9 jam per minggu di Surakarta dan 66,4 jam per minggu di Tangerang. Pedagang makanan biasanya bekerja dari pagi sampai malam mulai dari menyiapkan makanan pada pagi hari dilanjutkan dengan berjualan sampai sore atau malam hari. Jam kerja pekerja usaha jasa dan penjualan di Surakarta lebih rendah dibandingkan Tangerang diduga terkait dengan adanya pengaturan alokasi waktu dan tempat tertentu bagi pedagang berjualan, seperti pasar dan jalan-jalan umum. Sebagai contoh lokasi berjualan di Galabo, pada siang hari diisi oleh pedagang toko dan malam hari untuk pedagang lainnya yang khusus menjual makanan. Begitu juga di Pasar Notoharjo, PKL hanya boleh berjualan dari pagi sampai jam 9 pagi setelah toko-toko mulai dibuka. Dibedakan menurut jenis kelamain, kaum perempuan bekerja dengan jam kerja paling panjang sebagai tenaga jasa penjualan, yaitu 67,1 jam per minggu di Surakarta dan 66,5 jam per minggu di Tangerang.

Namun demikian, panjangnya jam kerja pekerja ekonomi informal tidak mengurangi waktu untuk berkumpul dengan keluarga di rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa mereka merasa tidak ada masalah dengan jam kerja dan masih memiliki waktu untuk bersantai dengan keluarga. Pada umumnya pekerja informal bekerja setiap hari atau 7 hari dalam seminggu sehingga rata-rata jam kerja per hari lebih rendah, sekitar 8 sampai 9 jam per hari. Di samping itu, sebagian pekerja informal hanya bekerja pada hari-hari tertentu atau tergantung pada ketersediaan pekerjaan. Pada saat tidak ada pekerjaan/jon mereka hanya tinggal di rumah berkumpul dengan keluarga.

3.4. Perlindungan Kerja

Decent work (pekerjaan layak) memberikan kesempatan bagi laki-laki ataupun perempuan untuk memperoleh kondisi pekerjaan yang memiliki kebebasan (*freedom*), kesetaraan (*equity*), perlindungan (*security*), dan martabat (*human dignity*). Salah satu pilar dari empat tujuan strategis ILO dalam pekerjaan layak adalah perlindungan sosial. Widarti (2007) menyatakan bahwa indikator perlindungan sosial merupakan aspek penting yang berkaitan dengan tingkat dan kapasitas pembangunan masyarakat. Perlindungan sosial mencakup kebutuhan mendesak seseorang dan untuk memberikan jaminan perlindungan atas kejadian yang tidak terduga, di mana jaminan tersebut merupakan aspek penting dari pekerjaan yang layak.

Tempat Bekerja

Kestabilan dan keamanan bekerja merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mencapai pekerjaan layak. Hal ini tidak terlepas dari faktor lingkungan tempat bekerja terutama terkait dengan keamanan bekerja yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada kelangsungan bekerja. Tempat kerja pedagang kaki lima umumnya sangat rentan terhadap penggusuran karena biasanya dilakukan pada tempat tidak tetap dan dilarang, seperti tempat pejalan kaki, taman kota, dan tempat-tempat tertentu yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi. Apabila pekerjaan dilakukan di tempat yang tidak aman dan rentan terhadap penggusuran, berpotensi mengganggu keamanan bekerja dan kelangsungan kerja. Sebaliknya tempat bekerja yang menetap relatif lebih aman dari penggusuran dan kelangsungan kerja.

Studi ini membedakan tempat bekerja atas tiga kategori, yaitu bekerja di rumah, di luar rumah dan di tempat yang tidak tetap. Bekerja di luar rumah, seperti di pasar, kios atau bekerja di tempat tidak tetap seperti pedagang keliling, pinggir jalan/trottoar relatif lebih rentan terhadap keamanan bekerja karena adanya kemungkinan untuk terkena penggusuran atau gangguan dari

preman. Sementara bekerja di rumah relatif lebih terjaga keamanannya. Tabel 3.3 menunjukkan jumlah responden pekerja ekonomi informal menurut tempat bekerja. Di Surakarta responden pekerja ekonomi informal yang bekerja di rumah dan di luar rumah relatif seimbang, yaitu masing-masing sebanyak 42 persen dan 16 persen bekerja di tempat tidak tetap. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber, bekerja di rumah maupun di luar rumah lebih terjaga keamanannya karena hampir tidak ada pengrusakan tempat berdagang atau gangguan preman. Adanya pengaturan tempat berusaha untuk pedagang kaki lima, menyebabkan mereka berusaha di tempat yang memang telah diperuntukkan untuk berusaha. Sementara di Tangerang pekerja ekonomi informal lebih banyak bekerja di luar rumah (37 persen) diikuti bekerja di rumah (35 persen) dan ditempat tidak tetap (27 persen). Berusaha di tempat lain seperti di pasar atau tempat lainnya banyak dilakukan oleh pekerja informal di Tangerang. Begitu juga bekerja di tempat tidak tetap lebih banyak dilakukan oleh pekerja informal di Tangerang dibanding di Surakarta.

Bekerja di rumah banyak dilakukan oleh mereka yang berusaha sendiri, diikuti oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas non pertanian. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di rumah adalah usaha jasa seperti berdagang, usaha jasa perorangan, seperti penjahit dan tukang pijat. Pekerjaan di rumah juga banyak dilakukan oleh tenaga pengolahan seperti industri rumah tangga dan pekerjaan konvensi atau 'nyeliwir' yang banyak dilakukan oleh pekerja informal di lokasi penelitian Surakarta. Bekerja di rumah dapat dilakukan pada tempat/ruangan khusus di dalam rumah (seperti di teras atau di bagian dalam rumah yang disediakan khusus untuk bekerja) atau tidak ada tempat khusus di rumah. Tempat bekerja di rumah biasanya memanfaatkan ruang di depan atau di dalam rumah dekat jendela menghadap ke luar, seperti mereka yang berjualan sembako, baik di Surakarta maupun Tangerang. Bekerja di rumah juga dapat dilakukan di

depan rumah atau sekitar tempat tinggal, contoh pekerjaan 'nyeliwir' biasa dilakukan di dalam maupun di luar rumah.

Berdasarkan pengamatan, cukup banyak pekerja informal yang bekerja di rumah atau di sekitar rumah/permukiman. Sebagian berdagang di sepanjang jalan atau gang di depan rumah atau berkeliling menjajakan dagangan. Kondisi ini banyak ditemui di Surakarta, terutama di permukiman yang cukup padat. Meskipun tempat bekerja tetap namun sebagian besar tempat usaha tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah kota. Dari hasil survei diketahui bahwa di Surakarta sebanyak 76 persen menyatakan bahwa tempat usaha mereka tidak memiliki ijin, sedang di Tangerang sebanyak 78 persen. Hal ini dapat dipahami mengingat sifat pekerjaan ekonomiinformal yang tidak memerlukan ijin usaha, seperti di rumah atau di sekitar rumah, di sepanjang jalan. Kurang dari sepertiga pekerja informal di kedua lokasi penelitian yang memiliki izin usaha, yaitu mereka yang bekerja di pasar atau tempat usaha menetap lainnya.

Bekerja di luar rumah lebih banyak dilakukan oleh pekerja kasar dan tenaga usaha jasa, termasuk tenaga penjualan. Keadaan ini terjadi di Surakarta maupun Tangerang. Di Surakarta, sebanyak 50 persen responden bekerja di luar rumah sebagai pekerja kasar dan 26 persen sebagai tenaga usaha jasa dan penjualan, sedang di Tangerang masing-masing 50,9 persen dan 37 persen. Mereka yang bekerja di luar rumah umumnya berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas non pertanian. Pekerjaan berjualan di luar rumah, seperti di pasar, di tempat menetap dan berkeliling, kebanyakan dilakukan sendiri meskipun persiapan berjualan kadang dibantu oleh anggota keluarga, seperti pada pedagang makanan. Hal ini terjadi baik di Surakarta maupun Tangerang.

Tabel 3.3
Distribusi Pekerja Sektor Informal Menurut Tempat Bekerja
Jenis dan Status Pekerjaan

Jenis dan Status Pekerjaan	Solo				Tangerang			
	Rumah	Luar rumah	Tempat tidak tetap	N	Rumah	Luar Rumah	Tempat tidak tetap	N
Jenis Pekerjaan								
Pejabat	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenaga Profesional	1	0	0	1	0	0	1	1
Tenaga Teknisis	1	0	0	1	0	0	0	0
Tenaga Tata usaha	0	0	0	0	0	1	1	2
Tenaga usaha jasa (penjaga toko dan pasar)	21	17	9	47	30	21	4	55
Tenaga Usaha pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenaga Pengolahan	20	9	1	30	14	4	1	19
Operator	7	4	0	11	0	2	7	9
Pekerja kasar	14	32	13	59	10	29	28	67
Anggota TNI/Keamanan	0	2	0	2	0	0	0	0
Jumlah	64 (42%)	64 (42%)	24 (16%)	152 (100%)	54 (35%)	57 (37%)	42 (27%)	153 (100%)
Status Pekerjaan	Rumah	Luar rumah	Tempat tidak tetap	N	Rumah	Luar Rumah	Tempat tidak tetap	N
Berusaha sendiri	25	21	18	64	43	21	37	101
Berusaha dibantu dg buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	4	9	3	16	9	11	0	20
Berusaha dibantu dengan buruh tetap/dibayar	0	0	0	0	0	0	0	0
Buruh	14	13	0	27	0	8	1	9
Pekerja bebas di pertanian	1	0	1	2	0	0	0	0

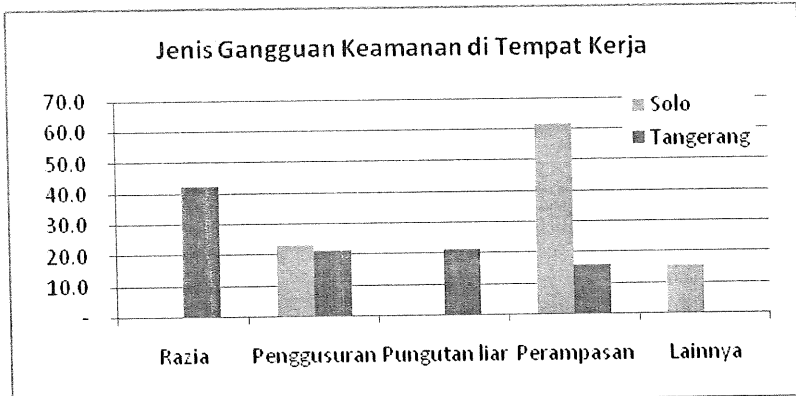
Pekerja bebas di non pertanian	20	21	2	43	2	17	3	22
Pekerja tidak dibayar	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah	64 (42%)	64 (42%)	24 (16%)	152 (100%)	54 (35%)	57 (37%)	42 (27%)	153 (100%)

Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Gangguan Keamanan di Tempat Kerja

Berdasarkan hasil survei, proporsi gangguan pekerja di tempat kerja relatif besar di Tangerang (12,4 persen) dibanding di Surakarta (8,6 persen). Kota Tangerang memiliki jenis gangguan keamanan tempat kerja lebih beragam daripada kota Surakarta, yaitu razia, pengutan liar, penggusuran dan perampasan. Sementara di kota Surakarta, mayoritas jenis gangguan keamanan di tempat kerja adalah perampasan dan penggusuran. Hal ini diduga terkait dengan kondisi yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Di kota Surakarta, pemda setempat memfokuskan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi kerakyatan yang *pro job*, seperti penataan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. PKL hanya boleh berjualan di lokasi yang memang diperuntukkan sehingga hal ini dapat mengurangi pelanggaran dan menghindari tindakan penggusuran oleh aparat yang berwenang. Sementara di Tangerang, program penanggulangan kemiskinan difokuskan pada program pembangunan sosial masyarakat melalui bantuan modal dan jaminan sosial, seperti bantuan modal bagi usaha kecil, jaminan kesehatan gratis dan bantuan pendidikan. Sementara penataan ekonomi informal, terutama penataan PKL belum dilakukan secara optimal sehingga berpeluang terjadinya pelanggaran dan ketidakteraturan lokasi PKL berjualan. Sebagai dampaknya, berbagai tindakan, seperti penggusuran masih sering terjadi.

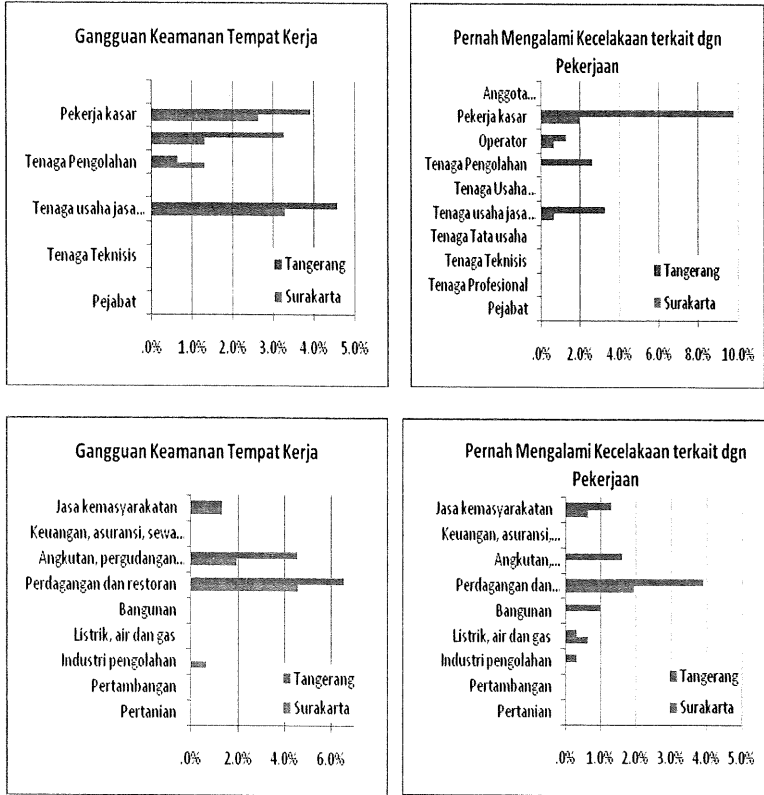
Gambar 3.4
Distribusi Responden menurut Jenis Gangguan Keamanan di Tempat Kerja di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011



Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Berdasarkan lapangan pekerjaan, gangguan keamanan sering dialami oleh mereka yang bekerja di sektor perdagangan dan restoran, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi. Pekerjaan pada sektor tersebut umumnya dilakukan di luar rumah dan pada lokasi yang banyak dikunjungi orang sehingga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami gangguan keamanan. Mereka umumnya adalah tenaga kasar, tenaga usaha jasa dan penjualan serta tenaga operator dan mayoritas adalah berusaha sendiri (Gambar 3.4). Kecenderungan ini terjadi baik di Surakarta maupun di Tangerang, namun secara proporsi di Tangerang proporsinya jauh lebih besar dibandingkan Surakarta. Hal ini mencerminkan kondisi lingkungan kerja masih belum kondusif untuk menjamin keamanan kerja terutama bagi pekerja ekonomi informal di Kota Tangerang.

Gambar 3.5
Distribusi Responden yang Mengalami Gangguan Keamanan Tempat Kerja dan Pernah Mengalami Kecelakaan Menurut Lapangan, Jenis, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011



Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Perlindungan kerja juga dapat diketahui dari kejadian kecelakaan yang dialami oleh pekerja. Dalam hal ini seringkali terjadi kecelakaan kerja mencerminkan minimnya perlindungan dalam bekerja. Berdasarkan pengalaman kecelakaan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, proporsi pekerja ekonomi informal yang

pernah mengalami kecelakaan di kota Surakarta mencapai 21,1 persen lebih besar daripada kota Tangerang (17,0 persen). Dari sejumlah pekerja tersebut, lebih dari dua pertiganya mengalami kecelakaan terkait dengan kecelakaan pekerjaan atau kecelakaan yang terjadi pada proses produksi baik di kota Surakarta dan Tangerang. Proporsi terbesar pekerja informal yang pernah mengalami kecelakaan adalah pekerja kasar, diikuti tenaga usaha dan jasa atau tenaga pengolahan. Kondisi ini lebih menonjol terjadi di kota Tangerang dibanding di kota Surakarta. Kota Tangerang sebagai satelit Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan sarana transportasi menjadi bagian sangat penting bagi penduduk dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Ketidakteraturan pengguna jalan serta banyaknya pelanggaran lalu lintas berpeluang terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan dapat terjadi pada saat pergi ke pasar/ tempat berjualan lainnya atau pada saat menjalankan pekerjaan sebagai sopir angkutan atau tukang becak/ojek. Data di atas mencerminkan bahwa perlindungan kerja pekerja ekonomi informal di kota Tangerang masih kurang dilihat dari kecelakaan kerja yang pernah dialami pada saat bekerja.

Dari kedua indikator tersebut, pekerja usaha jasa dan penjualan dan pekerja kasar relatif minim terhadap perlindungan kerja. Umumnya mereka bekerja di sektor perdagangan dan restoran, angkutan, pergudangan dan komunikasi dan jasa kemasyarakatan. Di kota Tangerang mereka yang berusaha sendiri memiliki perlindungan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan di kota Surakarta. Kondisi lingkungan kerja serta kebijakan pemerintah yang belum *pro job* berpengaruh pada rendahnya perolehan hak atas perlindungan kerja oleh pekerja ekonomi informal di kota Tangerang.

Jaminan dan Asuransi

Salah satu indikator lainnya yang mencerminkan perlindungan tenaga kerja, adalah jaminan sosial yang diperoleh pekerja informal. Dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) dinyatakan bahwa setiap pekerja baik yang berada di ekonomi formal maupun informal berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Berkaitan dengan adanya resiko pekerjaan dan kecelakaan kerja maka pada umumnya tenaga kerja memerlukan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan sebagainya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian resiko sosial ekonomi melalui berbagai program antara lain, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.⁴ Dalam implementasinya sistem Jamsostek lebih banyak diterapkan pada sektor formal, meskipun akhir-akhir ini mulai digalakkan bagi pekerja ekonomi informal.

Hingga saat ini pemerintah telah melaksanakan beberapa program jaminan sosial ekonomi seperti jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan. Pemerintah kota Tangerang memberi kartu Multiguna sebagai jaminan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi kelompok miskin. Sementara di kota Surakarta, jaminan kesehatan diberikan melalui Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Program tersebut diperuntukkan bagi penduduk miskin, termasuk pekerja ekonomi informal.

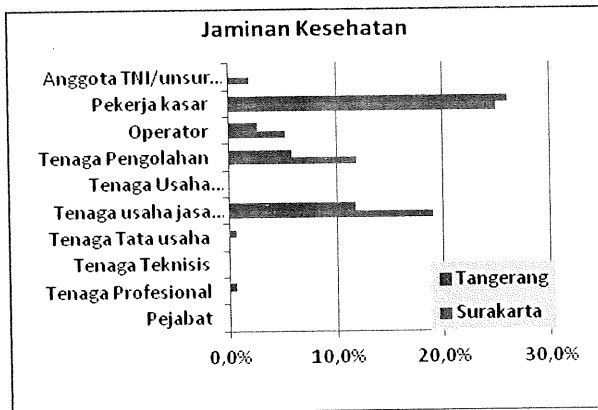
Hasil survei menunjukkan bahwa, mayoritas pekerja informal di kota Surakarta (63 persen) memperoleh jaminan kesehatan dan di kota Tangerang persentasenya lebih kecil (48 persen). Jangkauan jaminan kesehatan di kota Surakarta lebih luas dibanding di kota Tangerang. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sasaran pemegang kartu jaminan kesehatan. Di kota Tangerang, masyarakat miskin dapat memiliki dua kartu jaminan kesehatan (Jamkesmas dan Multiguna) dalam waktu yang bersamaan, meskipun hanya bisa menggunakan salah satunya saja. Hal ini dapat mempersempit jangkauan distribusi kartu jaminan kesehatan pada masyarakat miskin lainnya karena mereka yang memiliki dua kartu jaminan kesehatan mengurangi kesempatan bagi masyarakat

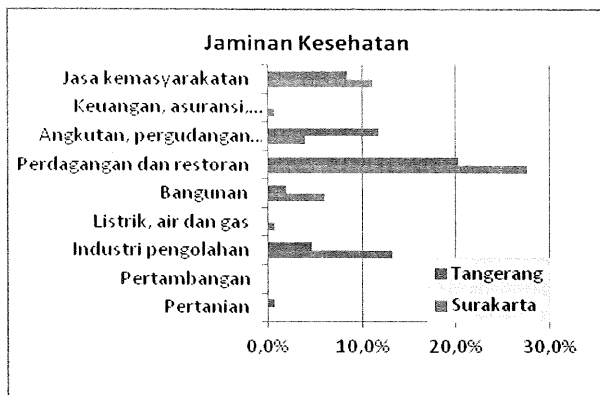
⁴ (<http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=3&id=15>).

lain untuk mendapatkan jaminan kesehatan (Jamkesmas atau Multiguna). Sementara di Surakarta, sasaran pemegang kartu PKMS adalah mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain, seperti Jamkesmas, Askes atau lainnya, sehingga tidak ada kepemilikan ganda kartu jaminan kesehatan. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan di kota Surakarta lebih banyak dibandingkan di kota Tangerang

Selanjutnya jika dilihat dari jenis, lapangan dan status pekerjaannya, proporsi terbesar pekerja informal yang memperoleh jaminan kesehatan adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja kasar. Kebanyakan mereka bekerja di sektor perdagangan dan restoran dan berstatus berusaha sendiri untuk kedua lokasi penelitian (Lihat gambar 3.6). Berdasarkan sasaran jaminan kesehatan yaitu penduduk miskin, hal ini mengindikasikan bahwa pekerja ekonomi informal terutama pekerja kasar relatif lebih miskin dibandingkan pekerja dengan jenis pekerjaan lainnya.

Gambar 3.6
Distribusi Responden yang Memperoleh Jaminan Kesehatan Menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011





Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Hasil survei dalam studi ini menemukan bahwa persentase pekerja yang memperoleh jaminan kecelakaan kerja sangat rendah, yaitu 1,99 persen di kota Surakarta dan 0,66 persen di kota Tangerang. Jaminan kecelakaan kerja umumnya dimiliki oleh pekerja yang bekerja sebagai tenaga operator pada sektor listrik air dan gas atau sektor keuangan. Kecilnya persentase tersebut tidak sebanding dengan persentase pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mencapai lebih 15 persen dan umumnya sebagai pekerja kasar. Hal yang sama juga terlihat dari persentase pekerja yang memperoleh jaminan kematian kurang dari 1 persen di kedua lokasi penelitian. Perbedaan yang cukup besar antara proporsi pekerja yang memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan proporsi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mengindikasikan lemahnya perlindungan pekerja dilihat dari keselamatan pekerja yang bekerja di ekonomi informal, baik di kota Surakarta maupun Tangerang.

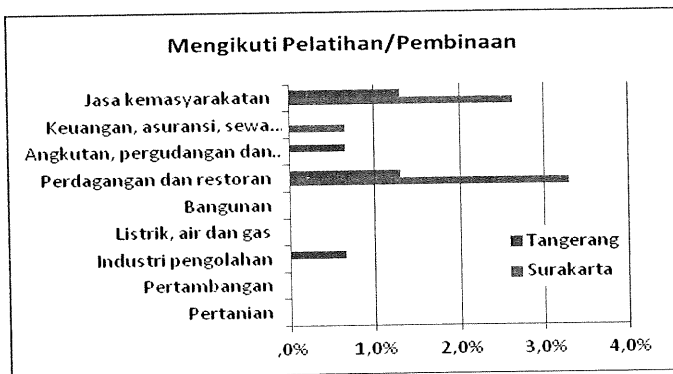
3.5. Pemberdayaan Pekerja

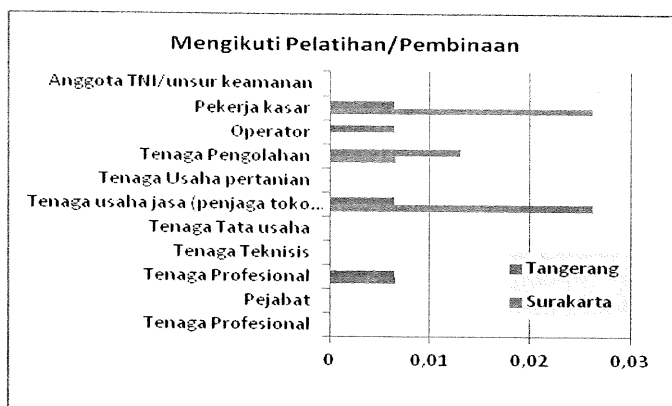
Pemberdayaan pekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian pekerjaan layak. Pemberdayaan merupakan upaya pekerja agar mampu meningkatkan kesejahteraan

menuju pencapaian pekerjaan yang lebih layak. Dalam studi ini, pemberdayaan dilihat dari keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan, bantuan kredit atau pinjaman modal, dan keterlibatan dalam organisasi profesi.

Berdasarkan hasil survei dalam studi ini dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi pekerja di kedua lokasi penelitian (Kota Surakarta dan Tangerang) terhadap kegiatan pembinaan pelatihan dan ketrampilan selama satu tahun terakhir relatif rendah, yaitu kurang dari 10 persen (kota Surakarta = 6,6 persen dan kota Tangerang = 3,9 persen). Mayoritas penyelenggara kegiatan pembinaan pelatihan dan pembinaan tersebut adalah pemerintah daerah, yaitu di kota Surakarta sebesar 50 persen dan kota Tangerang sebesar 83 persen. Kegiatan pelatihan dan pembinaan di Surakarta juga melibatkan pihak LSM dan lainnya sebagai penyelenggara sehingga lebih beragam dibanding di kota Tangerang. Meskipun pekerja yang memperoleh pembinaan tersebut terbatas namun memberikan manfaat positif bagi kehidupan pekerja.

Gambar 3.7
Distribusi Responden yang Mengikuti Pelatihan/Pembinaan Menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011





Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Pelatihan/pembinaan keterampilan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pelatihan dan pembinaan dapat dilakukan oleh pemerintah setempat atau pihak non pemerintah seperti perusahaan atau LSM. Berdasarkan hasil survei, pekerja informal yang memperoleh pembinaan pelatihan dan ketrampilan relatif sedikit (kurang dari 5 persen) di Surakarta maupun Tangerang (Gambar 5.7). Rendahnya partisipasi pekerja informal dalam pelatihan menunjukkan masih sangat terbatasnya akses pekerja informal untuk memperoleh informasi terkait dengan pelatihan dan ketrampilan pekerja. Di samping itu, kurangnya program pembinaan dan pelatihan yang dapat diikuti juga menjadi penyebab rendahnya keikutsertaan pekerja informal dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan. Kebanyakan peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan adalah tenaga penjualan dan pekerja kasar (Kota Surakarta), dan tenaga industri pengolahan (Kota Tangerang), dengan status berusaha sendiri. Karakteristik pekerjaan tersebut mencerminkan sasaran pembinaan dan pelatihan adalah tenaga kerja yang siap mengembangkan usaha. Program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti oleh Dinas Ketenagakerjaan, Kopeasi dan UMKM, dan Perindustrian dan Perdagangan cenderung bersifat sektoral sehingga cakupan peserta menjadi sangat terbatas.

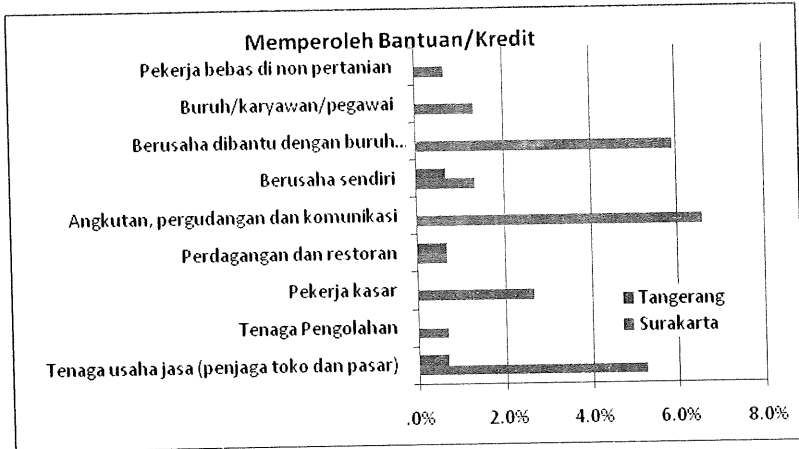
Bantuan Kredit Usaha/Pinjaman Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam meningkatkan kapasitas produksi. Kemudahan memperoleh kredit atau pinjaman modal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kelayakan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil survei, di kota Tangerang persentase pekerja yang pernah mendapatkan bantuan permodalan (kredit usaha) selama satu tahun terakhir sangat rendah, yaitu kurang dari 1 persen. Sedangkan di kota Surakarta persentase pekerja yang memperoleh bantuan permodalan relatif lebih besar, yaitu mencapai 8,5 persen. Di kota Surakarta bantuan modal yang diperoleh pekerja informal berasal dari berbagai sumber, yaitu perbankan (15,38 persen) dan Lembaga keuangan lainnya (38,46 persen) dan instansi pemerintah (46,1 persen). Sedangkan di kota Tangerang, mayoritas sumber bantuan tersebut diperoleh dari instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja informal di kota Surakarta mempunyai sumber modal yang lebih bervariasi dibandingkan Tangerang. Selain itu, program kebijakan pemerintah Kota Surakarta yang mengutamakan ekonomi kerakyatan, memberi kemudahan bagi pekerja informal untuk mendapatkan akses pada sumber permodalan.

Sebagai contoh, pemerintah memberi bantuan modal bagi Koperasi Pasar Notoharjo untuk digulirkan pada anggota koperasi yang sebagian besar adalah pedagang pasar. Selanjutnya koperasi memberi kemudahan bagi pedagang pasar dalam memperoleh bantuan kredit usaha. Pemerintah kota Surakarta juga memberi bantuan modal untuk penguatan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui RT/RW dengan memanfaatkan dana cukai rokok dan APBD. Program bantuan permodalan tersebut sejalan dengan program pemerintahan kota Surakarta yang mengutamakan ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari karakteristik pekerja, mayoritas pekerja di kota Surakarta yang memperoleh bantuan permodalan adalah tenaga usaha jasa dan pekerja kasar, yang bergerak di sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi dengan status berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap/tidak dibayar. Sedangkan di kota Tangerang, bantuan permodalan diperoleh pekerja tenaga usaha jasa yang bergerak di sektor perdagangan dan restoran dengan status berusaha sendiri (Gambar 3.8). Di Surakarta, program bantuan modal diberikan kepada masyarakat miskin yang masuk dalam kriteria miskin berdasarkan 24 indikator kemiskinan yang dikembangkan sesuai karakteristik lokal masyarakat Surakarta. Penggunaan data kemiskinan lokal tersebut oleh program-program pengurangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran karena tidak memandang jenis pekerjaannya. Sementara di Tangerang, penggunaan data kemiskinan didasarkan pada 12 indikator BPS dalam menentukan sasaran penerima program bantuan modal. Di samping itu, pemilihan sasaran program menggunakan 'kriteria klasik' masih dipakai, yaitu mereka memiliki usaha yang kelihatan fisiknya, seperti pedagang, dan memiliki kemampuan untuk menjamin kontinuitas pendapatan setiap hari untuk pengembalian cicilan. Dalam hal ini, masyarakat yang bekerja secara serabutan, seperti tenaga usaha jasa dan pekerja kasar yang tidak memiliki kepastian pendapatan, sering luput dari sasaran program. Adanya perbedaan karakteristik pekerja yang memperoleh bantuan permodalan tersebut mencerminkan perbedaan sasaran dan skala pengembangan usaha. Sasaran penerima bantuan di kota Surakarta relatif lebih luas dibanding kota Tangerang.

Gambar 3.8
Distribusi Responden yang Memperoleh Bantuan/Kredit menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011

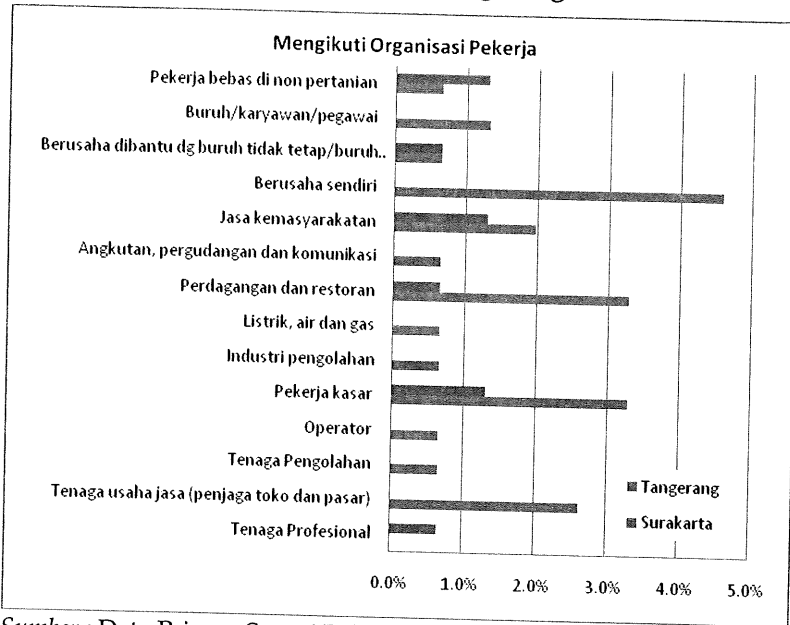


Sumber: Diolah dari data primer survei pekerjaan layak, LIPI (2011)

Keterlibatan Organisasi

Keterlibatan dalam organisasi merupakan salah satu indikasi untuk melihat kelayakan suatu pekerjaan. Keterlibatan dalam organisasi pekerjaan menunjukkan adanya dialog sosial antar pekerja dalam suatu unit pekerjaan. Berdasarkan hasil survei, keterlibatan pekerja informal dalam organisasi relatif masih rendah. Proporsinya kurang dari 10 persen, yaitu 7,24 persen di kota Surakarta dan hanya 1.96 persen di kota Tangerang. Di kota Surakarta, pekerja informal yang terlibat dalam organisasi pekerja kebanyakan bekerja di sektor ekonomi perdagangan dan restoran. Sedangkan di kota Tangerang, kebanyakan bekerja di sektor jasa kemasyarakatan.

Gambar 3.9
Distribusi Responden yang menjadi anggota organisasi pekerja menurut Jenis, Lapangan, dan Status Pekerjaan di Kota Surakarta dan Tangerang, 2011



Sumber : Data Primer, Survei Pekerjaan Layak, 2011

Rendahnya keterlibatan pekerja informal dalam organisasi profesi salah satunya disebabkan oleh tidak semua unit kerja tempat bekerja memiliki organisasi. Kegiatan informal yang bersifat tradisional, yaitu tidak memiliki struktur, biasanya bersifat musiman, pertemanan atau relasi personal (BPS dalam ILO 2009). Hal tersebut menyebabkan mereka sulit untuk membentuk organisasi pekerja. Meskipun pekerja yang terlibat dalam organisasi pekerjaan sangat terbatas, namun hampir semua responden menyatakan bahwa organisasi tersebut bermanfaat bagi kegiatan ekonomi. Beberapa manfaat yang dirasakan adalah dalam hal permodalan, perlindungan dan berbagi pekerjaan.

3.6. Penutup

Pekerjaan di ekonomi informal masih menjadi andalan bagi sebagian besar penduduk di Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Seperti diketahui bersama, di daerah perkotaan kesempatan kerja ekonomi informal tersedia dengan banyak variasi kegiatan ekonomi, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan pencari kerja untuk datang ke kota.

Struktur pekerjaan ekonomi informal di kota Surakarta dan Tangerang ditandai oleh dominasi sektor perdagangan dan restoran dan sektor jasa kemasyarakatan dalam menyediakan kesempatan kerja. Hampir separuh tenaga kerja informal terserap di sektor perdagangan dan restoran. Jenis pekerjaan tersebut antara lain usaha perdagangan skala kecil, seperti berjualan di warung, berdagang keliling, berdagang kaki lima, dan berdagang di pasar setempat. Perempuan lebih banyak terlibat pekerjaan di sektor perdagangan, seperti berjualan di warung rumah atau di pasar setempat. Kondisi ini banyak dijumpai di kalangan pekerja informal di kota Tangerang, yaitu lebih dua pertiga pekerja perempuan bekerja di sektor perdagangan. Sementara di Surakarta, selain sektor perdagangan, perempuan banyak terlibat pada pekerjaan di sektor industri pengolahan, khususnya industri rumah tangga.

Menurut jenis pekerjaannya, pekerja informal perkotaan lebih menonjol bekerja sebagai tenaga penjualan dan pekerja kasar. Selain kedua jenis pekerjaan tersebut, bekerja sebagai tenaga usaha industri pengolahan juga banyak dilakukan di Surakarta. Perempuan umumnya banyak terserap di sektor jasa penjualan (penjual sembako dan penjaga toko), sementara laki-laki umumnya terserap di sektor industri yang bersifat pekerjaan kasar. Kecenderungan ini terlihat baik di kota Surakarta maupun Tangerang. Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaan, mayoritas pekerja informal perkotaan berstatus berusaha sendiri. Proporsi pekerja informal dengan status berusaha sendiri banyak ditemukan di kota Tangerang (hampir 60 persen). Sementara di Surakarta, status pekerja

informal bervariasi yaitu berusaha sendiri dan pekerja bebas non pertanian, masing-masing sepertiga dari total pekerja informal. Hal ini mencerminkan banyaknya variasi pekerjaan di Surakarta. Pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga relatif kecil proporsinya bahkan di Surakarta semua pekerja informal bekerja mendapat upah. Hal ini mencerminkan bahwa kesempatan kerja yang menghasilkan pendapatan terbuka di sektor informal. Namun permasalahannya seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sektor informal tersebut dan apakah dapat mencukupi kebutuhan hidup layak mereka.

Meskipun ekonomi informal mampu menyerap banyak tenaga kerja cukup banyak, namun tidak demikian dengan sumbangannya terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Pendapatan pekerja ekonomi informal pada kedua lokasi penelitian lebih rendah dari UMR. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja informal perkotaan. Sementara jam kerja rata-rata para pekerja ekonomi informal cukup panjang, yaitu 52 jam per minggu di Surakarta dan 52,7 jam per minggu di Tangerang. Jam kerja panjang terutama dilakukan oleh tenaga penjualan pada kedua lokasi penelitian. Jam kerja panjang dengan pendapatan rendah mencerminkan tingkat produktivitas pekerja informal relatif rendah.

Perlindungan dan pemberdayaan pekerja informal masih rendah, terlihat dari adanya gangguan keamanan seperti razia, penggusuran, pungutan liar dan perampasan yang dialami sebagian pekerja ekonomi informal. Gangguan keamanan dan kecelakaan kerja cukup banyak dialami oleh tenaga usaha penjualan dan pekerja kasar yang umumnya bekerja di luar rumah. Kecenderungan ini terjadi baik di Surakarta dan Tangerang tetapi secara proporsi di Tangerang lebih besar. Selanjutnya jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah cukup memberi perlindungan bagi pekerja informal perkotaan. Pemerintah Kota Tangerang memberi kartu Multiguna dan pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) sebagai jamin-

an kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemberian kartu jaminan kesehatan cukup bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Pemberdayaan pekerja ekonomi informal masih rendah, terlihat dari rendahnya partisipasi pekerja informal dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan, rendahnya jumlah pekerja informal mendapatkan bantuan modal, serta rendahnya keterlibatan dalam organisasi pekerjaan. Minimnya pemberdayaan terhadap pekerja ekonomi informal disebabkan kurangnya akses mereka untuk mendapat pemberdayaan di samping karena program pemberdayaan lebih banyak diberikan pada sektor formal. Secara umum, pekerjaan ekonomi informal masih jauh dari kondisi pekerjaan yang layak. Hal ini menjadi tantangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia untuk memperbaiki kondisi pekerjaan ekonomi informal menuju pencapaian pekerjaan layak.

Daftar Pustaka

- Daliyo, 2009. *Relevansi Penelitian Ketenagakerjaan dengan Pembangunan*, Jakarta, LIPI Press.
- Ehrenberg, Ronald G dan Robert S Smith, 1997, *Modern Labor Economics: Theory and Publik Policy*, Six Edition, Addison-Wesley.
- Firnandi, (tanpa tahun). *Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan Ke Depan*, Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisa Ekonomi, dalam http://old.bappenas.go.id/index.php?module=FileManager&func=download&path=ContentExpress/&view=85/Studi-Pekerja_Acc.pdf
- ILO (2010), *Keterbatasan Pembuatan Kebijakan Ekonomi Informal Indonesia Pelajaran Dekade ini*, Satish C. Mishra, Strategic Asia Indonesia, ILO 2010
- ILO, 2011. *Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia*.
- Kemenakertrans, RI. 2003. *UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Kemenakertrans, RI. 2003. *UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*.

- Melvyn Evans dan Stephen Syrett, (2006), *Informal Economic Activities and Deprived Neighbourhoods*, Centre for Enterprise and Economic
- Simanjuntak, P. J.1983. *Produktivitas Kerja: Pengertian Ruang dan Lingkupnya*. Prisma No. 11. LP3ES. Jakarta.
- Soewartoyo, dkk (2011), *Pekerja Sektor Informal Dalam Usaha Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja: Kajian di Kota Yogyakarta*, Percetakan Galang Press.
- Widarti, Diah. 2007. *Kajian Tentang indikator Kerja yang Layak di Indonesia*, ILO.

BAB IV

PEKERJAAN LAYAK PEKERJA EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN

Oleh: Endang Sri Soesilowati

4.1. Pendahuluan

Pekerjaan layak (*decent work*) seperti telah dikemukakan pada awal tulisan buku ini, merupakan konsep yang luas mencakup beberapa hal berikut: peluang kerja yang produktif dan menghasilkan upah yang adil; memberi keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga mereka; menawarkan prospek pengembangan diri, mendorong integrasi sosial; memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bernegosiasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; serta menjamin adanya kesempatan dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Dalam penerapannya pekerjaan layak merupakan target yang terus berkembang, dan berubah-ubah yang mencerminkan berbagai situasi nasional dan lokal (daerah). Hal ini menunjukkan adanya berbagai tingkat pembangunan dan kapasitas nasional dan lokal, yang sifatnya terpadu, seimbang dan tidak dapat dikompromikan. Pencapaian pekerjaan yang layak mengkombinasikan aspirasi/persepsi individu dan masyarakat (*rights based approach*) dan kebijakan (*knowledge best approach*) ke dalam 4 pilar dasar pekerjaan layak (kesempatan kerja, hak pekerja, perlindungan sosial, dan dialog sosial) sehingga didapatkan sinergi yang optimal antarpilar-pilar tersebut.

Secara teoretis, indikator *decent work* akan sangat membantu dalam menguji pencapaian tujuan dari pelaksanaan *decent work* sepanjang waktu. Masalahnya ialah perbedaan antarnegara cukup besar dalam kemajuan maupun karakter pekerjaannya (industri, pertanian, atau jasa). Perbedaan akan semakin besar bila dioperasikan di wilayah yang lebih kecil, baik masalah ketersediaan data maupun sifat dan karakteristik pekerjaannya. Menurut Anker (2002), idealnya konsep dan indikator untuk pemantauan pelaksanaan “pekerjaan layak” dapat dioperasikan di tingkat internasional, nasional, atau regional, bahkan untuk tingkat mikro (individu/rumah tangga). Namun, banyak faktor yang berpengaruh sehingga permasalahan semakin besar ketika diterapkan di tingkat mikro (tingkat komunitas/rumah tangga). Terlebih lagi untuk diterapkan pada individu yang bekerja di ekonomi informal, oleh karena indikator pekerjaan layak cenderung bias formal. Bahkan bagi pekerja di ekonomi formal pun beberapa indikator tersebut masih dipertanyakan, terutama indikator kelayakan dari dimensi perlindungan sosial dan dialog sosial.

Berbagai kelemahan konsep dan indikator *decent work* yang dikemukakan ILO menyebabkan tidak semua indikator tersebut dapat dioperasikan di negara berkembang, termasuk Indonesia, baik karena ketersediaan data statistik maupun sifat pekerjaan yang jauh berbeda dengan pekerjaan di negara maju. Indikator *decent work*, menurut konsep ILO akan bermakna apabila dapat mengukur kelayakan pekerjaan secara objektif. Untuk itu, diperlukan ketersediaan data statistik dalam mengukur kelayakan pekerjaan.

Uji kesahihan indikator *decent work* yang dilakukan di beberapa daerah, termasuk di Bandung oleh Litbang Kemenakertrans, menemukan hanya sebagian indikator yang bersifat operasional di daerah kajian karena faktor ketersediaan data statistik di daerah tersebut. Sebagai contoh, hasil uji kesahihan indikator ILO di Kota Bandung menunjukkan bahwa hanya 12 indikator yang dianggap sah dalam arti tersedia data statistik dan dipublikasikan. Sele-

bihnya, termasuk cukup sah atau bahkan kurang sah, karena tidak tersedia data publikasi (Litbang Kemenakertrans 2007: 61). Penentuan indikator pekerjaan layak, tentunya tidak hanya melalui pengujian atas ketersediaan data statistik yang bersifat kuantitatif, tetapi juga diperlukan penilaian individu. Penilaian ini dimaksudkan untuk memahami aplikasi indikator pekerjaan layak di sektor informal serta mengetahui sensitivitas indikator pekerjaan layak menurut penilaian para pekerja. Salah satu cara yang digunakan, dapat dilakukan melalui tinjauan terhadap aspirasi individu, yang dalam hal ini juga merupakan pengukuran indikator secara kualitatif.

Bagian tulisan ini akan mengupas khususnya mengenai pekerjaan layak dari aspirasi/persepsi individu/masyarakat serta aplikasi indikator pekerjaan layak bagi pekerja informal di perkotaan. Pengukuran indikator beserta aplikasinya dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengisian kuesioner terstruktur baik dalam bentuk pilihan ganda maupun skala rating (*Likert*) yang juga didukung oleh hasil wawancara mendalam serta observasi di kota Surakarta dan Tangerang.

4.2. Tingkat Kelayakan Pekerjaan Utama Pekerja Informal Perkotaan

Jenis pekerjaan sektor ekonomi informal yang digeluti responden di dua lokasi penelitian (Surakarta dan Tangerang) sangat bervariasi. Di Surakarta, beberapa jenis pekerjaan dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lokasi penelitian yaitu sebagai pedagang (asongan, barang rongsokan, warungan), buruh lepas, jumbutan (makloon), tukang jahit, tukang pijat dan lain sebagainya. Pekerjaan sebagai pedagang makanan/minuman atau warung yang menjual kebutuhan sehari-hari di sekitar tempat tinggal atau di depan rumah lebih banyak dilakukan oleh penduduk di Kelurahan Sudiroprajan dan Kelurahan Semanggi - Kota Surakarta. Untuk Kota Tangerang, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh responden pekerja sektor informal adalah sebagai pekerja

kasar diikuti oleh tenaga usaha jasa dan penjualan, dan tenaga pengolahan. Dengan berbagai variasi jenis pekerjaan yang umumnya tidak tetap ini menarik untuk dikaji tingkat kelayakan pekerjaan tersebut menurut persepsi/ penilaian individu yang bersangkutan.

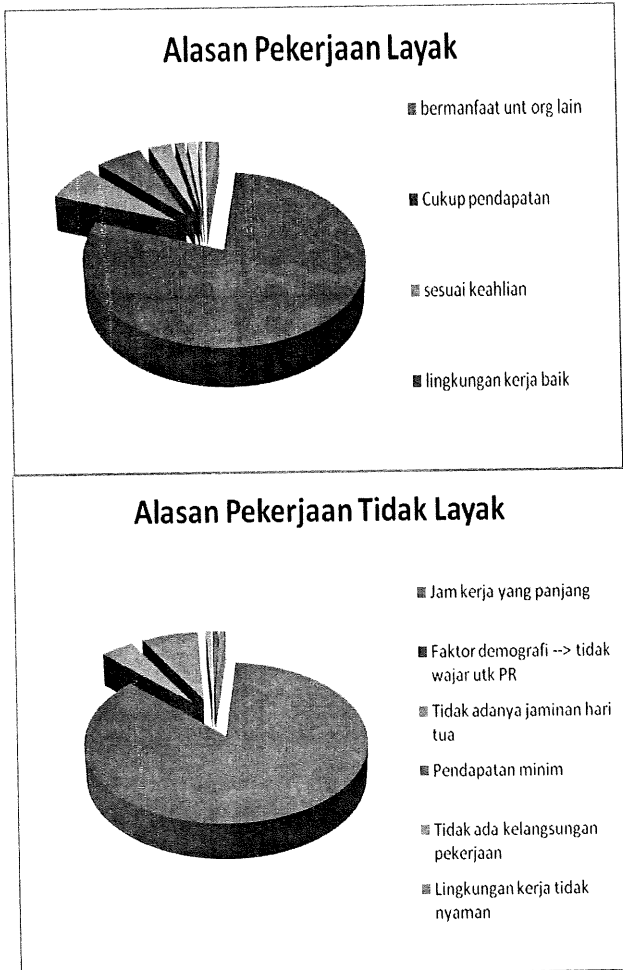
Berdasarkan penilaian atas kelayakan pekerjaan utama yang dimiliki oleh responden individu ternyata 53 persen menyatakan layak sedangkan sisanya (47 persen) menyatakan tidak layak. Mengapa mereka menilai pekerjaan yang mereka geluti saat ini layak atau tidak layak? Apa yang menjadi indikator kelayakan dari pekerjaan yang layak/tidak layak bagi responden pekerja informal di perkotaan? Ternyata, alasan yang dikemukakan oleh masing-masing responden atas kelayakan, maupun ketidak layakan pekerjaan yang mereka geluti (sial pekerjaan utama) sangat bervariasi, mulai dari alasan pendapatan, lingkungan kerja, kesempatan kerja, jam kerja, kesesuaian dengan keahlian yang dimiliki (tingkat pendidikan), jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Namun demikian, sangat menarik karena bagi mereka yang menyatakan layak dan juga yang menyatakan tidak layak cenderung mendasarkan pada alasan yang sama, yaitu tingkat pendapatan. Sebanyak 79 persen responden menyatakan pekerjaannya layak atas dasar cukupnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Demikian halnya dengan responden yang menyatakan pekerjaan mereka tidak layak, 86 persennya dikarenakan minimnya pendapatan yang mereka peroleh.

Berdasarkan hasil survei, rata-rata pendapatan pekerja sektor informal di Tangerang (Rp 1.117.098) lebih besar dibandingkan pekerja informal di Surakarta (Rp. 791565,79). Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata pendapatan laki-laki di Surakarta lebih besar dibandingkan perempuan, sebaliknya di Tangerang rata-rata pendapatan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Berdasarkan jenis pekerjaan, pendapatan terbesar diperoleh pekerja informal perkotaan yang diamati di Surakarta adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga teknisi (Rp. 3.000.000), diikuti oleh mereka

yang bekerja sebagai tenaga penjualan dan jasa (Rp. 932.979). Sementara di Tangerang pendapatan terbesar diperoleh mereka yang bekerja sebagai tenaga penjualan (Rp. 1.755.272). Temuan ini menunjukkan bahwa dari aspek pendapatan, pekerja informal perkotaan di Tangerang lebih layak dibandingkan dengan pekerja di Surakarta. Sementara, jenis kelamin pekerja tidak memberikan pengaruh perbedaan kelayakan pekerjaan yang berarti, dan lebih dipengaruhi oleh jenis pekerjaan itu sendiri. Pendapatan sebagai tenaga penjualan di sektor perdagangan kelihatannya cukup memberikan kesejahteraan. Dari data ini dapat diindikasikan bahwa pekerjaan berdagang merupakan jenis pekerjaan yang dinilai cukup layak oleh individu. Hasil tabulasi silang antar jenis pekerjaan dan lapangan usaha responden pekerja di ekonomi informal perkotaan terhadap tingkat kelayakan pekerjaan pun menunjukkan bahwa mayoritas (60 persen) pedagang menyatakan pekerjaan mereka layak. Pekerjaan sebagai pedagang baik di kota Tangerang maupun Surakarta nampaknya lebih mudah menghasilkan uang. Salah satu penjelasan yang diberikan, tentu saja karena tingginya kebutuhan konsumsi rumah tangga di perkotaan.

Sejalan dengan hal tersebut, lingkungan kerja menjadi alasan yang mengikuti kedua kelompok responden, masing-masing 11,94 persen dan 9,70 persen. Tentu saja lingkungan kerja yang nyaman dan baik diutarakan oleh pekerja yang menganggap pekerjaan utama yang sedang digelutinya layak, dan lingkungan kerja yang tidak baik dikemukakan oleh mereka yang menganggap pekerjaannya tidak layak (lihat Gambar 1). Mengacu pada temuan tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan merupakan indikator utama bahkan hampir satu-satunya indikator dalam menentukan kelayakan suatu pekerjaan bagi pekerja informal di perkotaan. Alasan bagi kelayakan atau ketidaklayakan suatu pekerjaan berikutnya lingkungan kerja, kesesuaian dengan keahlian, dan kesempatan kerja. Sementara itu, indikator-indikator lainnya kurang menjadi ukuran bagi kelayakan suatu pekerjaan utama yang mereka jalani saat ini.

Gambar 4.1
Layak atau Tidak Layaknya Pekerjaan Utama Responden
Berdasarkan Alasannya



Sumber: Diolah dari Data Primer Penelitian (2011).

Apakah memang hanya keempat hal tersebut di atas atau bahkan hanya kecukupan pendapatan yang berlaku sebagai indikator pengukuran kelayakan pekerjaan bagi pekerja informal di

perkotaan? Untuk menelusuri lebih jauh tentang indikator pekerjaan layak inilah, maka pengukuran aspirasi pekerja melalui pengukuran tingkat kepentingan dari beberapa indikator yang diajukan oleh ILO ditanyakan kepada responden pekerja informal perkotaan.

4.3. Aspirasi Terhadap Pekerjaan Layak

Mengapa penilaian aspirasi individu digunakan? Istilah aspirasi sering dikaitkan dengan berbagai dimensi kehidupan, seperti pendidikan/belajar, keluarga, konsep diri, pengembangan pribadi, kesehatan, pekerjaan, pengembangan karir. Aspirasi seseorang juga sering dianggap sebagai motivasi atau dorongan untuk mengejar cita-cita yang dimilikinya. "*Aspirations are the pool of individually constructed alternative dreams, hopes, and desires for one's future and are continually modified by both internal and external influences*" (Burnell, 2003: p1).⁵ Dalam tulisan ini, aspirasi tentang kelayakan pekerjaan, diukur melalui penilaian individu terhadap tingkat kepentingan dari 15 indikator pekerjaan layak. Semakin tinggi tingkat kepentingan dari indikator dimaksud, maka semakin tepat indikator tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kelayakan pekerjaan. Semakin tinggi keinginan pekerja untuk mendapatkan atau terpenuhinya indikator tersebut agar kelayakan pekerjaannya tercapai.

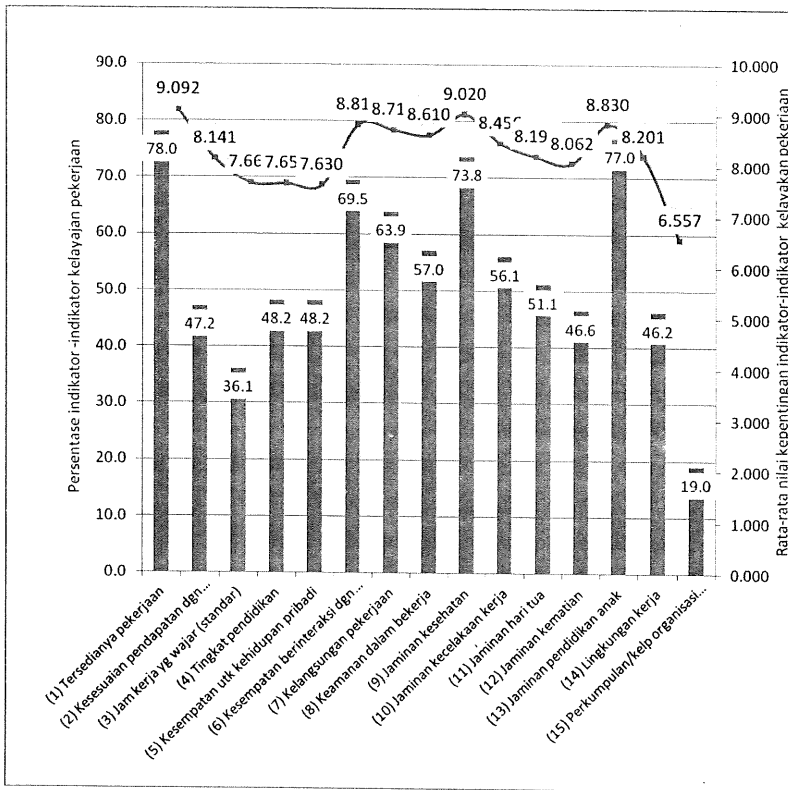
Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa dari empat elemen dasar komponen pekerjaan layak yang kemudian diturunkan ke dalam 15 indikator pilihan, ditemukan adanya dua (2) indikator turunan yang dinilai oleh responden dengan kriteria sangat penting (persentase dan nilai tengah sangat tinggi) dan satu indikator kurang penting (persentase dan nilai tengah rendah) terhadap kriteria pekerjaan layak. Kedua indikator terpenting adalah ketersediaan pekerjaan dan adanya jaminan kesehatan

⁵ "The Real World Aspirations of Work-Bound Rural Students". *Journal of Research in Rural Education*, Fall, 2003, Vol 18 No 23, 104-113

an. Sedangkan satu indikator yang dinilai sangat rendah tingkat kepentingannya terhadap prasyarat kelayakan suatu pekerjaan adalah keberadaan perkumpulan, paguyuban dan kelompok organisasi pekerja. Dari temuan ini dapat diartikan bahwa ketersediaan pekerjaan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pekerjaan layak. Adanya jaminan untuk kesehatan, merupakan indikator penting berikutnya terhadap kelayakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, dalam mencari pekerjaan, responden pada umumnya akan mencari pekerjaan yang selalu tersedia, dan yang dapat menjamin keperluan kesehatan mereka. Atau paling tidak, kedua indikator tersebut merupakan hal yang paling diinginkan oleh responden dalam pekerjaannya, agar pekerjaan tersebut dapat dikatakan layak.

Temuan ini menarik, karena nampaknya agak berbeda dengan temuan yang dijangring melalui alasan layak/tidak layaknya pekerjaan utama yang dimiliki responden pekerja ekonomi informal di perkotaan ini. Mengapa indikator kesesuaian tingkat pendapatan bukan merupakan hal yang sangat penting bagi ukuran pekerjaan layak? Padahal ukuran kecukupan tingkat pendapatan dikemukakan oleh mayoritas responden sebagai alasan bagi kelayakan atau ketidak-layakan pekerjaan utama mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi harapan responden pekerja informal di perkotaan tidak selalu sama dengan kenyataan yang dimilikinya. Sangat pentingnya ketersediaan pekerjaan bagi kelayakan suatu pekerjaan menjadi angan-angan bagi pekerja informal di perkotaan, sangatlah mudah dipahami. Pekerjaan informal merupakan pekerjaan yang tidak tetap walaupun mudah dimasuki. Tentu saja ketersediaan pekerjaan menjadi hal yang paling dituntut oleh pekerja di ekonomi informal perkotaan ini dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Namun demikian, pekerjaan yang sekarang mereka geluti sudah dianggap layak, karena mereka merasa memperoleh tingkat pendapatan yang memadai.

Gambar 4.2.
Aspirasi Terhadap Kelayakan Suatu Pekerjaan



Sumber: Diolah dari Data Primer Penelitian (2011).

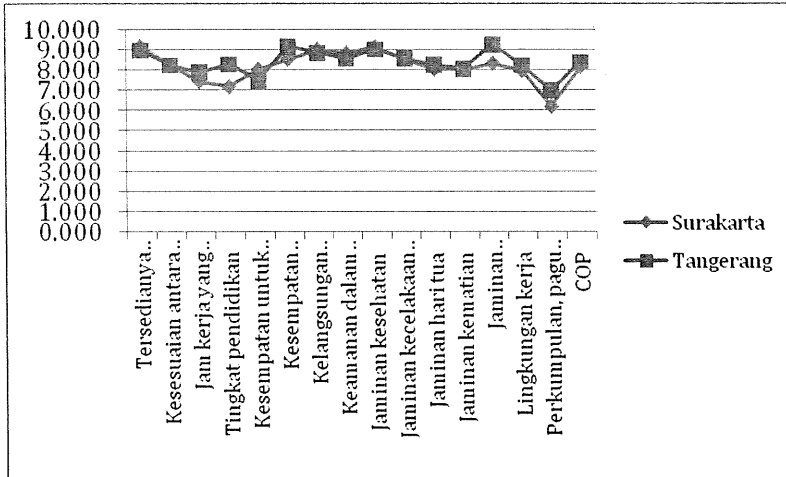
Selanjutnya, menarik untuk diperbandingkan tingkat kepentingan pekerjaan layak bagi kedua daerah yang diamati. Dari hasil survei tentang tingkat kepentingan 15 indikator di atas, ternyata responden di Kabupaten Tangerang menunjukkan tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rerata responden di Kota Surakarta, yaitu 8,432 : 8,052. Kondisi ini dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu bahwa di satu sisi lebih tingginya nilai rerata responden di Tangerang menunjukkan semakin tingginya tingkat kepentingan indikator-indikator yang dimaksud menjadi acuan

dari suatu pekerjaan dianggap layak bagi mereka. Di lain sisi, hal ini menggambarkan bahwa kondisi pekerja di sektor informal di Kota Tangerang tidak sebaik di Kota Surakarta.

Walaupun tidak ada satupun indikator yang dianggap tidak penting, nampaknya responden di kedua daerah pengamatan sepakat bahwa adanya perkumpulan, paguyuban, dan asosiasi pekerja merupakan hal yang menjadi prioritas terakhir bagi kelayakan suatu pekerjaan. Namun demikian, kedua daerah tersebut memiliki tingkat prioritas terhadap indikator pekerjaan layak yang agak berbeda (lihat Gambar 3). Di Kota Surakarta, ketersediaan pekerjaan dan jaminan kesehatan, merupakan hal yang paling penting untuk kelayakan suatu pekerjaan, di Kota Tangerang ternyata jaminan pendidikan anak dan kesempatan atau pemanfaatan waktu luang untuk keluarga merupakan prioritas utama. Hal ini bukan suatu pertanda bahwa ketersediaan pekerjaan bagi responden di Kota Tangerang sudah lebih baik dari Kota Surakarta (karena ketersediaan pekerjaan juga memperoleh rerata tingkat kepentingan yang cukup tinggi di Tangerang). Hal ini dapat juga diartikan bahwa keterjaminan kelanjutan pendidikan bagi anak lebih dipentingkan atau sangat diharapkan bagi responden di Kota Tangerang, dikarenakan masih mahal biaya pendidikan di daerah yang bersangkutan, maupun adanya anggapan bahwa tingkat persaingan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki.

Gambar 4.3.

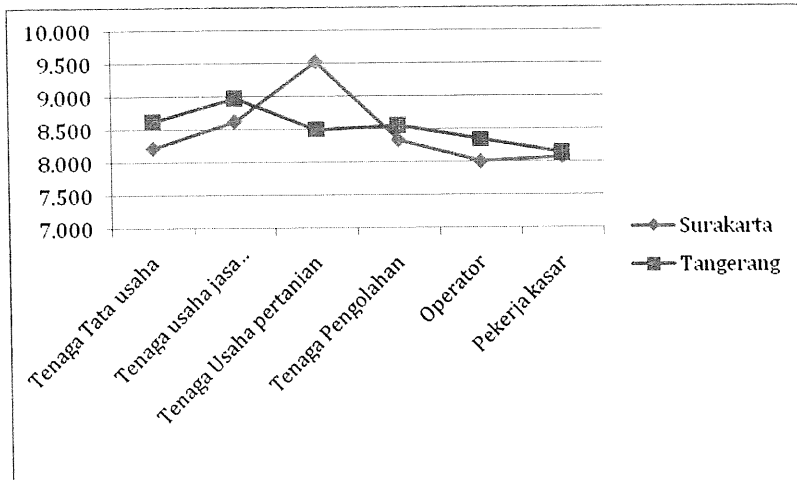
Nilai rata-rata tingkat kepentingan indikator pekerjaan layak



Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Selanjutnya, menarik untuk dilihat bagaimana halnya dengan jenis pekerjaan, lapangan usaha, dan status pekerjaan responden dalam mempengaruhi tingkat kepentingan kelima belas indikator sebagai prasyarat kelayakan pekerjaan. Dengan membandingkan hasil penghitungan terhadap dua daerah pengamatan, ternyata pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan juga menunjukkan sedikit perbedaan antara nilai rata-rata tingkat kepentingan bagi responden di kota Surakarta dengan responden di kota Tangerang. Secara berturut-turut, responden yang bekerja di lapangan usaha pertanian, tenaga usaha, dan yang bekerja di industri pengolahan bagi Kota Surakarta, sementara di kota Tangerang tenaga usaha jasa, tenaga tata usaha, dan juga tenaga kerja di industri pengolahan menganggap kelima belas indikator yang disajikan memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pekerja lainnya (lihat Gambar 4.4).

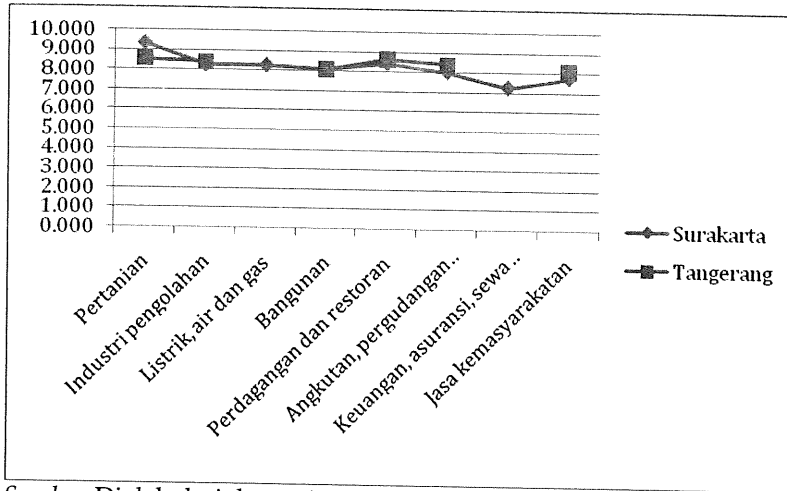
Gambar 4.4.
Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden di Dua Daerah Penelitian



Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Demikian halnya dengan pengelompokan melalui lapangan pekerjaan yang ditunjukkan pada Gambar 4.5, juga memperlihatkan pola yang sama, yaitu tingkat rata-rata kepentingan tiga tertinggi ditunjukkan oleh para pekerja di usaha jasa perdagangan/restoran, industri pengolahan, dan jasa angkutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin layak pekerjaan yang dimilikinya (lihat uraian sebelumnya tentang mayoritas pedagang yang sudah layak), maka semakin menganggap penting indikator-indikator pekerjaan itu sebagai prasyarat kelayakan suatu pekerjaan.

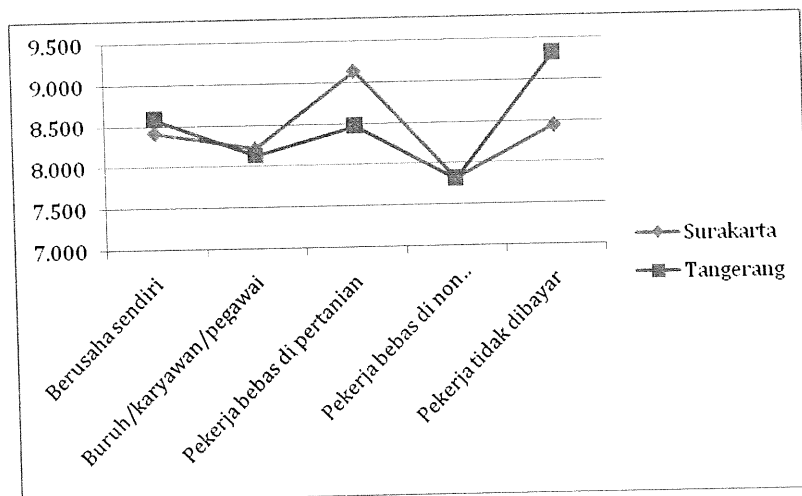
Gambar 4. 5.
Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak Berdasarkan Lapangan Usaha Responden di Dua Daerah Penelitian



Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil analisis terhadap status pekerjaan responden, ternyata juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang berarti bagi kedua daerah penelitian. Berturut-turut pekerja yang tidak dibayar, berusaha sendiri, dan buruh menunjukkan rata-rata tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan pekerja pada status lainnya (Gambar 4.6). Pekerja yang tidak dibayar atau berusaha sendiri, beberapa di antara mereka tentunya berprofesi sebagai pedagang.

Gambar 4.6.
Nilai Rata-rata Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak Berdasarkan Status Pekerjaan Responden di Dua Daerah Penelitian



Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Selanjutnya, tulisan ini menganalisis keterkaitan antara tingkat kepentingan indikator pekerjaan layak dengan kelayakan pekerjaan utama yang digeluti responden pekerja ekonomi informal di perkotaan. Seberapa jauh indikator-indikator aspirasi pekerjaan layak tersebut ditentukan oleh kelayakan pekerjaan utama responden pekerja? Analisis dilakukan dengan menggunakan korelasi parametric Pearson. Dengan jumlah responden 305 orang, maka taraf signifikansi 5 persen nya adalah 0,095. Artinya bahwa untuk menyatakan suatu indikator memiliki korelasi secara signifikan, paling tidak harus bernilai $r \geq 0,095$. Hasil penghitungan dari masing-masing tingkat kepentingan indikator pekerjaan layak terhadap layak/tidaklayaknya pekerjaan utama responden pekerja, ternyata hanya indikator keamanan dalam bekerja memiliki korelasi negatif secara signifikan terhadap layak/tidaklayaknya pekerjaan yang dimiliki responden dengan nilai $r = -$

0.098465441. Artinya, keamanan dalam bekerja semakin dianggap penting oleh pekerja yang saat ini pekerjaannya layak dibandingkan oleh yang pekerjaannya tidak layak. Sementara itu, terdapat tiga indikator lainnya yang memiliki taraf signifikansi lebih rendah (0,085-0,65), dan sisanya (sekitar 11 indikator lainnya) memiliki korelasi dengan tingkat signifikansi yang sangat rendah.

Tabel 4.1.

Korelasi Pearson antara Tingkat Kepentingan Indikator Pekerjaan Layak dengan Anggapan Kelayakan Pekerjaan Utama Responden

Indikator Pekerjaan Layak	Nilai r terhadap anggapan kelayakan Pekerjaan Utama
a. Tersedianya pekerjaan	-0.065646914
b. Kesesuaian antara pendapatan dengan pekerjaan	0.022523903
c. Jam kerja yang wajar (standar	0.023573356
d. Tingkat pendidikan	0.037731211
e. Kesempatan untuk mendapat kehidupan pribadi	-0.050572398
f. Kesempatan berinteraksi dengan keluarga	-0.033509708
g. Kelangsungan pekerjaan	-0.035382687
h. Keamanan dalam bekerja	-0.098465441
i. Jaminan kesehatan	0.084907444
j. Jaminan kecelakaan kerja	0.060984945
k. Jaminan hari tua	0.022712791
l. Jaminan kematian	0.039980092
m. Jaminan pendidikan anak	-0.002562302
n. Lingkungan kerja	-0.027771347
o. Perkumpulan, paguyuban, kelompok organisasi pekerja	-0.064573866

Sumber: Diolah dari data primer penelitian (2011).

Indikator pertama dari tiga indikator tersebut adalah jaminan kesehatan dengan korelasi yang positif. Artinya, pekerja yang menyatakan pekerjaan utamanya tidak layak cenderung menganggap penting adanya jaminan kesehatan sebagai prasyarat kelayakan suatu pekerjaan. Indikator kedua adalah tersedianya pekerjaan. Bahwa ketersediaan pekerjaan semakin dianggap penting menjadi indikator pekerjaan layak terutama bagi pekerja yang saat ini pekerjaannya layak. Yang terakhir adalah indikator adanya perkumpulan/paguyuban yang cenderung dianggap penting oleh pekerja yang saat ini pekerjaannya layak.

4.4. Aplikasi Indikator Pekerjaan Layak di Lokasi Kajian

Pengamatan terhadap aplikasi indikator pekerjaan layak bagi pekerja informal perkotaan, dilakukan uji statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi dan tingkat pengaruh pencapaian pekerjaan layak terhadap 305 responden di dua lokasi. Sebelum dapat memutuskan variabel yang akan diuji taraf signifikansinya, dilakukan pengujian korelasional menggunakan korelasi Pearson bagi data parametric, dan menggunakan korelasi Kendall's Tau untuk data yang bersifat non parametric. Ternyata, upah merupakan variabel yang memiliki angka korelasi tertinggi terhadap kelayakan suatu pekerjaan. Ini sejalan dengan tingginya persentase responden yang mengukur kelayakan/ketidaklayakan suatu pekerjaan karena alasan tingkat pendapatan. Oleh karenanya upah akan dijadikan variabel utama dalam penghitungan selanjutnya. Sementara itu, hasil perhitungan variabel lainnya menunjukkan bahwa dari delapan indikator yang ada, ternyata hanya jam kerja, jaminan kesehatan, dan jenis kelamin memiliki korelasi langsung dengan pekerjaan layak. Selebihnya, hanyalah menunjukkan korelasi secara tidak langsung. Seperti, jenis pekerjaan yang memiliki korelasi negatif dengan tingkat pendidikan dan tempat usaha. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pekerjaan yang digeluti semakin *skilled*. Sema-

kin *unskilled* jenis pekerjaan yang digeluti, maka tempat usahanya semakin tidak tetap. Demikian halnya dengan tingkat pendidikan yang memiliki korelasi positif secara signifikan dengan tingkat upah. Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka semakin tinggi pula upah yang diperolehnya. Namun, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tempat usaha tidak berhubungan secara langsung dengan pekerjaan yang layak. Untuk itu pengukuran tingkat pencapaian kelayakan pekerjaan di sini hanya bisa diuji dari variabel upah (pendapatan), jam kerja, jaminan kesehatan dan jenis kelamin. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Hasil Uji Wald Berdasarkan Persamaan .1

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp (B)
Step 1 ^a	Log_Inc	-1.740	.405	18.433	1	.000***	.175
	Jamkrj	.008	.005	2.158	1	.142*	1.008
	Jmn_kes(1)	.400	.251	2.549	1	.110*	1.492
	jk(1)	-.322	.258	1.558	1	.212	.725
	Constant	9.549	2.298	17.261	1	.000	14028.373

a. Variable(s) entered on step 1: Log_Inc, jamkrj, Jmn_kes, jk.

Catatan:

Log_inc = variabel besar rata-rata pendapatan per bulan

Jamkrj = jam kerja

Jmn_kes = jaminan Kesehatan

Jk = jenis kelamin.

Dari keempat variabel yang dapat dimasukkan dalam model memiliki nilai-nilai *Log likelihood* cukup besar yaitu 384.138 yang berarti signifikan 5 persen. Sementara itu, berdasarkan uji secara individual dengan menggunakan uji Wald, didapatkan hasil bahwa besar upah merupakan variabel dengan tingkat signifikansi yang paling tinggi dengan taraf kepercayaan 0,01 persen, sedang-

kan jam kerja dan jaminan kesehatan dengan tingkat kepercayaan 0,20 persen. Dari model tersebut dapat dinyatakan bahwa :

- Penurunan pendapatan sebesar 100 ribu rupiah akan menurunkan peluang kelayakan pekerjaan sebanyak 0,175 kali.
- Penambahan satu jam kerja per minggu akan meningkatkan peluang kelayakan kerja sebesar 1 kali lipat.
- Pekerja yang memperoleh jaminan kesehatan akan meningkatkan peluang kelayakan kerja 1,5 kali lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- Pekerja laki-laki memiliki penurunan peluang kelayakan pekerjaan sebesar 0,725 kali dibandingkan dengan pekerja perempuan.

Data tersebut di atas mengindikasikan bahwa pencapaian kelayakan suatu pekerjaan secara berturut-turut ditentukan oleh ketersediaan jaminan kesehatan, jam kerja, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Dengan menggunakan model yang sama, juga dilakukan pengujian untuk masing-masing kota, yaitu kota Surakarta dan kota Tangerang. Tabel 4. 3. menyajikan hasil model regresi logistik untuk masing-masing wilayah.

Tabel 4.3.
Model Regresi Logistik

Variabel	Model I (Kota Surakarta)			Model II (Kota Tangerang)		
	B	Sig.	Exp(B)	B	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Log_Inc	-1.769	0.005***	0.170	-2.113	0.000***	0.121
jamkrj	0.010	0.238	1.010	0.008	0.256	1.008
Jmn_kes(1)	0.367	0.324	1.443	0.621	0.092*	1.861
jk(1)	-0.178	0.660*	0.837	-0.430	0.235	0.651
Constant	9.163	0.008	9534.215	12.046	0.001	170485.405
-2 Log Likelihood	189,760**			183,959***		

Keterangan : Tanda *** = signifikan 1 persen, ** = signifikan 5 persen, * = signifikan

10 persen

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Berdasarkan uji *log likelihood* yang disajikan pada Tabel 4.3, menunjukkan bahwa kedua model memiliki tingkat signifikansi yang cukup besar yaitu mencapai 5 persen dan 1 persen. Berdasarkan uji Wald B, variabel upah di kedua persamaan merupakan variabel yang memiliki tingkat signifikansi tertinggi dengan taraf 1 persen. Berikutnya, terdapat sedikit perbedaan anantara dua daerah pengamatan. Pada persamaan pertama (kota Surakarta), nampak bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap pencapaian kelayakan suatu pekerjaan, sedangkan di kota Tangerang variabel jaminan kesehatanlah yang memberikan pengaruh signifikansi lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Namun demikian, kedua daerah tersebut nampaknya mempunyai kecenderungan tingkat probabilitas penurunan dan peningkatan peluang untuk kelayakan suatu pekerjaan yang searah/sama.

Dengan mengacu pada ketersediaan data statistik (kuantitatif) dan juga hasil perolehan data kualitatif (wawancara mendalam) hasil kajian di Kota Surakarta dan Tangerang terkait dengan kelayakan pekerjaan ekonomi informal semakin menegaskan bahwa penerapan indikator *decent work* ILO perlu lebih hati-hati karena tidak semua indikatornya cocok untuk pekerjaan di lokasi penelitian. Sebaliknya, terbuka lebar kemungkinan adanya indikator baru yang dapat memperkaya konsep, terutama di ekonomi informal dan di tingkat mikro (individu/rumah tangga) yang relatif lebih bervariasi. Tabel 4.4. menjelaskan beberapa indikator yang dianggap lebih operasional terkait dengan pekerjaan layak pada ekonomi informal. Sebagai contoh, upaya peremajaan pasar tradisional di kota Surakarta diduga berdampak langsung terhadap perubahan status usaha dan kegiatan ekonomi informal. Semakin layak tempat usaha akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan pelaku ekonomi informal. Termasuk dalam hal ini adalah status usaha pelaku ekonomi informal. Semakin banyak pelaku usaha ekonomi informal yang memiliki lokasi usaha resmi cenderung mengurangi ketidaklayakan capaian *decent work*. Begitu pula dengan semakin berkurangnya gangguan keamanan (misalnya penggusuran) berdampak positif terhadap kelancaran usaha ekonomi informal.

Tabel 4.4
Indikator Pekerjaan Layak yang Disesuaikan dengan
Karakteristik Ekonomi Informal di Lokasi Kajian

Kesempatan Kerja	Perlindungan Sosial	Hak di Tempat Kerja	Dialog Sosial
<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pekerja informal • Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi informal • Usia pekerja sektor informal • Capaian pendidikan formal • Variasi pekerjaan tambahan • Pasar tradisional yang diremajakan • Usaha rumahan • Tingkat pengangguran pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan terhadap kelangsungan usaha (misalnya kasus pengrusakan) • Status tempat usaha • Akses kredit usaha • Tingkat pemakaian jaminan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan pekerja per bulan dibanding UMR • Kelebihan jam kerja (>49 jam/minggu) • Tingkat kecelakaan kerja • Pelatihan keterampilan dan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi pekerja dalam org/asosiasi pekerja • Asosiasi kelompok pekerja berdasarkan profesi • Dialog kelompok pekerja (informal) dengan pemerintah (kebijakan)

Penyesuaian indikator di atas merupakan contoh pelaksanaan pekerjaan layak yang dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok ekonomi informal perkotaan di kedua daerah yang berbeda. Tentunya masih banyak indikator lainnya yang perlu diperhatikan terutama untuk kelompok ekonomi informal perdesaan yang diyakini memiliki karakteristik berbeda dengan ekonomi informal perkotaan. Oleh karena itu, studi ini menggarisbawahi pentingnya melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap aplikasi indikator pekerjaan layak pada pelaku ekonomi informal perdesaan.

4.5. Penutup

Bagi pekerja sektor ekonomi informal perkotaan, hampir seimbang proporsi antara yang menganggap pekerjaan mereka layak dan tidak layak, masing-masing (53 dan 47 persen), di mana pekerjaan sebagai pedagang merupakan pekerjaan yang cende-

rung layak dan berpenghasilan cukup tinggi dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Ketersediaan pekerjaan merupakan salah satu indikator yang paling sensitif terhadap pencapaian pekerjaan layak.

Sementara indikator keberadaan perkumpulan, paguyuban dan organisasi profesi dinilai oleh sebagian besar responden sebagai indikator yang tidak penting untuk kelayakan suatu pekerjaan. Hanya bagi mereka yang menganggap pekerjaan yang dimilikinya saat ini layak maka perkumpulan, paguyuban dan organisasi profesi menjadi sangat penting sebagai prasyarat kelayakan suatu pekerjaan. Implikasi dari kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas dengan berbagai aspek di dalamnya perlu mendapat perhatian yang paling serius oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan pembangunan. Apalagi selama ini terbukti peran sektor ekonomi informal sangat penting sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan sebagai katup pengaman dalam menghadapi krisis ekonomi. Berdasarkan data makro sektor ekonomi informal merupakan penyedia lapangan pekerjaan bagi sebagian besar angkatan kerja di Indonesia. Sektor ekonomi informal dipercaya mampu menyediakan "keamanan" bagi sebagian besar pekerja yang tidak terserap di sektor formal.

Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi pengurangan kemiskinan, pendekatan yang lebih holistik terhadap kebijakan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas seharusnya menjadi prioritas dibanding berbagai kebijakan atau program lainnya yang bersifat transfer bantuan langsung atau program populis. Di sisi lain, rendahnya penilaian terhadap indikator keberadaan perkumpulan, paguyuban dan organisasi profesi semakin menunjukkan bahwa tripartitisme atau keterwakilan pekerja sektor ekonomi informal perkotaan untuk menjamin partisipasi maksimum dalam penentuan berbagai kebijakan pembangunan masih sangat rendah. Beberapa indikator lain harus terpenuhi terlebih dulu, sebelum pekerja tersebut menganggap penting adanya suatu per-

kumpulan, paguyuban, dan organisasi profesi. Dalam hal ini, isu tentang bagaimana mencapai pekerjaan layak melalui penguatan kelembagaan (indikator dialog sosial) perlu menjadi perhatian yang serius di tengah maraknya demokratisasi di Indonesia yang terus berkembang.

Di antara berbagai permasalahan terkait aplikasi pekerjaan layak adalah ketersediaan data sebagai alat pengukuran, penentuan indikator yang lebih sensitif, dan upaya pencapaian dari berbagai indikator yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian pekerjaan layak juga sangat ditentukan oleh latar belakang sejarah, *political will* penentu kebijakan, dan tingkat kemapanan ekonomi. Semakin baik kondisi ketiga hal tersebut kemungkinan pencapaian pekerjaan layak bukan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu adalah tugas semua pihak untuk mempromosikan pencapaian pekerjaan layak sebagai bagian dari upaya pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok tertentu yang sangat rentan terhadap pengabaian pemenuhan hak pekerjaan layak.

Daftar Pustaka

- Ghai, Dharam, 2003. "*Decent work: Concept and Indicators.*" International Labour Review, Vol. 142 (2003), No. 2. International Labour Organization (ILO), 2003.
- Ghai, Dharam, 2002. "*Decent work: Concepts, Models and Indicators.*" Discussion Paper, International Institute for Labour Studies, Geneva, 2002.
- International Labour Organization (ILO), 1999. "*Decent work.*" Report of the Director-General, ILC, 87th Session, June 1999.
- International Labour Organization (ILO), 2007. "*The Informal Economy: Enabling Transition to Formalization.*" Working Paper, ILO: 2008.
- International Labour Organization (ILO), 2008. "*Measurment of Decent work.*" Discussion paper for the Tripartite Meeting of Experts on the Measurment of *Decent work*. ILO Geneva: October 2008.

- Ishengoma, E.K dan Kappel, R. (2006). *Economic Growth and Poverty: Does Formalisation of Informal Enterprises Matter?* GIGA Research Program: Transformation in the Process of Globalization.
- Kapunda, SM dan Mmolawa, B.D. (Tanpa Tahun). The Role of Informal Sector and Self-Employment in Poverty Alleviation in Bostwana. www.bidpa.bw/documents/informalsectorrole.pdf
- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2010. "Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014". Jakarta: 2010.
- Musiolek, B. (2002). *Decent work in the Informal Sector*. <http://www.cleanclothes.org/campaigns-list/818-decent-work-in-the-informal-sector>.
- Richard Anker et al, 2002. "Measuring Decent work with Statistical." Working Paper No.2 October 2002. Policy Integration Department Statistical Development and Analysis Group, International Labour Office, Geneva: 2002.
- Sastry N.S (2006). "Measuring the Links between poverty and Informal Employment" Expert Group on Informal Sector Statistics (Delhi Group). 11th & 12th May 2006. New Delhi Indias
- Saglam, N. (Tanpa Tahun). "The Informal Economic Sector and Poverty in the Mediteranian Countries and Turkey". www.um.edu.mt/edrc/books/CD_CSP4/pdf/
- Trebilcock, A. (2005). *Decent work and the Informal Economy*. Discussion Paper No. 2005/04. Expert Group on Development Issues.
- Widiarti, Diah, 2007. "Kajian tentang Indikator Kerja yang Layak di Indonesia." Laporan Penelitian, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Desember 2007.

BAB V

PENCAPAIAN PEKERJAAN LAYAK DALAM KONTEKS PENGURANGAN KEMISKINAN

Oleh: Laila Nagib dan Nawawi

5.1. Pengantar

Bagi banyak orang yang dikategorikan miskin, bekerja merupakan jalan keluar utama dalam mengatasi kemiskinan. Pendekatan ekonomi yang selama ini dianut banyak negara lebih menekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipercaya dapat memperluas lapangan pekerjaan. Namun demikian banyak fakta menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menambah lapangan kerja, dan menjamin perbaikan kualitas pekerjaan. Banyak penduduk di negara berkembang terlibat dalam pekerjaan yang umumnya dikategorikan ekonomi informal, dengan kondisi yang umumnya tidak aman dan pendapatan yang tidak memadai (*working poor*). Dengan demikian pengentasan kemiskinan di negara berkembang tidak semata-mata persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, tapi perlu mengkombinasikan keduanya untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan penduduk (ILO, 2010).

Pekerjaan layak (*decent work for all*) merupakan konsep yang luas dengan berbagai aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, secara langsung maupun tidak. Dalam aplikasinya konsep pekerjaan layak akan terus berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan kondisi/kharak-

teristik permasalahan ketenagakerjaan di suatu wilayah negara/daerah. Keterlibatan seseorang dalam pekerjaan layak merupakan dimensi dasar dari peningkatan kualitas kehidupan yang dapat mengangkat seseorang atau kelompok keluar dari kubangan kemiskinan. Salah satu teori kemiskinan yang paling berpengaruh di negara berkembang yaitu teori lingkaran kemiskinan dari Ragnar Nurkse (dikutip oleh Bappeda Kota Tangerang, 2009) yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang tetap miskin karena produktivitasnya rendah, sehingga penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang minim, sementara pembentukan modal masyarakat memerlukan tabungan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas pekerjaan merupakan bagian terbesar dalam kehidupan setiap individu terutama terhadap alokasi jumlah waktu, integrasi sosial dan kepercayaan individual. Kelayakan suatu pekerjaan dapat dilihat dari berbagai persepsi seperti tersedianya pekerjaan, pendapatan yang memadai, kondisi tempat kerja, kenyamanan dan keamanan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan pekerja yang bersangkutan. Artinya, pencapaian pekerjaan layak, dipercaya akan berkontribusi penting terhadap pencapaian perbaikan kualitas hidup yang berkesinambungan dan merupakan elemen penting sebagai pengakuan hak individu dan kelompok (*rights based approach*).

Hubungan antara pekerjaan layak dan pengurangan kemiskinan diperkuat oleh Anker (2002) yang mengemukakan bahwa pencapaian pekerjaan layak berimplikasi kuat terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan sasaran dari pencapaian pekerjaan layak adalah kelompok yang dikategorikan miskin dan/atau rentan (*the poor and vulnerable*). Dengan demikian meskipun pencapaian pertumbuhan ekonomi tetap penting dilakukan dalam upaya perluasan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Namun kondisi tersebut tidak cukup karena diperlukan pekerjaan yang lebih berkualitas untuk pengurangan kemiskinan

secara berkelanjutan. Estimasi berdasarkan data tingkat kabupaten/kota untuk suatu distribusi pendapatan tertentu, setiap satu persen peningkatan pertumbuhan, berhasil menurunkan angka kemiskinan sampai 0,8 persen (ILO, 2004.), sehingga pertumbuhan ekonomi yang pesat dan layak, penting artinya untuk kesehatan fiskal Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Dalam implementasinya banyak tantangan yang dihadapi, terutama untuk negara berkembang, di mana ekonomi informal masih dominan. Tantangan lainnya adalah banyak kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum terintegrasi dengan kebijakan penciptaan pekerjaan layak. Masukan ILO untuk Indonesia seperti tertuang dalam dokumen tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan (PRSP Indonesia), dinyatakan bahwa dalam pembangunan millennium (MDG's) tahun 2015, agenda penanggulangan kemiskinan dan pencapaian pekerjaan layak, saling melengkapi, sehingga perlu langkah-langkah konkrit dalam implementasinya.

Fokus utama penanggulangan kemiskinan adalah kemiskinan pendapatan dan non pendapatan. Untuk mengatasi kemiskinan pendapatan, penekanan pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan agar layak bekerja untuk memenuhi lapangan kerja produktif. Sedangkan kemiskinan non pendapatan di atasi dengan penyediaan jaminan sosial (untuk mengatasi kerentanan) dan dialog sosial untuk memenuhi hak bersuara dan keterwakilan bagi kelompok marginal atau miskin. Menurut ILO (2004) dalam konteks pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi, penurunan kemiskinan (dimensi pendapatan dan non pendapatan), perlu memperhatikan keberagaman wilayah dan tradisi demokratik yang sedang berkembang, sehingga perlu kesepakatan nasional untuk mengatasi kemiskinan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

5.2. Pencapaian Pekerjaan Layak dan Faktor yang Berpengaruh

Keberhasilan atau pencapaian pekerjaan layak di suatu negara/wilayah/daerah dapat dilihat dari aplikasi konsep peker-

jaan layak dan pengukuran indikatornya yang disesuaikan dengan karakteristik atau kondisi sosial, ekonomi dan politik di masing-masing negara/wilayah/daerah tersebut. Selanjutnya, pentingnya mengukur pekerjaan layak dimaksudkan untuk melihat perkembangan kondisi pekerjaan yang dianggap 'layak' dan sekaligus mengetahui perubahan tingkat kemiskinan. Di-harapkan semakin besar proporsi pekerja terlibat dalam pekerjaan layak, semakin berkurang proporsi pekerja miskin (ILO, 2010). Di sisi lain, pengembangan konsep dan pengukuran yang lebih aplikatif dan komprehensif terkait indikator pekerjaan layak akan memberikan sebuah *assessment of mechanism* yang lebih lengkap dalam melihat implikasi pencapaian pekerjaan layak secara langsung dan tidak langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Diperlukan berbagai kombinasi program/kegiatan yang berbeda dalam kebijakan ekonomi dan sosial (ketenagakerjaan) yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus berimplikasi terhadap percepatan pengurangan kemiskinan dan bukan sebaliknya (perlambatan penurunan kemiskinan). Dalam hal ini, pemahaman yang lebih baik tentang konsep pekerjaan layak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pekerjaan layak akan memberikan pemikiran yang bermanfaat terhadap kemungkinan penentuan berbagai pilihan kebijakan dan program pembangunan, khususnya untuk program pengurangan kemiskinan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah otonomi.

Berdasarkan pendalaman substansi penelitian yang dilakukan di kedua lokasi penelitian (Kota Tangerang dan Kota Surakarta), dapat diketahui bahwa pencapaian pekerjaan layak dalam konteks penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1) Kebijakan dan program pembangunan yang *pro poor*; (2) Koordinasi terpadu, implementasi dan pengawasan kebijakan dan program pembangunan (3) Ketersediaan data dan indikator yang dibangun berdasarkan karakteristik lokal (4) Keterlibatan seluruh komponen kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat.

Faktor 1: Kebijakan dan Program Pembangunan yang *Pro-Poor*.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pencapaian pekerjaan layak erat kaitannya dengan kebijakan/program pengurangan kemiskinan di suatu wilayah, karena yang menjadi target dalam pencapaian pekerjaan layak adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan rentan. Dalam hal ini kebijakan/program penurunan kemiskinan di suatu wilayah harus mampu mengakomodir pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui dimensi pendapatan dan non pendapatan sejalan dengan jiwa dan prinsip pencapaian pekerjaan layak.

Kota Tangerang dan kota Surakarta adalah dua kota yang mempunyai kesamaan dalam hal masih memiliki sekelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dilihat dari dimensi pendapatan maupun non pendapatan. Dilihat dari struktur pekerjaan terdapat variasi pekerjaan di sektor formal maupun informal. Kedua kota juga dikenal karena mempunyai ciri khusus dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dikenal karena dalam rangka penanggulangan kemiskinan perkotaan dianggap berhasil dalam pelaksanaan program ekonomi kerakyatan, diantaranya dengan penataan sektor informal pada umumnya dan penataan PKL (pedagang kaki lima) dengan cara yang lebih manusiawi.

Berbagai penghargaan telah diterima Pemkot Surakarta baik dari pemerintah pusat maupun swasta atas keherhasilannya di berbagai bidang pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata). Penghargaan lainnya diterima dari Presiden RI untuk kinerja Pemkot Surakarta di bidang kebijakan, deregulasi, penegakkan disiplin dan pengembangan manajemen pelayanan. Bahkan pada tahun 2010 Pemkot menerima penghargaan dari Lembaga Tranparancy Internasional Indonesia sebagai kota terbersih ketiga dalam praktek korupsi. Sementara kota Tangerang yang merupakan kota satelit dari Metropolitan Jakarta, dikenal sebagai kota berpredikat terbaik di tingkat nasional dalam mengurangi tingkat kemiskinan warganya melalui kebijakan

pembangunan kesejahteraan sosial, terutama pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi kelompok miskin perkotaan.

Dalam lima tahun terakhir berbagai indikator makro ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan UMKM, dan nilai investasi menunjukkan perkembangan ekonomi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya (RPJM Kota Surakarta 2010-2015). Hal ini juga dialami kota Tangerang, sebagai kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi Banten, sehingga menjadi tujuan para pencari kerja dari kota Tangerang dan daerah sekitarnya. Namun dalam kenyataannya banyak penduduk lokal yang sulit mencari kerja karena kalah bersaing dengan pendatang yang umumnya lebih memenuhi permintaan sektor modern.

Demikian pula kota Tangerang juga masih menghadapi permasalahan penanggulangan kemiskinan, karena masih banyak kantong-kantong wilayah miskin, dengan penduduk yang umumnya tersisih dari akses dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota. Hal yang sama juga dialami Kota Surakarta meskipun perkembangan ekonomi makro cukup signifikan, namun penurunan tingkat kemiskinan masih fluktuatif, dan belum berhasil menekan tingkat kemiskinan secara nyata. Pengaruh faktor lainnya terutama kenaikan harga BBM, kenaikan inflasi turut berperan dalam menurunkan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan hampir miskin.

Sebagai daerah otonom, sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah No 25 tahun 1999 kedua daerah mempunyai kewenangan dan alokasi sumberdaya (desentralisasi fiskal) dalam membuat kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, masing-masing daerah otonom berkewajiban meningkatkan layanan publik terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian Pemda/pemkot berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai pro-

gram berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan sasaran penurunan kemiskinan yang disepakati Indonesia dalam program pembangunan millennium (MDG's).

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2009 Pemkot Tangerang berhasil menyusun Masterplan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tangerang sebagai panduan dalam pelaksanaan program penurunan kemiskinan. Program ini memfokuskan pada pembangunan kesejahteraan sosial secara simultan melalui sistim perlindungan sosial, jaminan sosial dan penguatan modal sosial (Bappeda Kota Tangerang, 2009). Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dianggap berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka (sekitar 40 persen selama tahun 2005-2008) dan tingkat kemiskinan (sekitar 5,7 persen selama tahun 2006-2009), namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 masih relatif besar yaitu 89.264 jiwa (dikutip Bappeda Kota Tangerang, 2009).

Beberapa program unggulan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan antara lain : (1) Pemberian jaminan pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin di beberapa rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah setempat melalui pemberian Kartu Multiguna, (2) Program sekolah gratis mulai dari SD hingga SMA serta perbaikan sarana pendidikan SD, SMP dan SMU hingga menjadi layak belajar; dan (3) Program peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat, yakni pemberian pelatihan kepada kelompok masyarakat miskin melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat yang dianggap potensial.

Di kota Tangerang program penguatan ekonomi rakyat lebih difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan dan pembimbingan usaha, yang cakupannya masih terbatas baik jumlah sasaran maupun materi pembimbingannya. Melalui pembimbingan dan pelatihan diharapkan makin banyak orang yang bekerja sebagai wirausahawan dan mampu menciptakan lapangan kerja. Namun dalam pelaksanaannya program tersebut belum nampak hasilnya, karena kurang didukung oleh so-

sialisasi yang merata, lemah dalam koordinasi dan pengawasan, serta cenderung lebih bersifat proyek yang cakupannya terbatas, dan kurang mencapai sasaran. Upaya pemkot untuk mengintegrasikan PKL di pasar sulit dilakukan, karena berbagai faktor seperti heterogenitas masyarakat (pendatang dan lokal), cakupan kantong kemiskinan yang luas dan bervariasi serta fokus penguatan ekonomi lebih ke perkembangan ekonomi makro, sebagai daerah penyangga DKI Jakarta. Sementara dengan mengandalkan perkembangan ekonomi makro, lapangan kerja yang tercipta belum tentu diarahkan bagi kelompok miskin yang umumnya hanya dapat terserap di sektoral informal yang dianggap tidak produktif. Harus ada kemauan yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengarahkan investasi ke sektor yang banyak menyerap tenaga kerja terutama kelompok marginal. Meskipun sebagian kelompok ini mampu berusaha, namun mempunyai banyak keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia, sehingga faktor pemberdayaan untuk kelompok ini sangat diperlukan, guna meningkatkan kemandirian ekonomi. Kebijakan dan program yang hanya memfokuskan pada bantuan sosial, umumnya bersifat jangka pendek dan sulit mempertahankan kelangsungannya dalam jangka panjang. Sementara program penguatan ekonomi rakyat melalui peningkatan kelayakan pekerjaan akan lebih terjamin kelangsungannya (*pro-job*)

Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang diarahkan langsung untuk kelompok miskin adalah pemerataan pelayanan kesehatan yang memadai dan akses terhadap pendidikan. Kedua program merupakan hal yang tidak bisa "ditawar" ketika berkaitan dengan kebijakan pro-rakyat miskin. Hingga saat ini pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut telah ditetapkan menjadi program nasional melalui JAMKESMAS dan BOS. Namun demikian, aplikasinya di tingkat daerah masih mengalami banyak kendala dan keterbatasan cakupan. Oleh karena itu kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut sangatlah penting. Pro-

gram unggulan Pemkot Tangerang dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemberian Kartu Multiguna untuk jaminan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi kelompok miskin. Sementara program pemberdayaan dan penguatan modal belum optimal dalam pelaksanaannya, karena menghadapi kendala "business as usual", yaitu kelemahan klasik dalam koordinasi antarsektoral, pengawasan dan kecenderungan setiap program sebagai proyek yang tidak terjamin kelangsungannya.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, Pemkot Surakarta juga membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) yang melibatkan semua unsur masyarakat terkait (pemerintah, pengusaha, LSM dan Perguruan Tinggi). Program memfokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, dengan pendukung utama sektor perdagangan, jasa dan pariwisata serta pemanfaatan koperasi untuk memudahkan pendanaan PKL. Beberapa program yang menonjol adalah penataan PKL (relokasi, gerobagisasi, shelter), pemanfaatan lokasi untuk penciptaan lapangan kerja baru (Galabo, *Sunday market*) dan pemanfaatan dana bea cukai (BUMN) untuk membina wirausahawan muda di tingkat kelurahan. Program penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta menekankan pada aspek pendapatan yaitu peningkatan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas pekerjaan. Sasaran utama program adalah sektor informal yang mendominasi lapangan pekerjaan di kota Surakarta, dan umumnya melibatkan kelompok pekerja miskin (*working poor*) dengan penghasilan umumnya di bawah UMR.

Di kota Surakarta penguatan ekonomi rakyat menjadi fokus utama dengan beberapa program unggulan diantaranya (1) Program penguatan ekonomi masyarakat rukun tetangga (RT), dengan memanfaatkan dana yang berasal dari cukai rokok untuk *Community Development* yang disalurkan melalui pemberian suntikan dana / modal usaha untuk tingkat RT yang dapat digunakan sebagai stimulan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat; (2) Memindahkan dan menata lebih dari 1000 pedagang kaki lima yang

relatif tidak tertata menjadi lebih layak, baik dari sisi pendapatan, keamanan kerja, kelangsungan pekerjaan, kesempatan kerja dan menjadikan status mereka lebih resmi karena memiliki SIUP. Program penataan sektor informal ini dianggap berhasil dan bersifat monumental karena dilakukan dengan perencanaan yang matang, koordinasi antar birokrasi terkait, pengawasan dalam implementasinya, disertai dengan dukungan dari masyarakat luas karena dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Solo.

Di samping itu pemerintah daerah juga banyak melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional, memfasilitasi tempat usaha kuliner di malam hari (dikenal dengan GALABO- Gladak Langen Boga), *Sunday Market* untuk memperluas usaha UMKM dan membantu meningkatkan wisata niaga, sehingga dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi dengan usaha sektor jasa dan perdagangan yang lebih formal dan modern di kota Solo. Untuk mencapai hasil yang optimal, dalam melaksanakan program-programnya Pemkot Surakarta berlandaskan filosofi Jawa yang masih kental di Kota Solo, diantaranya : "*alon-alon asal klakon*" "*mangan ora mangan asal kumpul*" "*wong jowo yen dipangku turu, lamun siro pinter ojo minteri, lamun siro cepet ojo ndisiki, lamun siro rendet ojo nyrimpeti*".

Keberhasilan menata dan memindahkan lebih dari 1000 PKL ke lokasi yang baru, tidak lepas dari landasan filosofi tersebut. Hal ini memudahkan pelaksanaan program, karena rakyat kecil merasa "*diuwongke*" oleh pimpinannya, mempedulikan budaya masyarakat setempat serta menghargai demokrasi yang sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada pengalaman kegagalan relokasi PKL sebelumnya yang lebih mengutamakan penggusuran tanpa mempedulikan alternatif usaha lain untuk kelompok yang menjadi korban penggusuran. Dalam perkembangannya, lokasi ini telah berubah menjadi sentra ekonomi baru (bidang otomotif) yang lebih layak, karena diakui oleh para pelaku ekonomi, lokasi kerja lebih nyaman dan aman, meningkatkan pendapatan dan

menciptakan lapangan kerja langsung dan sebagai pengungkit penciptaan lapangan kerja lain di sekitarnya (transportasi, perdagangan dan jasa). Perlu diakui tidak semua rencana relokasi di Kota Surakarta mulus dilaksanakan, tapi keberhasilan ini menjadi pembelajaran bagi aparat birokrasi dalam menata sektor informal yang selama ini keberadaannya dibutuhkan tapi diacuhkan oleh para pengambil kebijakan, bahkan sering mengalami perlakuan yang kurang manusiawi dalam penataannya.

Di kota Surakarta, program unggulan di bidang kesehatan adalah Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), dengan sasaran masyarakat miskin (kriteria BPS plus) yang belum tercakup dalam program jaminan kesehatan lainnya seperti Jamkesmas, Askes PNS dan Askes lain. Jumlah sasaran PKMS 335.990 jiwa, meliputi PKMS *gold* (dana APBD sama dengan Jamkesmas (APBN), PKMS *silver* untuk penduduk lainnya yaitu biaya rawat inap bantuan sebesar 2 juta rupiah (sisanya bayar sendiri), dan rawat jalan di Puskesmas. Kriteria penduduk miskin dengan menggunakan 24 kriteria (BPS 14 kriteria), karena dengan 14 kriteria banyak orang miskin tidak tercakup (terutama pemilikan rumah). Sementara program unggulan di bidang kesehatan untuk kota Tangerang dilaksanakan melalui penyediaan Kartu Multiguna untuk pelayanan kesehatan dengan sasaran kelompok penduduk miskin dan beasiswa di bidang pendidikan. Sasaran program ini adalah kelompok miskin sesuai dengan kriteria BPS. Perbedaan kriteria yang digunakan di kedua lokasi juga berpengaruh terhadap data tingkat kemiskinan dan pencapaian penurunan kemiskinan sebagai dampak kebijakan dan program yang ada.

Penguatan kapasitas ekonomi berkaitan dengan keseriusan pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya, melalui "kekuasaan/kewenangan" yang dimiliki dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan, dimaksudkan agar dapat mengangkat keterbatasan masyarakat miskin terhadap akses permodalan, tempat usaha dan keberlangsungan pekerjaan/usaha. Dalam konteks persaingan global, perlindungan (proteksi) dan dukungan peme-

rintah terhadap pengembangan ekonomi tradisional (informal) sangat diperlukan terutama melalui kebijakan investasi yang seimbang antara pengembangan ekonomi tradisional dan modern. Oleh karena itu, melepas ekonomi tradisional (yang dicirikan dengan berbagai keterbatasan) untuk bersaing dengan ekonomi modern (yang memiliki berbagai kekuatan) secara bebas dalam persaingan global, merupakan sebuah kekeliruan besar. Yang lebih penting dilakukan adalah memberdayakan ekonomi tradisional agar dapat hidup berdampingan dengan ekonomi modern, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Di kedua lokasi penelitian, pemerintah daerah memprioritaskan pengurangan tingkat kemiskinan dengan kebijakan dan program yang berdimensi pendapatan (meliputi penguatan ekonomi rakyat), dan dimensi non pendapatan (jaminan sosial seperti bantuan kesehatan dan pendidikan). Tingkat pencapaian program terkait pekerjaan layak dan pengurangan kemiskinan tergantung pada fokus dan strategi masing-masing daerah otonom dalam mengimplementasikan kebijakan yang didengungkan (*pro-growth pro-job* dan *pro-poor*). Bahkan pemerintah propinsi setempat menambahkan faktor lingkungan yaitu *pro-environment*.

Faktor 2: Koordinasi Terpadu dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program Pembangunan

Koordinasi antar pelaksana kebijakan dan program di tingkat satuan pelaksana kedinasan di setiap daerah merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan, bahkan sering menjadi hambatan pembangunan setelah penerapan desentralisasi. Sering kali ditemukan adanya saling tumpang tindih pelaksanaan kebijakan antara pelaksana kedinasan dengan pelaksana kebijakan sehingga efektivitas program menjadi kurang optimal. Lemahnya koordinasi di tingkat pelaksana kebijakan juga semakin diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pada setiap kegiatan. Dalam hal ini kapabilitas dan ketegasan pimpinan daerah merupakan salah satu aspek yang

sangat penting dan menjadi poin tersendiri yang dapat menentukan keberhasilan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat daerah. Sementara, aspek pengawasan dari lembaga legislatif dan komponen masyarakat dapat menjadi pendorong pelaksanaan dan pertanggungjawaban berbagai kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Perbedaan program yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan berpengaruh terhadap tata kelola penanggulangan kemiskinan di tiap daerah. Penguatan ekonomi rakyat dengan sasaran yang berbeda pada kelompok usaha rakyat melibatkan berbagai unsur birokrasi yang memerlukan perencanaan terpadu, koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan yang intensif untuk mencapai hasil yang optimal. Di kota Surakarta di mana program penguatan ekonomi rakyat difokuskan ke aspek perdagangan dan jasa (unggulan ekonomi kota Surakarta), maka pada tiap kelompok sasaran melibatkan berbagai unsur birokrasi sejalan dengan tupoksi masing-masing. Maka diperlukan koordinasi antarbirokrasi agar tidak terjadi inefisiensi dan tumpang tindih seperti yang biasa terjadi apabila ego sektoral tetap dipertahankan. Penekanan program penanggulangan kemiskinan di kota Surakarta adalah penguatan ekonomi rakyat, khususnya bidang perdagangan dan jasa yang cukup menonjol dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya program penguatan ekonomi rakyat tingkat kelurahan bahkan RT/RW, yang memanfaatkan dana hibah cukai rokok dan APBD, harus melibatkan berbagai unsur birokrasi seperti Disperindag, *Techno Park* (penguatan UMKM, pelatihan dan pembelian alat), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Koperasi/ lembaga simpan pinjam tingkat RT.

Pembinaan sektor perdagangan kuliner yang terkait dengan peningkatan wisata niaga Solo dikenal dengan program GALABO (Gladag Langen Boga) dengan sasaran pedagang kuliner tingkat menengah. Program ini dikelola oleh Disperindag (dana dari pusat dan APBD) dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur bi-

rokrasi lainnya dalam Pokja yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan Kota dan SKPD terkait lainnya. Program *Sunday Market* Ngarsopura dikelola oleh UMKM juga melibatkan Disperindag untuk pembinaan, UMKM dan koperasi untuk membantu di bidang permodalan, dengan sasaran ekonomi kerakyatan (kelompok usaha mikro). Program relokasi PKL dari lokasi jalur hijau ke lokasi lain yang disediakan Pemkot, memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai SKPD dan unsur masyarakat lainnya, koordinasi antar pelaksana program (Deperindag dan Disperindag, Dinas Pasar, Dishub dan Koperasi).

Dampak yang dapat dilihat adalah meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, konsumen yang makin meluas (semua kalangan) dan transportasi yang semakin ramai. Dampak penting lainnya adalah meningkatnya kelayakan pekerjaan PKL dilihat dari sisi pendapatan, keamanan kerja, kelangsungan pekerjaan, kesempatan kerja dan memformalkan status usaha (dari kegiatan liar ke usaha resmi dengan SIUP). Paket relokasi PKL secara massal memperoleh kritik dari LSM, karena berdampak pada dihapusnya lokalisasi 'Silir' yang dianggap dapat menimbulkan masalah lain. Dalam paket program relokasi PKL, yang dibutuhkan sektor informal adalah perlindungan, pengakuan dan pelayanan, sehingga dengan upaya meningkatkan kelayakan pekerjaan, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Namun demikian upaya relokasi tidak semua berhasil karena antara lain faktor keterbatasan lahan untuk lokasi baru dan proses perubahan mental yang biasanya memerlukan waktu lama.

Program penguatan ekonomi rakyat di kota Tangerang lebih bersifat makro terutama diarahkan ke pelatihan kelompok masyarakat miskin. Namun demikian akses dan fasilitas dari Pemkot Tangerang kurang mendapat sambutan masyarakat karena berbagai faktor antara lain kurang sosialisasi, materi pembelajaran yang kurang sesuai dan keterbatasan dana untuk mencakup sasaran kantong-kantong kemiskinan yang luas. Dampaknya program semacam ini cenderung bersifat proyek, ego sektoral ma-

sing-masing dinas terkait masih kuat, sehingga hasilnya kurang tepat sasaran dan tidak optimal.

Faktor 3: Ketersediaan data dan penyesuaian indikator pengurangan kemiskinan

Ketersediaan data yang akurat tentang jumlah penduduk miskin sangat penting untuk keberhasilan berbagai program terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Validitas jumlah penduduk miskin sangat diperlukan, karena banyak program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik (seperti pendidikan, kesehatan, permukiman dan pemberdayaan masyarakat) memerlukan data yang akurat untuk sasaran program. Oleh karena penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar, maka konsep dan indikator kemiskinan harus jelas. Selama ini terdapat beberapa pendekatan yang dipakai untuk mengetahui jumlah penduduk miskin antara lain BPS, Kemendiknas, dan BKKBN yang menghasilkan angka penduduk miskin yang berbeda, karena perbedaan konsep dan indikator yang digunakan. Hal ini menyebabkan angka penduduk miskin sering diperdebatkan sesuai dengan kepentingannya.

Program penanggulangan kemiskinan secara nasional mengacu pada data yang disediakan BPS yang menggunakan 14 indikator untuk menetapkan sasaran program. Namun penggunaan 14 indikator kemiskinan versi BPS di beberapa daerah diperdebatkan, karena kurang mencerminkan kondisi sebenarnya penduduk miskin, terutama untuk diterapkan di daerah perkotaan. Hal ini ditemukan dalam kajian di kedua lokasi, terdapat beberapa indikator dari 14 indikator kemiskinan yang ditetapkan secara nasional (versi BPS) tidak aplikatif jika diterapkan pada masyarakat miskin perkotaan. Oleh karena itu, dalam kerangka pengurangan kemiskinan (dan sekaligus dalam upaya pencapaian pekerjaan layak) penentuan indikator berdasarkan karakteristik lokal merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Inisiatif ini telah dilakukan oleh Pemda Surakarta dengan

mengembangkan 24 indikator kemiskinan lokal yang lebih terukur sesuai dengan karakteristik masyarakat di kota Surakarta. Sementara untuk kasus kota Tangerang, inisiatif tersebut masih dalam tahapan proses validasi dan direncanakan baru selesai pada akhir tahun 2011. Meskipun demikian kedua lokasi mengakui pentingnya lembaga penyedia data yang mengelola dan mengembangkan data kemiskinan sesuai dengan kondisi nyata masing-masing daerah (Bappeda Kota Tangerang, 2009 dan Bappeda Kota Surakarta, 2009). Bahkan kota Surakarta lebih maju dalam hal modifikasi konsep dan indikator kemiskinan, karena selain sudah mengembangkan indikator kemiskinan, juga sudah menggunakannya sebagai acuan sasaran berbagai program terkait dengan layanan publik (Bappeda Kota Surakarta, 2009)

Pengembangan indikator kemiskinan dari 14 menjadi 24 indikator di kota Surakarta, didasarkan pada kenyataan bahwa dengan menggunakan 14 indikator BPS kurang menggambarkan kondisi kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat kota Surakarta. Beberapa kriteria yang digunakan BPS, terutama 'pemilikan perumahan' tidak cocok untuk menggambarkan angka kemiskinan, sehingga apabila kriteria BPS yang digunakan, tingkat kemiskinan menjadi sangat rendah, dan hampir semua masyarakat kota Surakarta kurang tepat mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Modifikasi dan tambahan menjadi 24 indikator disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga data kemiskinan yang diperoleh dianggap lebih akurat, dan sasaran program lebih tepat. Hampir semua program penanggulangan kemiskinan diarahkan ke sasaran kelompok miskin berdasarkan indikator kemiskinan lokal, sehingga setiap program mempunyai target kelompok yang jelas. Upaya modifikasi indikator kemiskinan ini sedang dalam proses untuk diusulkan ke tingkat nasional agar menjadi pertimbangan untuk alternatif pendekatan dalam menghitung angka kemiskinan nasional.

Sementara di kota Tangerang sasaran penduduk miskin masih menggunakan kriteria BPS (14 indikator), sehingga fokus sasaran tiap program berbeda sesuai dengan kepentingannya, dan membutuhkan penyesuaian terus menerus karena kurang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Sudah waktunya BPS memperbaharui kriteria kemiskinan dengan mengakomodir kriteria-kriteria yang diusulkan daerah. Hal ini perlu agar pencapaian hasil di tiap daerah dapat dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang disepakati secara nasional.

Selain pentingnya ketersediaan indikator kemiskinan berbasis karakteristik lokal, ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan terpadu juga merupakan faktor yang sangat vital dalam menentukan efektifitas pengurangan kemiskinan dan pencapaian pekerjaan layak di tingkat daerah. Inisiatif yang dilakukan Pemkot Surakarta merupakan *best practice* yang perlu diikuti daerah lainnya, karena keakuratan dan keterpaduan data telah dikelola dengan baik dan *up to date*. Sejak tahun 2008, di bawah koordinasi Bappeda, penduduk miskin di kota Surakarta telah dapat dipetakan hingga di tingkat rumah tangga (termasuk kejelasan jumlah anggota rumah tangga, status dan alamat tempat tinggal). Sementara pada kasus kota Tangerang, inisiatif tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengembangan Statistik Daerah Kota Tangerang pada tahun 2010 yang salah satu tupoksinya adalah mengkoordinasikan keakuratan dan keterpaduan data kemiskinan di Kota Tangerang. Fungsi ini diperkuat dengan pembentukan kelompok kerja pendataan dan sistem informasi sebagai bagian dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan propinsi dan kabupaten/kota, yang berfungsi : 1) Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan; 2) Pengembangan indikator kemiskinan daerah; 3) Pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan 4) Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan (Bappeda Kota Tangerang, 2009:181-182).

Faktor 4: Keterlibatan Seluruh Komponen Kepentingan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sejak pelaksanaan desentralisasi tahun 1999, model pembangunan yang berorientasi dan menggunakan pendekatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat mulai marak diadopsi oleh birokrasi di pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Kondisi ini cukup menggembirakan karena artinya masyarakat terlibat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program yang mewarnai kehidupan mereka, sehingga persepsi lokal, pola, sikap dan nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat ikut dipertimbangkan secara penuh. Dengan kata lain masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian masyarakat tersebut kemudian akan memperkuat posisi tawar masyarakat di hadapan negara atau pemerintahnya. Sementara pemerintah akan semakin sensitif terhadap tanggung jawab yang diemban terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas dan pemenuhan berbagai kebutuhan mendasar (kesehatan dan pendidikan).

Lesson learned yang dapat diambil dari hasil studi di kota Surakarta adalah pemberdayaan yang dilakukan memerlukan proses cukup lama dan dibutuhkan adanya kekuatan dari semua unsur (pemerintah dan masyarakat) untuk mau dan mampu berubah ke arah yang lebih baik. Kemauan yang kuat dan langkah-langkah yang akan dilakukan dari pimpinan daerah ini perlu disosialisasikan secara bertahap, dan pelaksanaannya perlu koordinasi yang solid dari aparat birokrasi terkait dan yang terpenting mendapat dukungan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat meminimalisir gejolak yang mungkin terjadi. Dukungan dari LSM (NGO) juga sangat berperan dalam membuka dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat, sehingga kontrol terhadap proses pembangunan berjalan seimbang. Partisipasi dan aspirasi publik juga sangat dihargai sehingga setiap kebijakan yang diambil didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Peran pimpinan (formal dan in-

formal) dalam menggerakkan masyarakat untuk mau berubah ke arah yang lebih baik sangat penting, dengan tetap menghormati tradisi/budaya dan kebiasaan masyarakat setempat Sebagai contoh adalah kasus relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Taman Kota Banjarsari yang memerlukan waktu cukup panjang untuk sosialisasi dan negosiasi dan dinilai banyak pihak berhasil dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui usaha yang lebih layak, baik lokasi maupun finansialnya. Sedangkan untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan melalui berbagai program seperti PKMS dan Solo Techno Park di Surakarta dan pemberian Kartu Multiguna di Tangerang yang meliputi jaminan kesehatan dan pemberian beasiswa bagi kelompok miskin. Program-program ini sangat memanjakan kelompok masyarakat miskin, sehingga mereka diharapkan dapat tenang dan nyaman bekerja, karena mendapat akses dan fasilitas yang memadai di bidang pendidikan dan kesehatan.

5.3. Strategi Pencapaian Pekerjaan Layak

Pembelajaran (*lesson learned*) dari studi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari setiap program pengurangan kemiskinan sangat ditentukan dari ada tidaknya keberpihakan dan partisipasi terhadap kelompok miskin (*pro poor*). Dalam konteks pengurangan kemiskinan, setidaknya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya: 1) Sasaran harus jelas yaitu tersedianya data tentang kelompok penduduk miskin yang akurat dan sesuai dengan kondisi kemiskinan perkotaan, sehingga dapat menjadi panduan semua pihak terkait dalam kebijakan/pelaksanaan program; 2) Memahami kondisi dan karakteristik kelompok-kelompok sasaran sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan sasaran, dengan membedakan kelompok yang hanya perlu bantuan sosial (lansia dan keterbatasan sosial) dan kelompok yang memerlukan bantuan usaha; 3) Kemauan politik dan kemauan aksi para pengambil kebijakan untuk menggerakkan semua aparat birokrasi di daerah otonom untuk

mengaplikasikan kebijakan nasional menjadi kebijakan dan program yang aplikatif sesuai dengan potensi daerah dan kondisi sosial budaya masyarakat sasaran program; 4) Memastikan bahwa program berjalan dengan koordinasi dan pengawasan yang efektif, sehingga tidak hanya untuk kepentingan proyek (*project oriented*) dan berakhir tanpa mencapai sasaran optimal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pendalaman materi studi yang dilakukan, berikut ini adalah beberapa catatan terkait dengan strategi yang dapat ditempuh oleh semua pemangku kepentingan terhadap pencapaian pekerjaan layak. Strategi yang dibangun disinergikan melalui upaya pencapaian empat elemen dasar pekerjaan layak dengan berbagai prioritas kebijakan dan program pembangunan, khususnya yang terkait dengan pencapaian pekerjaan layak dan pengurangan kemiskinan di sektor informal perkotaan. Tabel 5.1 di bawah ini merangkum beberapa usulan strategi yang dapat ditempuh dalam kerangka pencapaian pekerjaan layak di ekonomi informal perkotaan dalam konteks pengurangan kemiskinan.

Tabel.5.1.

Matrik Strategi Pencapaian Pekerjaan Layak Berdasarkan Indikator Elemen Dasar dan Prioritas Kebijakan dan Program

Elemen Dasar Pencapaian Pekerjaan Layak	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
Dimensi Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi kerakyatan yang mengedepankan pendekatan manusiawi • Penataan kegiatan ekonomi informal yang lebih “layak”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan terhadap kualitas pekerjaan yang diciptakan (terutama perbaikan tingkat upah) • Meningkatnya kegiatan investasi yang seimbang antara sektor tradisional dan modern.

Elemen Dasar Pencapaian Pekerjaan Layak	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan pendekatan pendapatan dan non pendapatan • Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang <i>pro-poor</i> dan menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas. • Upah minimum sektor informal-formalisasi sektor informal • Upah layak berdasarkan KHL 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan “kaya pekerjaan” yaitu pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kesempatan kerja yang lebih banyak dan produktif (layak). • Memberikan perhatian khusus kepada “<i>working poor</i>” yang tidak dapat meningkatkan penghasilan dan rentan terhadap gejolak ekonomi. • Perlindungan pada kelompok ekonomi lemah (informal) terhadap persaingan tidak sehat • Meningkatnya kegiatan ekonomi informal yang secara langsung dapat menjadi jaring pengaman sosial dan kebutuhan lapangan kerja yang terbatas
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan kesempatan mengikuti atau mendapatkan pelatihan dan keterampilan, bimbingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi

Elemen Dasar Pencapaian Pekerjaan Layak	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pelatihan dan bantuan kredit permodalan bagi kelompok masyarakat miskin atau marginal. • Peningkatan peran kelembagaan lokal/tradisional di tingkat masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat • Pemanfaatan teknologi dan pengetahuan (terutama teknologi informasi dan komunikasi) • Optimalisasi peluang ekonomi melalui penguatan kelembagaan lokal/masyarakat yang dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kewirausahaan (khususnya di sektor informal) dan lingkungan kondusif untuk pengembangan usaha ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan terhadap akses tempat usaha, kelembagaan keuangan (permodalan), dan pemasaran • Peraturan di tingkat daerah yang menjamin perlindungan hukum dan pengakuan atas hak individu. • Perlindungan dan dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Elemen Dasar Pencapaian Pekerjaan Layak	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas berbasis kemampuan daerah dan keunggulan kompetitif lokal dalam konteks global 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketenangan dalam berusaha • Terberdayakannya sektor unggulan lokal yang banyak menyerap tenaga kerja • Termanfaatkannya sumber daya lokal secara optimal • Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat lokal
<p>Pemenuhan standard an hak-hak di tempat kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesetaraan dan perlakuan adil • Terlaksananya Penegakan hukum yang adil • Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengawas ketenagakerjaan • Peningkatan peran <i>civil society</i> dalam pengawasan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan pengembangan potensi diri dan profesi • Berkurangnya kesenjangan jender dalam hal penerimaan upah, jam kerja dan jenis pekerjaan • Berkurangnya tindakan kekerasan terhadap perempuan • Penegakan hukum terhadap perilaku pelanggaran • Meningkatnya peran petugas pengawas ketenagakerjaan

Elemen Dasar Pencapaian Pekerjaan Layak	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tanggung jawab masyarakat terhadap jalannya pengawasan dan proses pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan terhadap pekerja paksa dan pekerja anak • Sekolah bagi kelompok rentan/miskin/marginal 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya jumlah anak yang terlibat aktif dalam pekerjaan • Meningkatnya partisipasi anak di bidang pendidikan • Penindakan hukum yang tegas terhadap pengambil manfaat dari perbudakan modern dan perdagangan mausia
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan standar an hak-hak pekerja sesuai dengan nilai dan prinsip fundamental serta penerapan standar ketenagakerjaan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Ratifikasi berbagai konvensi internasional yang mengakui prinsip dan hak fundamental setiap pekerja • Pengawasan terhadap pelaksanaan ratifikasi konvensi internasional • Pengakuan secara efektif atas hak-hak pekerja dalam hukum perburuhan dan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan

Elemen Dasar Pencapaian Pekerjaan Layak	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
<p>Jaminan Perlindungan sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan cakupan jaminan sosial •Peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya cakupan pekerja yang dilindungi oleh sistem jaminan sosial, baik yang dikelola oleh pemberikerja (pengusaha) maupun negara • Terlaksananya amanat konstitusi yang telah diatur dalam UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN • Teraksesnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat • Lingkungan kerja yang minim resiko berbahaya • Pelaksanaan UU BPJS yang tepat waktu
<p>Dialog sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi kerakyatan yang mengedepankan pendektan manusiawi- dan dialog antar pihak yang berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tingkat partisipasi pekerja dalam organisasi atau perkumpulan profesi

Elemen Dasar Pencapaian Pekerjaan Layak	Prioritas Kebijakan dan Program	Sasaran Pencapaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan • Pengembangan kemitraan usaha • Hubungan kerja yang harmonis 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya saluran aspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengusulkan maupun mengawasi jalannya suatu kebijakan atau program • Terjalannya hubungan yang saling menguntungkan antara usaha tradisional dan modern • Meningkatnya jumlah modal usaha tradisional seiring dengan peningkatan usaha dan kerjasama dengan usaha modern • Berkurangnya kasus-kasus perselisihan perburuhan • Berkurangnya aksi-aksi demonstrasi yang anarkis • Adanya saluran penyampaian aspirasi yang mengedepankan saling pengertian • Diakuinya kelompok minoritas dan terpinggirkan sebagai kekuatan bersama dalam proses pembangunan

5.4. Penutup

Pencapaian pekerjaan layak merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping meningkatkan pendapatan, pencapaian pekerjaan layak juga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas. Pencapaian pekerjaan layak juga berperan dalam menjaga martabat pribadi, stabilitas ekonomi di tingkat keluarga, dan bentuk demokrasi yang menjadi hak setiap individu dalam masyarakat. Di samping itu, pencapaian pekerjaan yang layak sangat diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Upaya pencapaian pekerjaan layak untuk semua orang (*decent work for all*) tidak akan berhasil tanpa menyentuh perekonomian sektor informal. Hal ini karena yang menjadi target dari pencapaian pekerjaan layak adalah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang sebagian besar adalah para pelaku kegiatan perekonomian sektor informal. Oleh karena itu diperlukan strategi yang komprehensif dan terpadu yang mencakup berbagai kebijakan dan program yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna mengurangi aspek keterbatasan dan kelemahan sektor informal. Upaya yang harus terus dilakukan adalah mempertahankan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan potensi ekonomi informal, peningkatan perlindungan, hingga meningkatkan keterlibatan para pekerja dan unit-unit ekonomi sektor informal dalam setiap penentuan kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil kajian ini di kota Solo dan Tangerang terkait dengan kelayakan pekerjaan ekonomi informal semakin menegaskan bahwa penerapan indikator *decent work* ILO perlu lebih hati-hati karena tidak semua indikatornya cocok untuk pekerjaan di lokasi penelitian. Sebaliknya, terbuka lebar kemungkinan adanya indikator baru yang dapat memperkaya konsep, terutama di ekonomi informal dan di tingkat mikro (individu/rumah tangga) yang relatif lebih bervariasi. Dari hasil studi ini ditemukan bahwa indikator

yang bersifat pendapatan memiliki tingkat signifikansi yang sangat kuat terhadap pencapaian pekerjaan layak. Semakin tinggi kemungkinan adanya peningkatan pendapatan berbanding lurus dengan capaian pekerjaan layak. Sementara dari hasil kajian kualitatif terhadap pendekatan non pendapatan, seperti peremajaan pasar tradisional, jaminan kepastian hukum usaha, pelatihan dan pemberian modal usaha kepada pelaku ekonomi informal, ditegarai sangat berdampak positif terhadap pencapaian pekerjaan layak di lokasi penelitian. Oleh karena itu, ekonomi informal perlu mendapat perhatian lebih besar karena berperan penting dalam penyerapan angkatan kerja, terutama dalam hal kepastian kelangsungan usaha, dukungan sarana usaha (peremajaan pasar tradisional) dan peningkatan akses bantuan modal pinjaman dari berbagai sumber. Selain itu, perlu peningkatan pendidikan/keterampilan untuk kelompok ekonomi informal, terutama kelompok masyarakat miskin dan pemuda agar mereka mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan lebih aman

Dalam konteks persaingan global, perlindungan (proteksi) dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi tradisional (informal) sangat diperlukan terutama melalui kebijakan investasi yang seimbang antara pengembangan ekonomi tradisional dan modern. Oleh karena itu, melepas ekonomi tradisional (yang dicirikan dengan berbagai keterbatasan) untuk bersaing dengan ekonomi modern (yang memiliki berbagai kekuatan) secara bebas dalam persaingan global, merupakan sebuah kekeliruan besar.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United National Development Goals, 2008. *"Millennium Development Goals"*, Dokumen MDGs Bappenas dan UNDP
Badan Pusat Statistik, 2010. *"Data Strategis BPS."* Jakarta: Katalog BPS

- Basri, Faisal dan Munadar, Haris. 2009. "*Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia.*" Jakarta: Penerbit Kencana.
- Erfani, Sairi.dkk, 2004. "*Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi.*" Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Jakarta
- Erfani, Sairi.dkk, 2004. "*Perkembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi.*" Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Jakarta.
- Ghai, Dharam, 2003. "*Decent work: Concept and Indicators.*" International Labour Review, Vol. 142 (2003), No. 2. International Labour Organization (ILO), 2003.
- Ghai, Dharam, 2002. "*Decent work: Concepts, Models and Indicators.*" Discussion Paper, International Institute for Labour Studies, Geneva, 2002.
- International Labour Organization (ILO), 1999. "*Decent work.*" Report of the Director-General, ILC, 87th Session, June 1999.
- International Labour Organization (ILO), 2007. "*The Informal Economy: Enabling Transition to Formalization.*" Working Paper, ILO: 2008.
- International Labour Organization (ILO), 2008. "*Measurment of Decent work.*" Discussion paper for the Tripartite Meeting of Experts on the Measurment of *Decent work*. ILO Geneva: October 2008
- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2010. "*Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014*". Jakarta: 2010
- Nagib, L. dkk.2010. "*Pemetaan Pekerjaan Pada Penduduk di Kawasan Miskin Perkotaan di Kota Bandung.*" Laporan Penelitian, PPK LIPI:2010 (akan terbit).
- Nawawi.dkk. 2004. "*Kutai Kartanegara dalam Era Otonomi Daerah: Kebijakan Ketenagakerjaan.*" Seri Penelitian PPK LIPI No.52/2004.

- Richard Anker et al, 2002. *"Measuring Decent work with Statistical."* Working Paper No.2 October 2002. Policy Integration Department Statistical Development and Analysis Group, International Labour Office, Geneva: 2002
- Sumodiningrat, 2007. *"Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia."* Penerbit Kompas-Gramedia. Jakarta
- United Nations, 2005. *"World Summit Outcome."* Resolution adopted at the 60th Session of the General Assembly, New York, 2005 (A/RES/60/1, para. 47).
- United Nations, 2007. *"Report of the Economic and Social Council for the 2007."* Ministerial Declaration of the High-level Segment, adopted at the 62nd Session of the General Assembly, New York, 10 July 2007 (A/62/3).
- Widiarti, Diah, 2007. *"Kajian tentang Indikator Kerja yang Layak di Indonesia."* Laporan Penelitian, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Desember 2007.